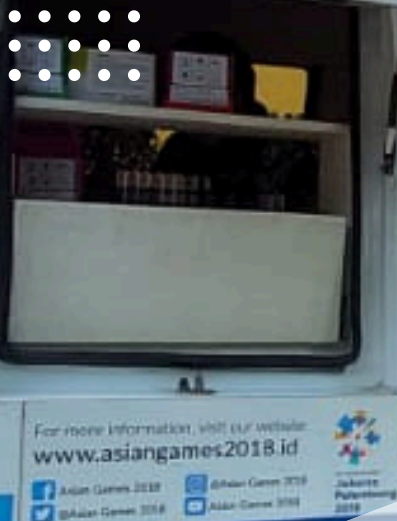


LAPORAN KINERJA

TAHUN
2024

BALAI POM DI BOGOR



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun 2024 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024



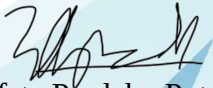
Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai POM di Bogor dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor Tahun 2024 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Balai POM di Bogor Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2024 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target tahun 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor pada periode selanjutnya.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja

Bogor, Februari 2025
Kepala Balai POM di Bogor,


Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	VIII
IKHTISAR EKSEKUTIF	IX
BAB 1 PENDAHULUAN	12
1.1	10
1.2	10
1.3	12
1.4	12
1.5	13
1.5	16
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	30
2.1	27
2.2	29
2.3	34
2.4	38
2.5	43
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1	45
3.2	201
3.3	203
3.4	203
3.3	Error! Bookmark not defined.
BAB 4 PENUTUP	144
4.1	205
4.2	205
LAMPIRAN	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2024	37
Tabel 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bogor Tahun 2024	39
Tabel 3 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2024	44
Tabel 4 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024	45
Tabel 5 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-1 TAHUN 2024	47
Tabel 6 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2024	49
Tabel 7 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	49
Tabel 8 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	50
Tabel 9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"	52
Tabel 10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"	53
Tabel 11 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” TAHUN 2024	53
Tabel 12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	54
Tabel 13 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	55
Tabel 14 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"	56
Tabel 15 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"	57
Tabel 16 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2024	57
Tabel 17 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	58
Tabel 18 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR " PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	59
Tabel 19 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"	61
Tabel 20 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"	61
Tabel 21 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 202	62
Tabel 22 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	62
Tabel 23 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR " Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	64
Tabel 24 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"	65
Tabel 25 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"	65
Tabel 26 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat”	66
Tabel 27 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	66
Tabel 28 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat"	68
Tabel 29 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat "	68
Tabel 30 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TAHUN 2024	69
Tabel 31 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TAHUN 2024	70
Tabel 32 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	70
Tabel 33 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	72

Tabel 34 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan"	73
Tabel 35 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan "	73
Tabel 36 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan" TAHUN 2024	74
Tabel 37 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan" TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	74
Tabel 38 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN" TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	76
Tabel 39 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan"	77
Tabel 40 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan "	77
Tabel 41 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu" TAHUN 2023"	78
Tabel 42 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu" TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	79
Tabel 43 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU" TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	80
Tabel 44 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu" TAHUN 2023	81
Tabel 45 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu "	82
Tabel 46 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" TAHUN 2024	82
Tabel 47 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	83
Tabel 48 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	84
Tabel 49 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"	85
Tabel 50 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan "	86
Tabel 51 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" TAHUN 2024	86
Tabel 52 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan" TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	87
Tabel 53 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	88
Tabel 54 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"	89
Tabel 55 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan "	89
Tabel 56 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" TAHUN 2024	90
Tabel 57 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	90
Tabel 58 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	92
Tabel 59 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik "	93
Tabel 60 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik "	93
Tabel 61 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TAHUN 2024	94
Tabel 62 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan" TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	95
Tabel 63 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN" TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	96
Tabel 64 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan "	98

Tabel 65 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan "	99
Tabel 66 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TAHUN 2024	99
Tabel 67 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2024	99
Tabel 68 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	100
Tabel 69 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	101
Tabel 70 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar"	102
Tabel 71 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar "	103
Tabel 72 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2024	103
Tabel 73 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	103
Tabel 74 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	105
Tabel 75 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar"	105
Tabel 76 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar "	106
Tabel 77 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TAHUN 2024	106
Tabel 78 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” Tahun 2024	107
Tabel 79 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	108
Tabel 80 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	109
Tabel 81 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan "	112
Tabel 82 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan "	113
Tabel 83 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6 TAHUN 2024	113
Tabel 84 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase implementasi rencana aksi RB” Tahun 2024	114
Tabel 85 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase implementasi rencana aksi RB” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	114
Tabel 86 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase implementasi rencana aksi RB” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	115
Tabel 87 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase implementasi rencana aksi RB "	117
Tabel 88 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase implementasi rencana aksi RB "	117
Tabel 89 Kategori Penilaian SAKIP	118
Tabel 90 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “NILAI AKIP UPT” Tahun 2024	118
Tabel 91 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “NILAI AKIP UPT” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	118
Tabel 92 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “NILAI AKIP UPT” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	119
Tabel 93 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " NILAI AKIP UPT "	120
Tabel 94 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " NILAI AKIP UPT "	121
Tabel 95 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 Tahun 2024	121
Tabel 96 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Profesionalitas ASN UPT” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	122
Tabel 97 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Profesionalitas ASN UPT” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	123
Tabel 98 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Indeks Profesionalitas ASN UPT "	124
Tabel 99 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Indeks Profesionalitas ASN UPT "	124
Tabel 100 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 Tahun 2024	125

Tabel 101 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	126
Tabel 102 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	127
Tabel 103 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Tahun 2024	127
Tabel 104 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal "	128
Tabel 105 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal "	128
Tabel 106 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TAHUN 2024	128
Tabel 107 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT” TAHUN 2024	129
Tabel 108 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	129
Tabel 109 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS	131
Tabel 110 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Nilai Kinerja Anggaran UPT"	132
Tabel 111 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Nilai Kinerja Anggaran UPT "	132
Tabel 112 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023	132
Tabel 113 RINCIAN REALISASI ANGGARAN BALAI POM DI BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024	135
Tabel 114 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN KEGIATAN	136
Tabel 115 PengukuranTingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2024	138
Tabel 116 Capaian Output Tahun 2024	141



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Bogor	14
Gambar 2 Data Pegawai Balai POM berdasarkan pendidikan tahun 2024	15
Gambar 3 Wilayah Kerja Balai POM di Bogor	16
Gambar 4 Julah Sarana Produksi di wilayah kerja Balai POM	17
Gambar 5 Jumah Sarana Distribusi di wilayah kerja Balai POM	17
Gambar 6 Misi Loka POM di Kabupaten Bogor	32
Gambar 7 Peta Strategis Loka POM di Kabupaten Bogor	33
Gambar 8 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Bogor periode 2021-2024	36
Gambar 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	42
Gambar 10 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT"	50
Gambar 11 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT"	54
Gambar 12 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024	59
Gambar 13 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024	63
Gambar 14 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024	67
Gambar 15 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan "	71
Gambar 16 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan "	75
Gambar 17 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu "	79
Gambar 18 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan "	84
Gambar 19 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan "	87
Gambar 20 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik "	91
Gambar 20 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan "	96
Gambar 22 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar "	100
Gambar 22 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar "	104
Gambar 24 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan "	109
Gambar 25 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase implementasi rencana aksi RB "	115
Gambar 26 Target Rencana Aksi RB tahun 2024	116
Gambar 27 Realisasi Rencana Aksi RB tahun 2024	116
Gambar 28 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " NILAI AKIP UPT "	119
Gambar 29 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Indeks Profesionalitas ASN UPT "	123
Gambar 30 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal "	126
Gambar 31 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Nilai Kinerja Anggaran UPT "	130
Gambar 32 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja	135

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 7 sasaran strategis memperoleh capaian “**Sangat Baik**”, dan 2 sasaran strategis dengan capaian “**Cukup**”.

Pernyataan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 105,23% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
2. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 107,22% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
3. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 100,10 % dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
4. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 120,00% dengan kriteria “**Sangat Baik**”
5. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 106,58% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
6. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor belum berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal dengan NPS sebesar 97,18% dengan kriteria “**Cukup**”.
7. Pada Tahun 2024 untuk indikator kegiatan “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal” dengan NPS sebesar 105,18% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
8. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS sebesar 120% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
9. Pada Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel dengan NPS sebesar 98,09 % dengan kriteria “**Cukup**”.

Persentase capaian target indikator kinerja Balai POM di Bogor pada tahun 2024 antara 97,19% sampai dengan 120%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal”. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” sebesar 120%.

Pada tahun 2024, anggaran Balai POM di Bogor sebesar 12.369.317.000 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. **12.337.033.774,-** (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 98,32%.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai POM di Bogor untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya



Bogor, Februari 2025

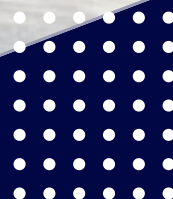
Kepala Balai POM di Bogor

Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si

LAPORAN KINERJA

TAHUN
2024

BALAI POM DI BOGOR



BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 berdasarkan Renstra Balai POM di Bogor Tahun 2021-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai POM di Bogor.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Badan POM terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan dari peraturan tersebut dan upaya efektivitas pengawasan obat dan makanan maka dibuatlah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BPOM yang tersebar di wilayah Indonesia.

UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Payung hukum pembentukan Balai POM di Bogor berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Bogor memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai POM beralamat Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kab. Bogor dengan wilayah kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Selain itu Balai POM di Bogor juga memiliki Laboratorium di Gedung II yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No 40 Cibinong Bogor.

KEDUDUKAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputy dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Balai POM di Bogor sebagai UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

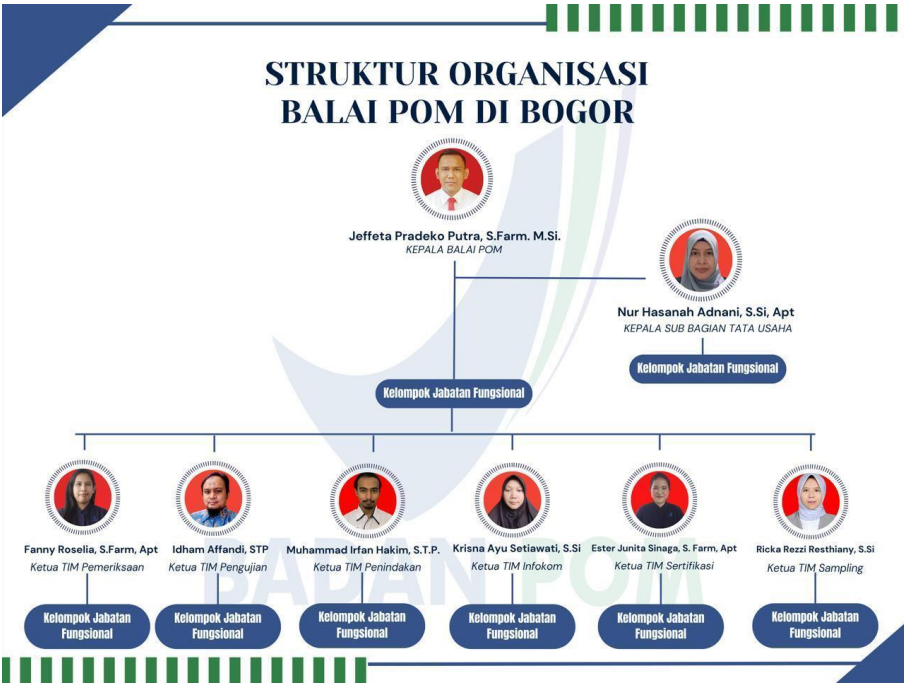
FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Bogor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai POM di Bogor

Struktur Organisasi Balai POM di Bogor berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 adalah Kepala Balai POM langsung membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim Kerja dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional tersebut masing-masing melaksanakan fungsi Informasi dan Komunikasi, Pemeriksaan dan Sertifikasi, Pengujian, Penindakan dan Tata Usaha.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sasaran strategis Balai POM di Bogor disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2024 (Renstra Tahun 2021-2024) Balai POM di Bogor. Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2024 tersebut diharapkan Balai POM di Bogor akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT
- b. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT
- c. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT
- d. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT
- e. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah

kerja UPT

- f. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT
- g. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT
- h. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal
- i. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
- j. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan
- k. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Terkait dengan peta strategi tersebut, Balai POM di Bogor sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM mempunyai peran strategis dalam pencapaian outcome tersebut di atas, utamanya dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Mengingat luasnya wilayah kerja dengan SDM yang masih kurang berdasarkan analisis beban kerja, Balai POM di Bogor berusaha melaksanakan fungsi dengan maksimal.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.5.1 INTERNAL

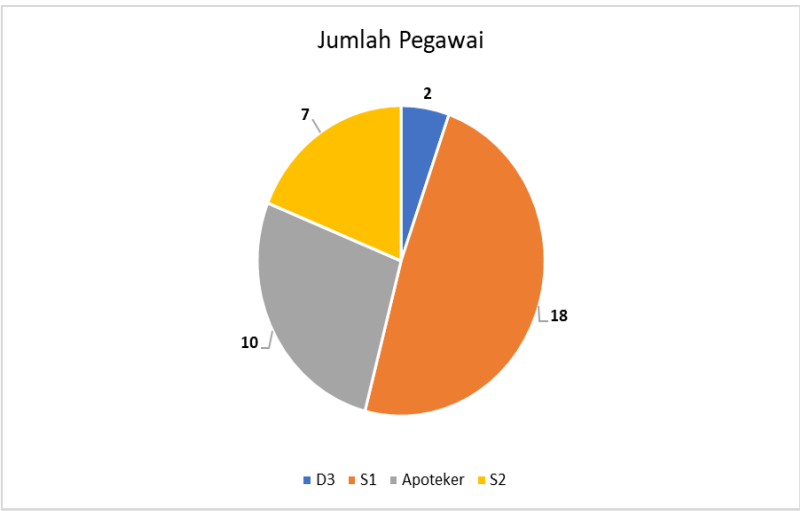
a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai POM di Bogor dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Bogor adalah sebanyak 37 Pegawai terdiri dari 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dimana jumlah tersebut berdasarkan analisis beban kerja (ABK) masih belum

tercukupi. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan bisa dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2 Data Pegawai Balai POM berdasarkan pendidikan tahun 2024

c. **Anggaran**

Anggaran Balai POM di Bogor bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-063.01.2.672846/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 10.922.419.000,- (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan mengalami revisi sebanyak 13 kali dengan anggaran akhir sebesar Rp. 12.548.251.000 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

d. **Sarana Prasana**

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Lahan dan bangunan yang digunakan oleh Balai POM di Bogor masih dengan status sewa dengan pihak ketiga yang berlokasi di Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kab. Bogor. Luas lahan Balai POM di Kabupaten Bogor seluas 387 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 202 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik selain itu terdapat 1 kantor yang difungsikan sebagai laboratorium yang beralamat di Ruko, Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.40, RT.04/RW.06, Kp. Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor Untuk menunjang operasional kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, tersedia kendaraan roda empat sebanyak 3 unit, 1 diantaranya adalah mobil laboratorium dan 2 unit yang lain adalah kendaraan operasional kantor yang merupakan kendaraan dengan status sewa dan kendaraan roda dua sebanyak 1 unit.

1.5.2 EKSTERNAL

A. Kondisi Geografis dan Demografis

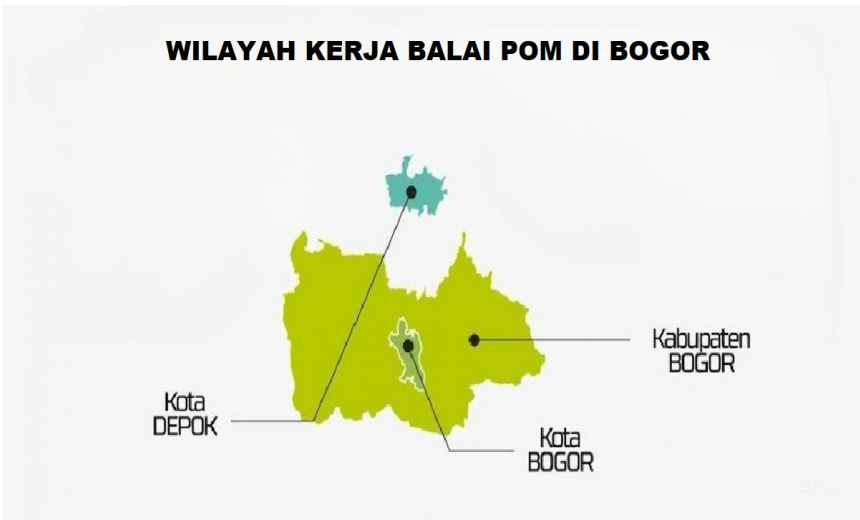
Berdasarkan PerBPOM Nomor 19 Tahun 2023, wilayah kerja Balai POM di Bogor meliputi 3 wilayah Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.

- Kabupaten Bogor
Luas : 2.986,20 km² (sumber : BPS Kabupaten Bogor Tahun 2021)

Penduduk : 5.489.536 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2021)
- Kota Bogor
Luas : 118.50 km² (sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2017)

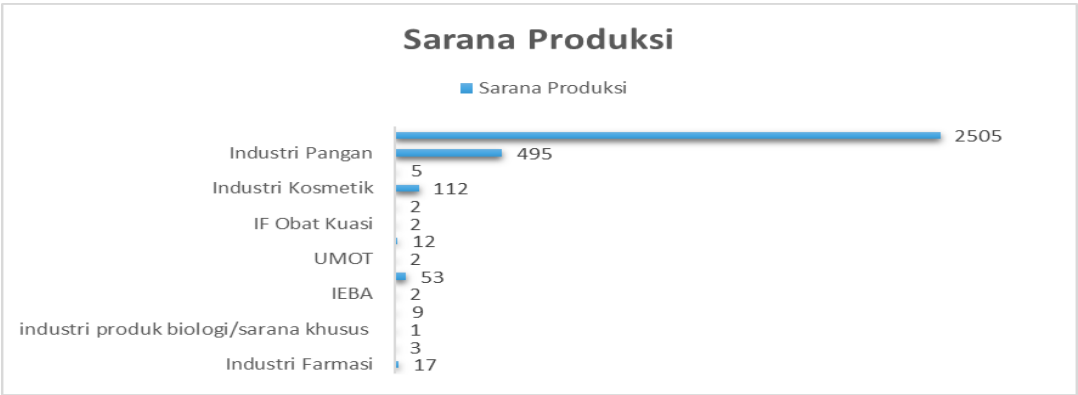
Penduduk : 1.052.359 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2021)
- Kota Depok
Luas : 200,29 km² (sumber : BPS Kota Depok Tahun 2018)

Penduduk : 2.056.335 (sumber : BPS Jawa Barat Tahun 2020)

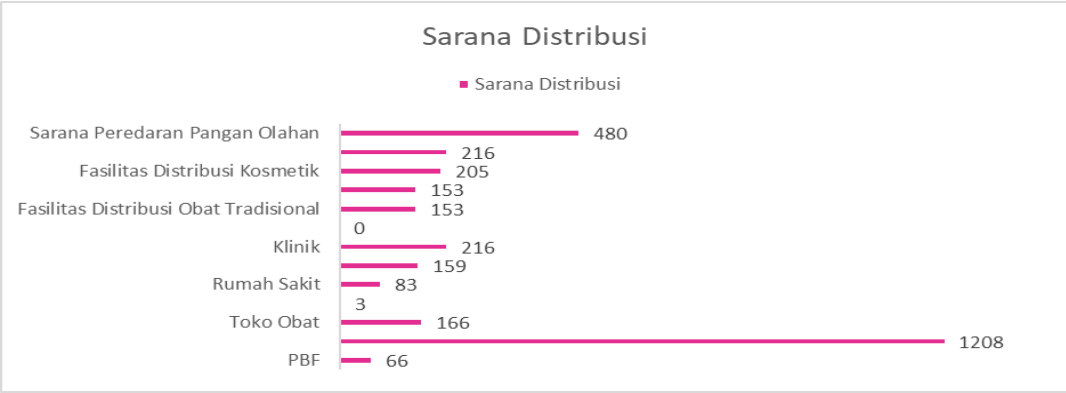


Gambar 3 Wilayah Kerja Balai POM di Bogor

B. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi



Gambar 4 Jumlah Sarana Produksi di wilayah kerja Balai POM di Bogor



Gambar 5 Jumlah Sarana Distribusi di wilayah kerja Balai POM di Bogor

1.5 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang mempengaruhi kinerja Balai POM di Bogor dikaji melalui Renstra 2021-2024 Loka POM di Kabupaten Bogor dibagi menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal:

1.5.1 Internal

A. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai POM di Bogor dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Bogor adalah sebanyak 40 Pegawai terdiri dari 34 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dimana jumlah tersebut berdasarkan analisis beban kerja (ABK) masih belum tercukupi.

C. Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Lahan dan bangunan

yang digunakan oleh Balai POM di Bogor masih dengan status sewa dengan pihak ketiga yang berlokasi di Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kab. Bogor. Luas lahan Balai POM di Kabupaten Bogor seluas 387 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 202 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik selain itu terdapat 1 kantor yang difungsikan sebagai laboratorium yang beralamat di Ruko, Jl. KSR Dadi Kusmayadi, RT.04/RW.06, Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor Untuk menunjang operasional kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, tersedia kendaraan roda empat sebanyak 3 unit, 1 diantaranya adalah mobil laboratorium dan 2 unit yang lain adalah kendaraan operasional kantor yang merupakan kendaraan dengan status sewa dan kendaraan roda dua sebanyak 1 unit.

1.5.2 Eksternal

A. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu. Semakin banyaknya pelayanan masyarakat yang disediakan, maka kebutuhan akan obat semakin meningkat sehingga diperlukan penjaminan mutu obat.

Balai POM di Bogor merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Bogor, yaitu:

- a. Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar
- Pengawasan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab.
 - Pelaksanaan regulasi yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, akses terhadap ahli dan referensi ilmiah.
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian impor, ekspor, produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Upaya ini merupakan suatu kesatuan utuh, dilakukan melalui penilaian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan dan pengujian sampel, surveilans dan pemantauan label atau penandaan, iklan dan promosi.
 - Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal.
 - Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya represif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - Perlindungan masyarakat terhadap pencemaran sediaan farmasi dari bahan- bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan.
- b. Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.

Pembinaan industri farmasi, makanan, kosmetika, dan obat tradisional di Jawa Barat agar mampu melakukan produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan (CPOB/CPPOB/CPKB/CPOTB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

Untuk itu, potensi permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balai POM di Bogor untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi obat yang beredar di pasaran. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan salah satunya SKN. Implementasi SKN merupakan peluang bagi Loka POM di Kabupaten Bogor untuk mendorong upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola perilaku dan lingkungan sehat khususnya Obat dan Makanan.

B. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN

diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya *demand* obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Loka POM di Kabupaten Bogor akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar, pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

C. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah kerja Balai POM di Bogor. Berdasarkan data yang ada, terdapat 22 Industri Farmasi, 112 Industri Kosmetik, 5 Industri Farmasi yang memproduksi Kosmetik, 495 Industri Pangan, 2505 Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), 2 Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT), 53 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 9 Industri Obat Tradisional (IOT), 12 Industri Farmasi yang memproduksi Suplemen Kesehatan, 2 Industri Farmasi yang memproduksi Kuasi, dan 2 Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan. Hal tersebut merupakan potensi bagi Balai POM di Bogor dalam

pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha, khususnya UMKM.

Hal ini menjadi peluang bagi Balai POM di Bogor untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai POM di Bogor, sampai dengan tahun 2024 persentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 66,07 %.

Selain itu Balai POM di Bogor, menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015.

D. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Balai POM di Bogor dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai POM di Bogor dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

E. Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro ekonomi, yakni PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, 17 Rencana Strategis Balai POM di Bogor Tahun 2021 - 2024 semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan. Pada tahun 2020, penduduk di Wilayah Kerja Balai POM di Bogor diperkirakan sebanyak 9,6 juta jiwa, menjadi tantangan bagi Balai POM di Bogor dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman. Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Balai POM di Bogor untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

F. Tuntutan Masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

G. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang

pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan Balai POM di Bogor berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai POM di Bogor semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai POM di Bogor tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif di dalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai POM di Bogor sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Balai POM di Bogor juga melayani penerimaan sampel obat dan makanan untuk kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM Bandung dari pihak ketiga. Secara umum, sampel yang diterima dari pihak ketiga berasal dari pelaku usaha UMKM yang sedang menuju MD.

H. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai POM di Bogor untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Bogor untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai POM di Bogor terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Laboratorium telah dibuat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Cibinong

Bogor.

I. Jejaring Kerja

Balai POM di Bogor menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai POM di Bogor mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Balai POM di Bogor sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), Indonesia Criminal Justice System (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF), World Health Organization (WHO), *Codex Alimentarius Commission*, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *ASEAN References Laboratories (AFL)*, *Pharmaceutical Inspection Convention And Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)*, *International Crime Police Organization* Interpol. Balai POM di Bogor melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan UMKM. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui Informasi Layanan Masyarakat.

J. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Bogor telah menyusun reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB.

a) Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, Loka POM di Kabupaten Bogor telah membentuk *agent of change* sebagai *role model* serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai Balai POM di Bogor secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB.

Untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan dibutuhkan media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan RB atau perubahan yang sedang dan akan dilakukan, termasuk pentingnya peran *agent of change* dan manfaat dari forum pembelajaran atau inovasi. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai POM di Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan *Quality Management System* ISO 9001:2015.

b) Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum

Telah banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan teknis pelaksanaan tugas fungsi Balai POM di Bogor. Pada level operasional, Balai POM di Bogor telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam pengawasan Obat dan Makanan, juga menerbitkan standar mutu lainnya, seperti standar produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Ketersediaan peraturan perundangan sampai dengan pedoman teknis yang dilegalkan dalam bentuk Peraturan Kepala BPOM tersebut sangat mendukung penegakan hukum. Tantangan ke depan, BPOM harus membuat terobosan dalam penegakan hukum seperti memperkuat kemitraan untuk pengawasan, penindakan, maupun persamaan persepsi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait, menggeser pengawasan ke area preventif, serta memperkuat kerjasama di *Free Trade Zone Area*. Upaya ini pun perlu diikuti dengan peningkatan kajian Balai POM di Bogor mengenai kerugian negara secara ekonomi maupun kesehatan akibat pelanggaran Obat dan Makanan

c) Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi

Tantangan BPOM ke depan adalah melakukan kajian, penataan, dan evaluasi organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. BPOM sebagai instansi vertikal, Balai POM di Bogor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai POM di Bogor turut mendukung program BPOM terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi tersebut di atas.

d) Penataan Tatalaksana

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Bogor berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko

terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai POM di Bogor tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan Quality Management System ISO 9001: 2015.

e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Loka POM di Kabupaten Bogor yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Perencanaan kebutuhan pegawai Balai POM di Bogor dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses penerimaan pegawai dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN serta promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengembangan pegawai yang dilakukan Balai POM di Bogor berbasis kompetensi yang selanjutnya capaian penilaian kinerja individu pegawai akan dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. Hal ini diimbangi dengan penegakan aturan disiplin dan kode etik serta pemberian sanksi. Seluruh aktivitas manajemen SDM tersebut didukung oleh sistem informasi kepegawaian.

Saat ini, Balai POM di Bogor telah memiliki kualitas yang cukup memadai, namun dari sisi kuantitas SDM Balai POM di Bogor belum mencukupi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Bogor. Sistem manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik di tingkat organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien terutama dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap peta dan kelas jabatan yang telah disusun. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang telah dibangun juga perlu dilakukan optimalisasi sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Balai POM di Bogor.

K. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai POM di Bogor telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja Balai POM di Bogor. Namun, Balai POM di Bogor masih perlu melakukan

penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas Balai POM di Bogor selaku institusi pengawasan.

L. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Balai POM di Bogor, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Balai POM di Bogor serta menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Balai POM di Bogor antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi whistle-blowing system, penanganan benturan kepentingan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Balai POM di Bogor tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya.

M. Pelayanan Publik

Menyadari bahwa pada hakekatnya instansi pemerintah merupakan ‘pelayan masyarakat’, Balai POM di Bogor senantiasa berbenah diri untuk dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Balai POM di Bogor menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk memberikan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat, antara lain layanan tatap muka langsung, layanan telepon, Whatsapp, email: bpom_bogor@pom.go.id, psblokapombogor@gmail.com Facebook Balai POM di Bogor, Twitter, Instagram @bpom.bogor.

Sarana dan prasarana pelayanan publik yang ada di Balai POM di Bogor masih dalam proses menyesuaikan dengan standar ruang layanan pengaduan menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAPORAN KINERJA

TAHUN
2024

BALAI POM DI BOGOR



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024, hal tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 05 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam hal ini, RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Secara garis besar, lingkungan strategis yang dihadapi oleh BPOM khususnya Balai POM di Bogor sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada tahun 2021- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu eksternal dan internal. Isu eksternal antara lain Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional, Perubahan Iklim, Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat, Tuntutan masyarakat, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Jejaring Kerja, Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Adapun untuk isu internal adalah Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Kabupaten Bogor melalui Renstra yang telah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan

pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Loka POM di Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai POM di Bogor telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu:

” Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

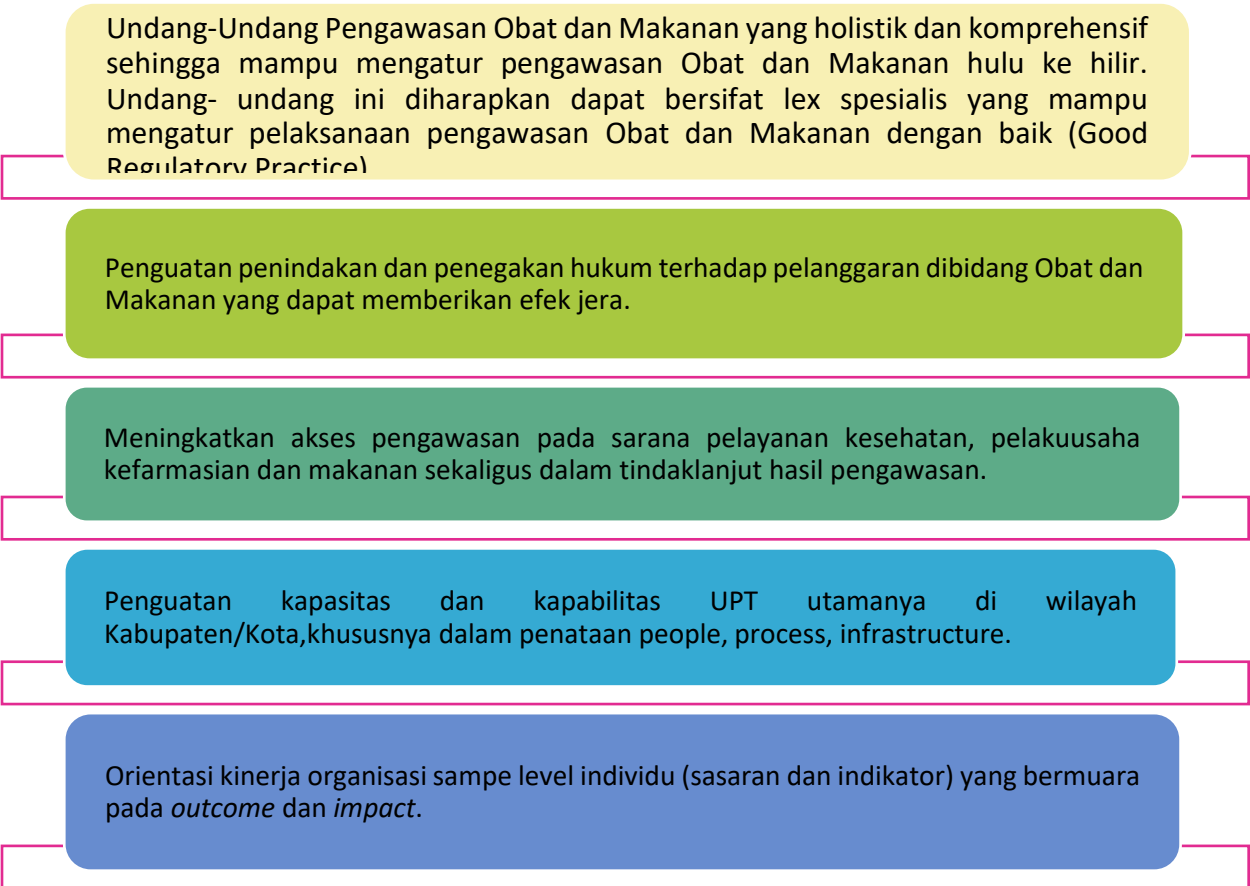
Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk itu sendiri, dengan definisi sebagai berikut:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.1.2 MISI

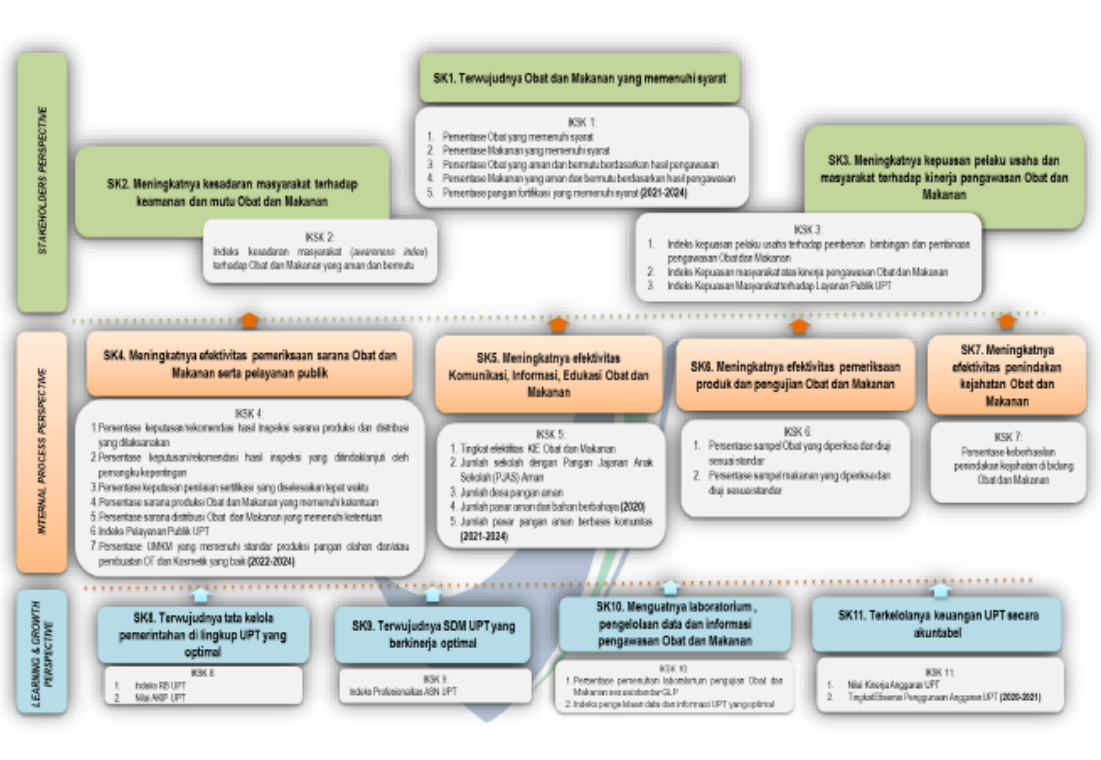
Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai POM di Bogor pada periode 2020-2024, antara lain:



Gambar 6 Misi Balai POM di Bogor

2.2 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Bogor dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Bogor. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Bogor dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana berikut:



Gambar 7 Peta Strategis Balai POM di Bogor

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Kegiatan-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Bogor.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat (Random sampling) dengan target sebesar 98,5% di tahun 2024;
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat (Random sampling) dengan target sebesar 91% di tahun 2024;
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Targeted sampling) dengan target sebesar 96% di tahun 2024;
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Targeted sampling) dengan target sebesar 92,8 % di tahun 2024.
- 5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target 85% di tahun 2024

b. Sasaran Kegiatan-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan

- 1) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu dengan target sebesar 88,67% di tahun 2024;

c. Sasaran Kegiatan-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan target sebesar 94,60% di tahun 2024;
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan target sebesar 82,63% di tahun 2024;

- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT dengan target sebesar 89,75% di tahun 2024;

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Kegiatan ke-4: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Bogor.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 100% di tahun 2024;
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024;
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 94% di tahun 2024;
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 79% di tahun 2024;
- 5) Indeks Pelayanan Publik dengan target 3,55 di tahun 2024
- 6) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 80% di tahun 2024.
- 7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik dengan target sebesar 100% di tahun 2024.
- 8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan target 95% di tahun 2024.

b. Sasaran Kegiatan ke-5: Meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

- 1) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 93,2% di tahun 2024;
- 2) Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 6 di tahun 2024
- 3) Jumlah Desa Pangan Aman dengan target 1 di tahun 2024
- 4) Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan target 1 di tahun 2024

c. Sasaran Kegiatan ke-6: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor yang optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

- 1) Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024;
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024.

d. Sasaran Kegiatan ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 82% pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran Kegiatan ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Bogor yang optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- 1) Indeks RB Balai POM di Bogor, dengan target 75% pada akhir 2024;
- 2) Nilai AKIP Balai POM di Bogor, dengan target 79,43% pada akhir 2024
- 3) Nilai Pengelolaan kearsipan dengan target 83,24% di tahun 2024

b. Sasaran Kegiatan ke-9: Terwujudnya SDM Balai POM di Bogor yang berkinerja optimal.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Bogor, dengan target sebesar 90,16% di tahun 2024.

c. Sasaran Kegiatan ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

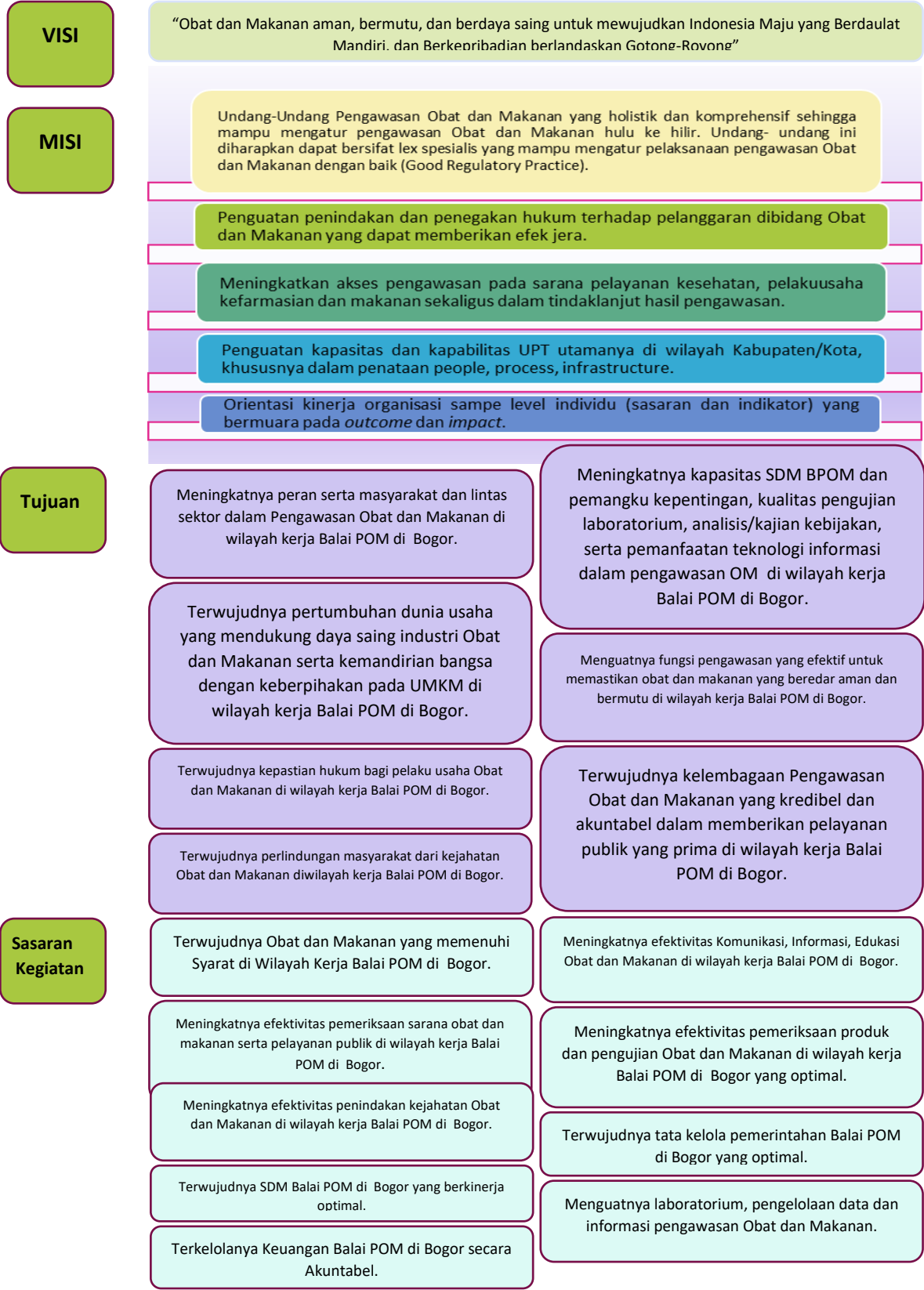
- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 40% di tahun 2024
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan target 3 pada tahun 2024.

d. Sasaran Kegiatan ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bogor secara Akuntabel.

Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah:

- (1) Nilai Kinerja Anggaran di Balai POM di Bogor dengan target 91,81% pada tahun 2024
- (2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan target sebesar 97,74% di tahun 2024
- (3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara sebesar 91% di tahun 2024
- (4) Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri dengan target sebesar 60% di tahun 2024

1. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Balai POM di Bogor periode 2021-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 8 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Balai POM di Bogor periode 2021-2024

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Rencana Strategis (Renstra) dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Bogor Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Bogor.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,8
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu dengan target sebesar	88,67
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	94,60
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	82,63
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	89,75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Bogor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Indeks Pelayanan Publik	3,55
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,2
		Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6,00
		Jumlah Desa Pangan Aman	1,00
		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Bogor yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Bogor	75
		Nilai AKIP UPT	79,43
		Nilai Pengelolaan kearsipan	83,24
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Bogor yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Bogor	90,16
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bogor secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,81
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	97,74
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	91
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Bogor menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Bogor tahun 2021-2024 dan DIPA Balai POM di Bogor Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah anggaran sebesar 10.922.419.000,- (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu), Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2024 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Bogor, sebagai berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Bogor.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,8
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu dengan target sebesar	88,67
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	94,60
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	82,63
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	89,75
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	publik di wilayah kerja Balai POM di Bogor	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100
		Indeks Pelayanan Publik	3,55
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,2
		Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6
		Jumlah Desa Pangan Aman	1
		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Bogor yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Bogor	75
		Nilai AKIP UPT	79,43
		Nilai Pengelolaan kearsipan	83,24
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Bogor yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Bogor	90,16
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	40
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	51.761.700
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	51.761.700
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	83.820.250
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	51.761.700
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	51.761.700
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	51.761.700
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	83.820.250
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	51.761.700
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	51.761.700
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.55	35.118.750
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	5	10	20	25	30	40	50	55	60	65	72	100	83.820.250
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	0	5	15	75	75	80	80	85	85	90	90	95	35.118.750
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	93.2	93.2	93.2	93.2	93.2	93.2	93.2	93.2	93.2	93.2	93.2	35.118.750
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	226.157.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	138.212.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	63.750.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	7	10	15	20	25	29	33	35	40	45	50	173.875.000
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	7	10	15	20	25	29	33	35	40	45	50	49.852.000
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan						60	60	66.67	66.67	68.13	68.13	82	289.398.000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	1.058.963.400
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.058.963.400
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.67	51.761.700
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.6	83.820.250
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.63	83.820.250
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.75	35.118.750
		Layanan Publik UPT													

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	1.058.963.400
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.43	1.058.963.400
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.24	1.058.963.400
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.16	1.058.963.400
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	15	22.5									91.81	1.058.963.400
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.74	1.058.963.400
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	1.058.963.400
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1.058.963.400
Total														12.524.251.000	

Bogor, 12 September 2024

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor


Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si.

2.6 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Rumus Pengukuran **INDIKATOR POSITIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya)

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF**
(semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

Rumus Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** yang satuannya **BUKAN DALAM %**
(semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya)

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) seperti dibawah ini.

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS\ 2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS\ 3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS\ 4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS\ 5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Gambar 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

LAPORAN KINERJA

TAHUN
2024

BALAI POM DI BOGOR



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2024 dan Penetapan Kinerja tahun 2024 Balai POM di Bogor memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian kesebelas sasaran kegiatan Balai POM di Bogor pada tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis	KATEGORI	
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Bogor	92,51	Cukup	
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Bogor	105,03	Sangat Baik	
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	100,03	Sangat Baik	
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	100	Baik	
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	120	Sangat Baik	
6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.	120	Sangat Baik	
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan.	98,56	Cukup	
8. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan.	103,27	Sangat Baik	
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	104,44	Sangat Baik	
10. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	96,96	Cukup	
11. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	103,89	Sangat Baik	

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing

sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN PENYESUAIAN	KATEGORI
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,5	95,18	96,63	96,63	Cukup
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	91,84	100,92	100,92	Sangat Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	90,77	94,55	94,55	Cukup
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,8	65,38	70,46	70,46	Cukup
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	85	100	100	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			92,51	92,51	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	Baik
		7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	87,64	116,85	116,85	Sangat Baik
		8. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	106,38	Sangat Baik
		9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79,52	100,66	100,66	Sangat Baik
		10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	81,46	101,83	101,83	Sangat Baik
		11. Indeks Pelayanan Publik.	3,55	3,89	109,58	109,58	Sangat Baik
		12. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100	100	Baik
		13. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten	95	99,67	104,92	104,92	Sangat Baik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN PENYESUAIAN	KATEGORI
		/ Kota.					
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			105,03	105,03	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,2	93,29	100,10	100,10	Sangat Baik
		15. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6	6	100	100	Baik
		16. Jumlah Desa Pangan Aman.	1	1	100	100	Baik
		17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	1	1	100	100	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			100,03	100,03	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	18. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	100	Baik
		19. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	100	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			100	100	Baik
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	20. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	100	121,95	120	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			120	120	Sangat Baik
6	Memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.	21. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	40	54,04	135,10	120	Sangat Baik
		22. Indeks pengelolaan data dan informasi	3	3,6	120	120	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			120	120	Sangat Baik
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan.	23. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu.	88,67	87,39	98,56	98,56	Cukup
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			98,56	98,56	Cukup

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN PENYESUAIAN	KATEGORI
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	24. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	94,60	99,32	104,99	104,99	Sangat Baik
		25. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	82,63	84,91	102,76	102,76	Sangat Baik
		26. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	89,75	91,60	102,06	102,06	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			103,27	103,27	Sangat Baik
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	27. Indeks RB UPT	75	76	101,33	101,33	Sangat Baik
		28. Nilai AKIP UPT	79,43	79,02	99,48	99,48	Cukup
		29. Nilai Pengelolaan Kearsipan	83,24	93,66	112,52	112,52	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			104,44	104,44	Sangat Baik
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	30. Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,16	87,42	96,96	96,96	Cukup
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			96,96	96,96	Cukup
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31. Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8	84,83	92,39	92,39	Cukup
		32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	97,74	100	102,31	102,31	Sangat Baik
		33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.	91	91,76	100,84	100,84	Sangat Baik
		34. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.	60	83,30	138,83	120	Sangat Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran Strategis			103,89	103,89	Sangat Baik

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Bogor, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN KE-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kelima indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **105,23%** dengan kategori **Istimewa**. Hasil Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-1 TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,50	95,18	96,63	Cukup	
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	91,84	100,92	Sangat Baik	
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	90,77	94,55	Cukup	
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,80	65,38	70,46	Cukup	
	5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	85,00	100	Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

3.1.1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kedaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel

tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 7 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,50	95,18	96,63	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 98,50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 95,18% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 96,63% dan memperoleh kriteria **Cukup**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 8 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	98,50	95,18	96,63	Cukup	
2023	98	97.85	99,85	Cukup	
2022	97,50	80.84	82,91	Cukup	
2021	97	79,72	82,18	Cukup	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “**persentase obat yang memenuhi syarat**” adalah sebesar 98,50%. Indikator kegiatan “**persentase obat yang memenuhi syarat**” dari tahun 2021 – 2023 selalu mengalami kenaikan target sebesar 0,5% setiap tahunnya. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 95,18%, realisasi target indikator kegiatan ini selalu mempunyai tren yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 98,50%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target

tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 95,18% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 96,63% dan masuk kedalam kategori **Akan Tercapai**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 10 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT"

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Tangerang, Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Sofifi. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase obat yang memenuhi syarat di Balai POM di Bogor sebesar 98,50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 98,15% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 96,63% dan memperoleh kriteria **Cukup**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase obat yang memenuhi syarat di Balai POM di Tangerang sebesar 92,00%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 85,02% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 92,41% dan memperoleh kriteria Cukup. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase obat yang memenuhi syarat di Balai POM di Sofifi sebesar 98,24%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 98,15% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 103,19% dan memperoleh kriteria Sangat Baik. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase obat yang memenuhi syarat di Balai POM di Manokwari sebesar 96,00%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 92,78% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 96,65% dan memperoleh kriteria Cukup. Dapat dilihat bahwa Balai POM di Bogor memiliki target paling tinggi namun tidak mencapai target.

Tabel 9 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	98,50	95,18	96,63	Cukup	
Balai POM di Sofifi	95,2	98,24	103,19	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwari	96	92,78	96,65	Cukup	
Balai POM di Tangerang	92,00	85,02	92,41	Cukup	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Capaian indikator masih dalam kriteria cukup, secara detail perbandingan jumlah capaian sampel obat yang telah di sampling selama tahun 2024 dengan metode acak terhadap target serta hasil ujinya sebagai berikut:

1. Obat sejumlah 106 dari 104 sampel (100%) dengan kesimpulan akhir 1 sampel tidak memenuhi syarat dan 105 sampel Memenuhi Syarat (99%). Sampel TMS merupakan obat kelas terapi lain-lain berupa cangkang kapsul TMS DNA porcine.
2. Kosmetika sejumlah 136 dari 133 sampel (102%) dengan kesimpulan akhir 1 sampel tidak memenuhi syarat dan 135 sampel Memenuhi Syarat (99%). 1 sampel krim kaki TMSALT.
3. Obat Tradisional sejumlah 67 dari 66 sampel (101%) dengan kesimpulan akhir 55 (82%) sampel MS dan 12 sampel TMS (18%) dengan
 - 1 sampel kapsul klaim membantu memelihara kesehatan tubuh TMS AKK dan angka Enterobacteriaceae.
 - 1 sampel pil klaim membantu meringankan tekanan darah tinggi TMS ALT.
 - 1 sampel serbuk klaim membantu meringankan batuk TMS AKK dan angka Enterobacteriaceae.
 - 1 sampel kapsul klaim membantu menurunkan berat badan TMS angka Enterobacteriaceae.
 - 1 sampel serbuk klaim membantu menurunkan berat badan TMS angka Enterobacteriaceae.
 - 1 sampel kapsul klaim membantu meringankan gejala kencing manis TMS angka Enterobacteriaceae.
 - 1 sampel kapsul klaim membantu meringankan gejala kencing manis TMS ALT dan AKK.
 - 1 sampel kapsul klaim membantu memelihara kesehatan pencernaan TMS AKK.
 - 1 sampel klaim lainnya TMS ALT

- 1 sampel kapsul klaim membantu memelihara kesehatan tubuh TMS ALT dan angka Enterobacteriaceae.
 - 1 sampel pil klaim sehat wanita TMK penandaan.
 - 1 sampel kapsul klaim membantu mengurangi jerawat TMS ALT.
5. Suplemen Kesehatan sejumlah 18 dari 17 sampel (105 %) dengan kesimpulan akhir 16 sampel Memenuhi Syarat (88%) dan 2 sampel Tidak Memenuhi Syarat (12%). 2 sampel Cairan Obat Dalam memelihara kesehatan TMS PK Kofein.
6. Kuasi sejumlah 5 dari 5 sampel (100%) dengan kesimpulan akhir seluruh sampel Memenuhi Syarat (100%).

Obat yang memenuhi syarat merupakan sampling yang dilakukan dengan metode acak sangat dipengaruhi oleh peredaran produk di wilayah kerja oleh karena itu faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya capaian antara lain kurangnya kepatuhan pelaku usaha obat tradisional dalam memproduksi produk sesuai GMP serta pengawasan terhadap produk di sarana distribusi kosmetik maupun obat tradisional masih belum optimal.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Walaupun capaian indikator masih dalam kriteria cukup namun terlihat progres kenaikan capaian setiap tahunnya, hal tersebut karena Balai POM Bogor melakukan:

- Pembinaan pelaku usaha UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik di wilayah kerja Balai POM di Bogor pada 16 Mei 2024 dengan mendorong komitmen pelaku usaha menerapkan CPOTB dan CPKB sehingga produk yang diproduksi memenuhi syarat dari segi keamanan mutu dan klaim penandaan.
- Intervensi pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kegiatan tersebut dilakukan secara rutin sepanjang tahun 2024 yang meliputi pengawasan produk dan penandaan.
- Pengawasan sarana distribusi terhadap sarana obat, obat tradisional, suplemen kesehatan serta diiringi dengan pembersihan produk-produk yang termasuk dalam public warning sehingga harapannya saat dilakukan sampling secara acak produk tersebut sudah tidak ada dan tidak ikut tersampling, kegiatan tersebut dilakukan secara rutin sepanjang tahun 2024.
- Koordinasi dengan Badan POM dan Balai POM lainnya dalam menindaklanjuti produk tidak memenuhi ketentuan yang diproduksi diluar wilayah kerja Balai POM di Bogor.
- Pelaksanaan kegiatan penindakan juga dapat menurunkan beredar nya produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan dapat memberikan efek jera sesuai ketentuan perundang-undangan, kegiatan penindakan dapat dilihat lebih detail pada IKU terkait.

- Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan. Monev dilakukan secara berkala baik internal maupun eksternal bersama dengan ke deputian terkait.
-

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan informasi laporan kinerja 2024, bila indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dibandingkan dengan UPT lain sejenis, target Balai POM Bogor merupakan target tertinggi dengan capaian yang rendah, oleh karena itu laporan kinerja berikut bisa menjadi pertimbangan untuk penentuan target di tahun 2025.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 10 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pengawasan distribusi terhadap sarana obat tradisional diiringi dengan pembersihan produk-produk yang termasuk dalam public warning sehingga harapannya saat dilakukan sampling secara acak produk tersebut sudah tidak ada dan tidak ikut tersampling	Telah dilakukan intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat tradisional termasuk depo jamu pada bulan Agustus 2024	-	-	Capaian pada tahun 2023 yaitu 97.85 %	Peningkatan Capaian pada tahun 2024 yaitu 98,15 %

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 11 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja "Persentase Obat yang Memenuhi Syarat"

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase obat yang memenuhi syarat	59.989.250	57.091.730	95,17	99,85	0,05	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 adalah sebesar 0,05 (100%) dengan kriteria efisien

3.1.1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kedaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 12 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	91,84	100,92	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 91%. Persentase realisasi Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sebesar 91,84% dengan persentase capaian target indikator sasaran sebesar 100,92% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 13 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang memenuhi syarat” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	91	91,84	100,92	Sangat Baik	
2023	89	95,56	107,37	Sangat Baik	

2022	87	94,44	108,55	Sangat Baik	
2021	85	66,67	78,43	Cukup	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “**Persentase Makanan yang memenuhi syarat**” adalah sebesar 91%. Indikator kegiatan “**Persentase Makanan yang memenuhi syarat**” dari tahun 2021 – 2024 selalu mengalami kenaikan target sebesar 2% setiap tahunnya. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 91,84%.

C. **PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024**

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 91%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2023 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 95,56% sudah melampaui target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 105,01% dan masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui**. Masih diperlukan upaya guna mempertahankan pencapaian target Renstra di tahun 2024. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 11 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT"

D. **PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS**

Realisasi indikator kegiatan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Tangerang, Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Sofifi. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase makanan yang memenuhi syarat di Balai POM di Bogor sebesar

89%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 95,56% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 107,37% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase makanan yang memenuhi syarat di Balai POM di Tangerang sebesar 92,50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 88,06% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 95,20% dan memperoleh kriteria Cukup. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase makanan yang memenuhi syarat di Balai POM di Manokwari sebesar 89,5%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 92,41% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 103,25% dan memperoleh kriteria Sangat Baik. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase makanan yang memenuhi syarat di Balai POM di Sofifi sebesar 93,5%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 106,95% dan memperoleh kriteria Sangat Baik. **Dimana capaian realisasi terbaik yaitu Balai Sofifi.**

Tabel 14 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGE T	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	91	91,84	100,92	Sangat baik	
Balai POM di Tangerang	92,50	88,06	95,20	Cukup	
Balai POM di Monokwari	89,5	92,41	103,25	Sangat baik	
Balai POM di Sofifi	93,5	100	106,95	Sangat baik	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Capaian indikator telah berada pada kategori baik, secara detail perbandingan jumlah capaian sampel makanan yang telah di sampling selama tahun 2024 dengan metode acak terhadap target serta hasil ujinya yaitu makanan sejumlah 98 dari 96 sampel (102%) dengan kesimpulan akhir Memenuhi Syarat sejumlah 90 sampel (92%) dan 8 sampel Tidak Memenuhi Syarat (8%) dengan rincian :

- 1 sampel kategori pangan teh kering dalam kemasan TMS pengujian mikro yaitu Angka Lempeng Total
- 1 sampel kategori pangan ikan olahan TMK mayor
- 1 sampel kategori pangan sambal/saos tomat/saos cabe TMK mayor
- 1 sampel kategori pangan madu TMS Penentuan Kadar Hidroksimetil Furfural
- 1 sampel kategori pangan bihun sohun TMS Penentuan Kadar cemaran Timbal

- 1 sampel kategori pangan madu TMS Penentuan Kadar Hidroksimetil Furfural dan TMS enzim diastase
- 1 sampel kategori pangan pencuci mulut berbahan susu TMS Enterobacteriaceae
- 1 sampel kategori tepung bumbu TMS Bacillus Cereus

Makanan yang memenuhi syarat merupakan sampling yang dilakukan dengan metode acak sangat dipengaruhi oleh peredaran produk di wilayah kerja oleh karena itu faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya capaian antara lain kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi produk sesuai GMP serta pengawasan terhadap produk di sarana produksi maupun distribusi pangan masih belum optimal.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Capaian indikator kriteria Sangat Baik juga terlihat dari adanya progres kenaikan capaian setiap tahunnya, hal tersebut karena Balai POM Bogor melakukan:

1. Pembinaan pelaku usaha UMKM pangan pada 16 Mei 2024 dengan mendorong komitmen pelaku usaha menerapkan CPPOB dan memproduksi pangan yang aman bermutu .
2. Pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sehingga harapannya saat dilakukan sampling secara acak produk tersebut sudah tidak ada dan tidak ikut tersampling, kegiatan tersebut dilakukan secara rutin sepanjang tahun 2024.
3. Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan selama bulan puasa serta menjelang natal dan tahun baru 2024.
4. Koordinasi dengan Badan POM dan Balai POM lainnya dalam menindaklanjuti produk tidak memenuhi ketentuan yang diproduksi diluar wilayah kerja Balai POM di Bogor.
5. Pelaksanaan kegiatan penindakan juga dapat menurunkan beredarnya produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan dapat memberikan efek jera sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan informasi laporan kinerja 2024, bila indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dibandingkan dengan tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan capaian oleh karena itu laporan kinerja berikut bisa menjadi pertimbangan untuk penentuan target di tahun 2025.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 15 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 16 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat"

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	59.989.250	57.091.730	95,17	107,37	0,13	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 adalah sebesar 0,13 (100%) dengan kriteria efisien

3.1.1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kedaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 15

Tabel 17 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	90,77	94,55	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 96%. Persentase realisasi terhadap target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 90,77% dan persentase capaian sasaran sebesar 94,55% dengan kriteria **Cukup**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

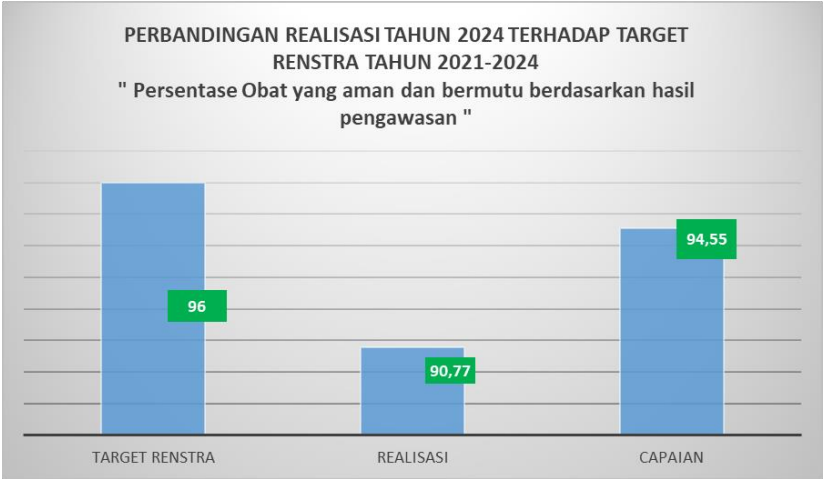
Tabel 18 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	96	90,77	94,55	Cukup	
2023	95,5	96,85	101,41	Sangat Baik	
2022	95	76,56	80,59	Cukup	
2021	94	71,43	75,98	Cukup	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “**Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**” adalah sebesar 96%. Indikator kegiatan “**Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**” dari tahun 2021 – 2024 selalu mengalami kenaikan target sebesar 5%. Persentase realisasi indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 90,77%.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 96%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 90,77% sudah melampaui target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 94,55% dan masuk kedalam kategori **Akan Tercapai**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 12 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

" Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan "

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Tangerang, Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Sofifi. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Balai POM di Bogor sebesar 86,00%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 85,57% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 99,50% dan memperoleh kriteria Cukup. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Balai POM di Manokwari sebesar 95%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 97,01% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 102,12% dan memperoleh kriteria Sangat Baik. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Balai POM di Sofifi sebesar 96,5%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 98,17% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 101,73% dan memperoleh kriteria sangat baik.

Tabel 19 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR " PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	92,80	65,38	70,45	Cukup	
Balai POM di Tangerang	68,50	69,77	101,85	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwarir	90,9	76,74	84,42	Cukup	
Balai POM di Sofifi	90,46	100	100,55	Sangat Baik	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Capaian indikator masih dalam kriteria Sangat Baik, secara detail perbandingan jumlah capaian sampel obat yang telah di sampling selama tahun 2024 dengan metode targeted serta hasil ujinya sebagai berikut:

1. Obat sejumlah 25 dari 25 sampel (100%) dengan kesimpulan akhir seluruhnya Memenuhi Syarat (100%).
2. Kosmetika sejumlah 57 dari 57 sampel (110%) dengan kesimpulan akhir 53 memenuhi syarat (93%) dan 4 sampel (7%) tidak memenuhi syarat dengan rincian 1 sampo bayi TMK penandaan, 1 serum TMK penandaan, 1 sampel sabun mandi TMS ALT AKK dan 1 sampel TMS Penentuan Kadar Metanol terhadap Etanol dan Isopropil Alkohol.
3. Obat Tradisional sejumlah 33 dari 33 sampel (100%) dengan kesimpulan akhir 25 sampel Memenuhi Syarat (75%) dan 8 sampel Tidak Memenuhi Syarat (25%).
4. Suplemen Kesehatan sejumlah 12 dari 8 sampel (150 %) dengan kesimpulan akhir kesimpulan akhir seluruhnya Memenuhi Syarat (100%).
5. Kuasi sejumlah 3 dari 2 sampel (150%) dengan kesimpulan akhir kesimpulan akhir seluruhnya Memenuhi Syarat (100%).

Obat yang aman dan bermutu merupakan sampling yang dilakukan dengan metode targeted secara umum metode targeted terbagi menjadi beberapa kategori namun sampling karena kasus pemeriksaan menjadi penyumbang sampel TMS.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Walaupun capaian indikator masih dalam kriteria cukup namun terlihat progres kenaikan capaian setiap tahunnya, hal tersebut karena Balai POM Bogor melakukan:

- Pembinaan pelaku usaha UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik di wilayah kerja Balai POM di Bogor pada 16 Mei 2024 dengan mendorong komitmen pelaku usaha menerapkan CPOTB dan CPKB sehingga produk yang diproduksi memenuhi syarat dari segi keamanan mutu dan klaim penandaan.
- Intervensi pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kegiatan tersebut dilakukan secara rutin sepanjang tahun 2024 yang meliputi pengawasan produk dan penandaan.
- Pengawasan sarana distribusi terhadap sarana obat, obat tradisional, suplemen kesehatan serta diiringi dengan pembersihan produk-produk yang termasuk dalam public warning sehingga harapannya saat dilakukan sampling secara acak produk

tersebut sudah tidak ada dan tidak ikut tersampling, kegiatan tersebut dilakukan secara rutin sepanjang tahun 2024.

- Koordinasi dengan Badan POM dan Balai POM lainnya dalam menindaklanjuti produk tidak memenuhi ketentuan yang diproduksi diluar wilayah kerja Balai POM di Bogor.
- Pelaksanaan kegiatan penindakan juga dapat menurunkan beredarnya produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan dengan cara memberikan sanksi yang tegas dan dapat memberikan efek jera sesuai ketentuan perundang-undangan, kegiatan penindakan dapat dilihat lebih detail pada IKU terkait.
- Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan. Monev dilakukan secara berkala baik internal maupun eksternal bersama dengan kedeputian terkait.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan informasi laporan kinerja 2024, bila indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan capaian, oleh karena itu laporan kinerja berikut bisa menjadi bahan evaluasi dan sebagai pertimbangan untuk penentuan target di tahun 2025.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 20 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Intensifikasi pengawasan label kosmetik TMK saat melakukan pengawasan distribusi sehingga saat dilakukan sampling secara acak tmk tersebut sudah tidak ada dan tidak ikut ter sampling serta peningkatan pengawasan produksi	Telah dilakukan intensifikasi pengawasan kosmetik berupa pembersihan pasar di 3 kabupaten kota wilayah kerja Balai POM Bogor pada bulan November 2024	Pelaksanaan sampling dan uji obat akan dilakukan berdasarkan analisis risiko dan pedoman sampling. Selain itu, dilakukan intensifikasi pengawasan dengan dilakukan pada awal tahun dengan jangka waktu lebih lama dan titik yang lebih banyak dan luas.	Hingga Desember 2025.	Capaian 2023 yaitu 96,85 %	Capaian 2024 yaitu 94,55 %. Walau terdapat penurunan telah diminimalisir dengan rencana aksi yang telah dilakukan pada akhir tahun

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 21 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	59.989.250	57.091.730	95,17	101,41	0,07	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" pada tahun 2024 adalah sebesar 0,07 (100%) dengan kriteria efisien

3.1.1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 22 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,80	65,38	70,45	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 92,80%. Persentase realisasi dari target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 65,38% dengan persentase capaian sebesar 70,45% dengan kriteria Cukup.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

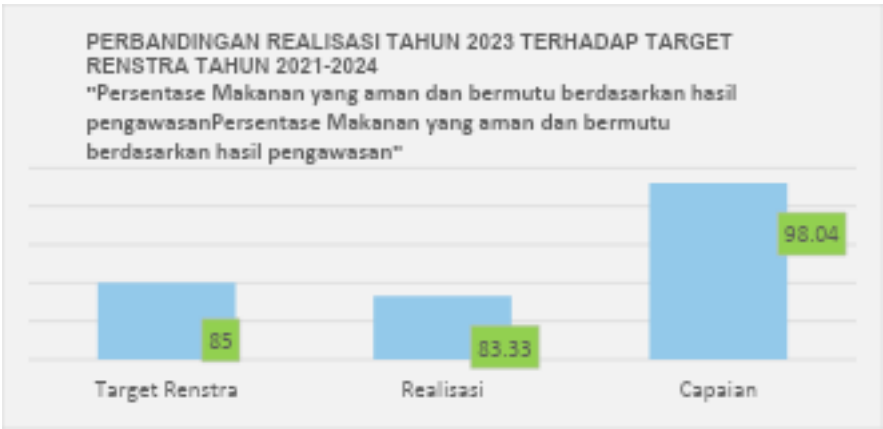
Tabel 23 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	92,80	65,38	70,45	Cukup	
2023	83	83,33	100,40	Sangat Baik	
2022	82	82,35	100,43	Sangat Baik	
2021	80	71,88	89,85	Cukup	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” adalah sebesar 92,80%. Indikator kegiatan “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dari tahun 2021 – 2024 selalu mengalami kenaikan target di tahun 2021 target indikator sebesar 80% sedangkan tahun 2022 target indikator sebesar 82%. Persentase realisasi indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 65,38%.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 65,38% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 76,91% dan masuk kedalam kategori **Akan Tercapai..** Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 13 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Tangerang, Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Sofifi. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Balai POM di Bogor sebesar 92,80%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 65,38% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 70,45% dan memperoleh kriteria **Cukup**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Balai POM di Tangerang sebesar 68,50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 69,77% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 101,85% dan memperoleh kriteria Sangat Baik. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Balai POM di Manokwari sebesar 90,9%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 76,74% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 84,42% dan memperoleh kriteria Cukup. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Balai POM di Sofifi sebesar 90,46%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 110,55% dan memperoleh kriteria Sangat Baik.

Tabel 24 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR " Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	92,50	65,38	70,45	Cukup	
Balai POM di Tangerang	68,50	69,77	101,85	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwari	90,9	76,74	84,42	Cukup	
Balai POM di Sofifi	90,46	100	110,55	Sangat Baik	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Capaian indikator telah berada pada kategori sangat baik, secara detail perbandingan jumlah capaian sampel makanan yang telah di sampling selama tahun 2024 dengan metode targeted

serta hasil ujinya yaitu makanan sejumlah 26 dari 24 sampel (108%) dengan kesimpulan akhir Memenuhi Syarat sejumlah 17 sampel (65%) dan 9 sampel Tidak Memenuhi Syarat (35%) yaitu

- 1 sampel kategori pangan es mambo (PJAS) TMS PK Siklalat
- 1 sampel kategori pangan pentol/batagor/cilok (PJAS) TMS MPN E. coliform
- 1 sampel kategori pangan minuman berwarna yang mengandung susu (PJAS) TMS PK Siklalat
- 1 sampel kategori pangan tahu (efektifitas pemahit dalam formalin) TMS MPN E. Coliform
- 1 sampel kategori fermentasi atau susu berkultur (UMKM) TMS total padatan susu tanpa lemak
- 2 sampel kategori pangan 15 makanan ringan simulasi (kasus) TMS ALT, TMS Bacillus cereus
- 1 sampel kategori pangan 15 makanan ringan simulasi (kasus) TMS ALT
- 1 sampel kategori pangan 15 makanan ringan simulasi (kasus) TMS ALT, TMS Bacillus cereus dan TMS Kadar air

Masih ditemukannya sampel pangan yang TMS terutama di pedagang kreatif lapangan (PKL) dan pedagang pasar menunjukkan belum memahami pentingnya keamanan pangan oleh karena itu KIE di sekolah dan pasar akan terus ditingkatkan di wilayah kerja Balai POM. Selain itu munculnya kasus mengenai makanan ringan simulasi di akhir tahun juga menjadi penyebab penurunan capaian.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Oleh karena itu perlunya inovasi dan peningkatan kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaborasi dengan stakeholder, pemberdayaan masyarakat antara lain meningkatkan literasi, mengedukasi komunitas di sekolah, pasar dan desa/kelurahan, revitalisasi laboratorium keliling ke sekolah bersama dengan Dinas Kesehatan dan SAKA POM dengan melakukan pengujian rapid test terhadap PJAS sehingga saat dilakukan sampling rutin sudah tidak ada lagi ditemukan PJAS mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi syarat pengujian kimia maupun mikrobiologi.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan informasi laporan kinerja 2024, bila indikator kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dibandingkan dengan UPT lain sejenis, target Balai POM Bogor merupakan target tertinggi namun capaian terendah, oleh karena itu laporan kinerja berikut bisa menjadi pertimbangan untuk penentuan target di tahun 2025

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 25 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan kegiatan bersama sekolah dalam rangka edukasi 5 kunci keamanan pangan	Telah dilakukan.	Meningkatkan kegiatan bersama sekolah dalam rangka edukasi 5 kunci keamanan pangan disertai kolaborasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal termasuk lintas sektor secara lebih komprehensif dan berkala.	Sampai Desember 2025.		

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 26 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja "Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	59.989.250	57.091.730	95,17	100,40	0,05	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 adalah sebesar 0,05 (100%) dengan kriteria efisien.

3.1.1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang undangan Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium Pengambilan

keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 27 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat”
TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85	85	100	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 85%. Persentase realisasi dari target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 85% dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 28 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat”
TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2023	74	86,67	117,12	Sangat Baik	
2024	85	85	100	Baik	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” adalah sebesar 85%. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” adalah sebesar 74%. terdapat peningkatan target antara tahun 2023 dengan 2024 dan terjadi penurunan realisasi dari 86,67% di 2023 menjadi 85% di tahun 2024. Target mengalami peningkatan namun capaian menurun walaupun masih dalam kategori baik.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Tidak ada Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan untuk indikator “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat”.

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Tangerang . Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase pangan Fortifikasi

yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan di Balai POM di Bogor sebesar 85%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 85% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria Baik. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Balai POM di Tanggerang sebesar 82%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 121,95% dan memperoleh kriteria Tidak dapat disimpulkan. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan ersentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Balai POM di Monokwari sebesar 97%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 90,32% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 93,11% dan memperoleh kriteria Cukup. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan ersentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Balai POM di Sofifi sebesar 90%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 111,11% dan memperoleh kriteria Sangat Baik.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Capaian indikator telah berada pada kategori Sangat Baik, secara detail perbandingan jumlah capaian sampel makanan yang telah di sampling selama tahun 2024 terhadap target serta hasil ujinya yaitu makanan sejumlah 20 dari 20 sampel (100%) dengan kesimpulan akhir Memenuhi Syarat sejumlah 17 sampel (85%) dan 3 sampel Tidak Memenuhi Syarat (15%) yaitu sampel minyak goreng sawit dengan vitamin A yang tidak terdeteksi.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Capaian indikator kriteria Baik Balai POM Bogor ditunjang dengan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap capaian kinerja agar dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan serta ditunjang dengan kegiatan koordinasi dengan stakeholder terkait mengenai program fortifikasi.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan informasi laporan kinerja 2024, capaian realisasi terhadap target Balai POM Bogor telah 100% namun masih ditemukan produk TMS, oleh karena itu laporan kinerja berikut bisa menjadi pertimbangan untuk penentuan target di tahun 2025.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 29 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 30 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	3.856.000	1.811.600	46,98	117,12	1,49	80% (Tidak Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 adalah sebesar 1,49 (80%) dengan kriteria tidak efisien.

SASARAN KEGIATAN KE-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam) indikator. Berdasarkan perhitungan keenam indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **107,22%** dengan kriteria pencapaian **Istimewa**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-2 tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 31 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-2 TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
	2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	87,64	116,85	Sangat Baik	
	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	Sangat Baik	
	4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79,52	100,66	Sangat Baik	
	5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	81,46	101,83	Sangat Baik	
	6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100	Baik	

3.1.2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan atau Rekomendasi Hasil Inspeksi adalah Keputusan atau rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi atau distribusi. Adapun keputusan yang dikeluarkan dapat berupa pembinaan teknis, peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, rekomendasi pencabutan izin, rekomendasi pencabutan Nomor Izin Edar atau tindak lanjut kasus dari hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Persentase keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh (1) UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT, (2) persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT, (3) persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT, dan (4) persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang

ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT s.d triwulan IV. Pemangku kepentingan pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Balai POM di Bogor diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

- A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pusat atau UPT lain} / \text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Pada tahun 2024, Balai POM di Bogor telah menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 239 keputusan/rekomendasi dari 239 keputusan/ rekomendasi yang diterima sehingga mendapat kriteria indikator kinerja **“Baik”**.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 32 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator sasaran Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 100 %. Persentase realisasi keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 adalah 100%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100 % dengan kriteria “Baik”.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 33 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	100	100	100	Baik	
2023	99	99,42	100,40	Sangat Baik	
2022	97	84.51	87,12	Cukup	
2021	96	88,13	91,80	Cukup	

Dari tahun 2021-2024 terdapat peningkatan target terhadap indikator kegiatan “**Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**”. Terkait realisasi pada 2024 terdapat peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2023 yakni dari 99.42% (2023) menjadi 100% (2024).

Terdapat peningkatan capaian sejak 2021 - 2024 dimana pada tahun 2021 – 2022 realisasi dan capaian tidak memenuhi target akan tetapi pada 2023-2024 realisasi dan capaian memenuhi target. Hal tersebut menandakan Balai POM di Bogor telah berhasil meningkatkan capaian dan realisasi sejak 2021 sampai dengan 2024 untuk indikator kegiatan **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 100% dimana telah mencapai target renstra 2024 dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 15 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan "

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM Tangerang, Balai POM Sofifi dan Balai POM Manokwari. Berdasarkan tabel di bawah, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor, Balai POM di Manokwari, dan Balai POM di Sofifi serta yang terendah adalah Balai POM di Tangerang.

Tabel 34 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	100	100	100	Baik	
Balai POM di Tangerang	93	93,16	100,17	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwari	98.3	100	101,73	Sangat Bak	
Balai POM di Sofifi	99.3	100	100,70	Sangat Baik	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi dan produksi obat dan makanan dalam mengirimkan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan. Kedepannya diharapkan dapat ditingkatkan pemantauan terhadap pelaku usaha sehingga kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi dan produksi obat dan makanan dalam mengirimkan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan juga meningkat. Disamping itu keberhasilan indikator ini juga didukung dengan respon aktif Balai POM di Bogor terhadap rekomendasi Badan POM Pusat dalam menindaklanjuti pengawasan Obat dan Makanan seperti tindak lanjut kasus, pengaduan konsumen, dan tindak lanjut hasil sampling produk yang beredar.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya monitoring terhadap surat tindak lanjut pemeriksaan kepada pelaku usaha dan pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pelaku usaha. Program tersebut berjalan efektif dan dapat dilanjutkan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja selanjutnya. Disamping itu adanya komunikasi intensif kepada Badan POM Pusat dalam berkoordinasi terkait rekomendasi Badan POM Pusat untuk menindaklanjuti pengawasan Obat dan Makanan.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan informasi laporan kinerja 2024, target renstra di tahun 2024 telah tercapai. Laporan kinerja pada bagian indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat digunakan sebagai landasan terhadap perencanaan penetapan target persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Disamping itu, laporan kinerja

2024 juga dapat digunakan sebagai dasar review terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

**H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA
(INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)**

Tabel 35 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Diperlukan strategi untuk mempertahankan kinerja dalam menyerahkan rekomendasi/hasil inspeksi tepat waktu dengan monitoring tindak lanjut yang diberikan ke pelaku usaha	N/A	-	Akhir triwulan IV 2025	Petugas tidak/ belum disiplin membuat surat tindak lanjut	Adanya monitoring membuat petugas menjadi disiplin dalam membuat surat tindak lanjut

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 36 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	3.856.000	1.811.600	46,98	117,12	0,06	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebesar 0,06 (100%) dengan kriteria efisien.

3.1.2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d triwulan IV. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Bogor kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi atau distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil

inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan atau Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan teknis, peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, rekomendasi pencabutan izin, rekomendasi pencabutan Nomor Izin Edar atau tindak lanjut kasus dari hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

- $A = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$
- $B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Pada tahun 2024 Balai POM di Bogor telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 97 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 117 sarana/pelaku usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 116,85% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	87,64	116,85	Sangat Baik	

Tabel 37 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” TAHUN 2024

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target sasaran yang ditetapkan pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 75%. Persentase realisasi keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah 87,64%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 116,85 % dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 38 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

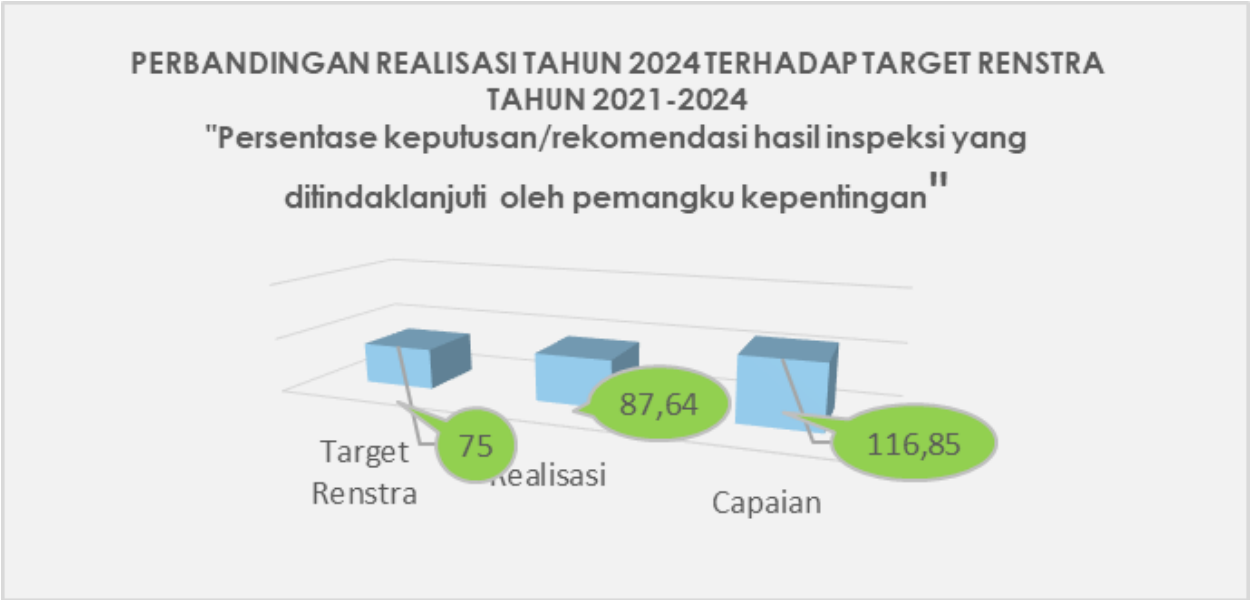
TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	75	87,64	116,85	Sangat Baik	
2023	70	77,57	110,81	Sangat Baik	
2022	65	65.93	101,43	Sangat Baik	
2021	60	63,80	106,33	Sangat Baik	

Dari tahun 2021-2024 terdapat peningkatan target terhadap indikator kegiatan “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan”. Terkait realisasi pada 2024 terdapat peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2023 yakni dari 77,57% (2023) menjadi 87,64% (2024). Hal tersebut menandakan Balai POM di Bogor telah berhasil meningkatkan capaian dan realisasi sejak 2021 sampai dengan 2024 untuk indikator

kegiatan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

C. **PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024**

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 75%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 87,64 % sudah melampaui target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 116,85 % dan masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 16 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan"

D. **PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS**

Realisasi indikator kegiatan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM Tangerang, Balai POM Sofifi dan Balai POM Manokwari. Berdasarkan tabel di bawah, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan Tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Sofifi yang kemudian disusul oleh Balai POM di Bogor, Balai POM di Tangerang dan Balai POM di Manokwari.

Tabel 39 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	75	87.64	116,85	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	85	85,54	100,64	Baik	
Balai POM di Manokwari	61	85.64	140,39/120	Sangat Baik	
Balai POM di Sofifi	88,7	97,92	110,39	Sangat baik	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Keberhasilan pencapaian indikator ini salah satunya didukung dengan meningkatnya koordinasi yang dilakukan oleh Balai POM di Bogor kepada pemangku kepentingan/ lintas sektor sehingga ada tindak lanjut dari keputusan/rekomendasi inspeksi yang dikirim oleh Balai POM di Bogor. Disamping itu juga didukung dengan adanya pendampingan pembuatan CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) kepada pelaku usaha melalui konsultasi langsung di kantor maupun via daring (zoom). Pendampingan CAPA juga dilakukan di sarana saat melakukan pemeriksaan dengan tetap memperhatikan tindakan pencegahan yang harus dilakukan supaya tidak terjadi temuan berulang.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah melakukan monitoring terhadap *feedback* yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Bogor, melakukan desk CAPA kepada pelaku usaha konsultasi langsung di kantor maupun via daring (zoom), meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM di Bogor ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta melakukan evaluasi dan monitoring *feedback* dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Disamping itu Balai POM di Bogor juga melakukan pengiriman surat rekomendasi (hardcopy) kepada Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten terkait untuk segera melakukan pembinaan sarana.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan informasi laporan kinerja 2024, target renstra di tahun 2024 telah tercapai. Laporan kinerja pada bagian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dapat digunakan untuk melihat tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perbaikan terhadap hasil inspeksi serta sebagai

revisi persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha di tahun 2025 atau sebagai dasar perencanaan. Disamping itu, laporan kinerja 2024 juga dapat digunakan sebagai dasar review terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 40 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Diperlukan strategi untuk mempertahankan kinerja dengan melakukan pendekatan terhadap Lintas Sektor dalam hal ini Dinas Kota/Kabupaten terkait untuk merespon rekomendasi inspeksi Balai POM di Bogor		N/A	Akhir triwulan IV 2025	Respon dari lintas sektor terkait rekomendasi inspeksi Balai POM di Bogor belum optimal	Lintas sektor telah memberi respon terhadap rekomendasi inspeksi Balai POM di Bogor

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 41 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	3.856.000	1.811.600	46,98	117,12	0,16	80% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2023 adalah sebesar 0,16 (100%) dengan kriteria efisien.

3.1.2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi *yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi *) x 100%

Catatan:

*Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1), Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2), Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 3), Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 4), Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 5), Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian

Tabel 42 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” TAHUN 2024”

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	100	106,38	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 94%. Persentase realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 sebanyak 702 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi selama tahun 2024 sebanyak 702 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 106,38 % dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN

TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

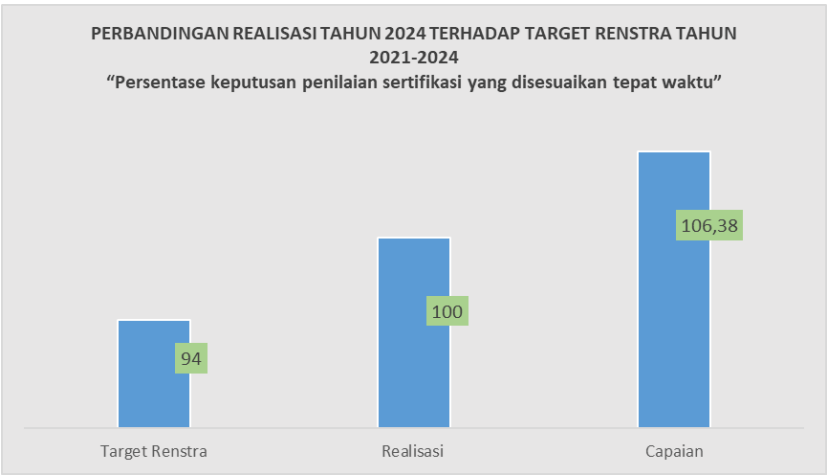
Tabel 43 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	94	100	106,38	Sangat Baik	
2023	92	94,47	102,69	Sangat Baik	
2022	90	72.10	80,11	Cukup	
2021	88	89,03	101,17	Sangat Baik	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “**Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**” adalah sebesar 94%. Indikator kegiatan “**Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**” dari tahun 2021 – 2024 selalu mengalami kenaikan target sebesar 2% tiap tahunnya dari target sebesar 88% di tahun 2021. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, realisasi target di tahun 2023 adalah sebesar 94,47%, 72,10% di tahun 2022 dan 89,03% di tahun 2021.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 94%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 100% sudah melampaui target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 106,38% dan masuk kedalam kategori Tercapai/Melampaui. Masih diperlukan upaya guna mempertahankan pencapaian target Renstra di tahun 2024. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 17 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu "

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu kluster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di **Sofifi**, Balai POM di **Manokwari** dan Balai POM **Tangerang**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai POM di Bogor sebesar **94%**. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar **100%** dengan memperoleh persentase capaian sebesar **106,38%** dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai POM di **Sofifi** sebesar **100%**. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar **100%** dengan memperoleh persentase capaian sebesar **100%** dan memperoleh kriteria **Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai POM di **Manokwari** sebesar **100%**. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar **100%** dengan memperoleh persentase capaian sebesar **100%** dan memperoleh kriteria **Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai POM di **Tangerang** sebesar **97%**. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar **98,18%** dengan memperoleh persentase capaian sebesar **101,22%** dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Bila dibandingkan dengan Balai dalam satu kluster maka Balai POM di Bogor mendapat nilai capaian tertinggi sebesar **106,38%** diikuti oleh Balai POM di **Tangerang** sebesar **101,22%** dan Balai POM di **Sofifi** dan **Manokwari** sebesar **100%**.

Tabel 44 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	94	100	106,38	Sangat Baik	
Balai POM di Sofifi	100	100	100	Baik	
Balai POM di Manokwari	100	100	100	Baik	
Balai POM di Tangerang	97	98,18	101,22	Sangat Baik	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN

KINERJA)

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 disebabkan karena terdapat pembagian tugas staf secara khusus untuk menangani sertifikasi di Bulan September 2024, diadakannya desk percepatan IP CPPOB pada Bulan Juni 2024 & November 2024. Dengan adanya staf khusus yang menangani sertifikasi, pengajuan IP CPPOB, CPOTB, CPKB, CDOB dari Pelaku usaha dapat termonitoring lebih baik sehingga pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan. Pelaksanaan desk percepatan IP CPPOB dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun juga meningkatkan jumlah rekomendasi IP CPPOB yang diterbitkan. Upaya penyempurnaan kinerja yang dapat dilakukan kedepannya antara lain :

- Meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha dalam bentuk desk konsultasi evaluasi berkas pengajuan secara berkala.
- Mengoptimalkan penggunaan layanan konsultasi whatsapp yang sudah tersedia untuk konsultasi denah dan pra-pengajuan dengan mengadakan jadwal piket.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator ini, antara lain:

1. Membentuk Tim Sertifikasi yang terdiri dari 6 orang staf dan menunjuk PIC untuk mengelola pengajuan sertifikasi di setiap komoditi (pangan, kosmetik, obat tradisional, obat)
2. Melakukan monitoring secara berkala setiap bulan terhadap pencapaian target melalui kegiatan Monev kinerja.
3. Menunjuk PIC khusus untuk memonitoring pengajuan denah yang masuk baik softfile dan hardfile.
4. Desk konsultasi CAPA untuk sarana dalam proses perbaikan pasca audit.
5. Melakukan konsultasi denah melalui chat pada aplikasi whatsapp sehingga mempercepat respon.
6. Membagi jadwal piket layanan online melalui nomor layanan whatsapp sertifikasi.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilakukan secara berkala setiap bulan. Berdasarkan hasil monev disusun rencana aksi dan tindak lanjut untuk bulan berikutnya. Hal ini membantu pencapaian dalam target kinerja. Selain capaian kinerja, dilakukan juga monitoring serapan anggaran sehingga kegiatan sertifikasi dan kegiatan bimtek percepatan dapat terlaksana melalui revisi anggaran. Informasi laporan kinerja 2024 bisa menjadi pertimbangan untuk penentuan target di tahun 2025.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu" TAHUN 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Akan ada pic yang secara khusus untuk memonitoring timeline tsb Pemisahan anggota tim khusus Sertifikasi	Selesai	-	-	PIC belum ditunjuk dan Kondisi Setelah Rencana Aksi tim sertifikasi masih bersatu dengan pemeriksaan	PIC telah ditunjuk dan tim sertifikasi khusus sudah terpisah dengan pemeriksaan
2	PIC yang secara khusus untuk memonitoring timeline perkuatan sertifikasi dengan penambahan SDM	Selesai	-	-	terdapat kenaikan capaian TW 3 menjadi 95,84%,	terdapat kenaikan capaian TW 4 menjadi 100%,

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (TOLONG ISI YAH TU)

Tabel 46 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.617.000	99.902.610	99,29	102.69	0,03	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 adalah sebesar 0,03 (100%) dengan kriteria efisien.

3.1.2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah Industri Farmasi (*joint inspection* bersama Direktorat Pengawasan Produksi ONPP dan BBPOM di Bandung), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi Memenuhi Ketentuan (MK) / Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengacu pada

masing-masing pedoman tindak lanjut ke deputian, SOP Makro, dan SOP Mikro yang berlaku. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Sepanjang tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 83 sarana produksi di wilayah kerja oleh petugas Balai POM di Bogor dengan hasil 66 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 17 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan IV adalah sebesar 79,52 %. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Bogor sampai dengan triwulan IV adalah 100,66 % dan telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

Tabel 47 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79	79,52	100,66	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 79%. Persentase realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 79,52%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 100,66% dengan kriteria **Sangat Baik**. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan selama tahun 2024 sebanyak 66 sarana dan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 83 sarana.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

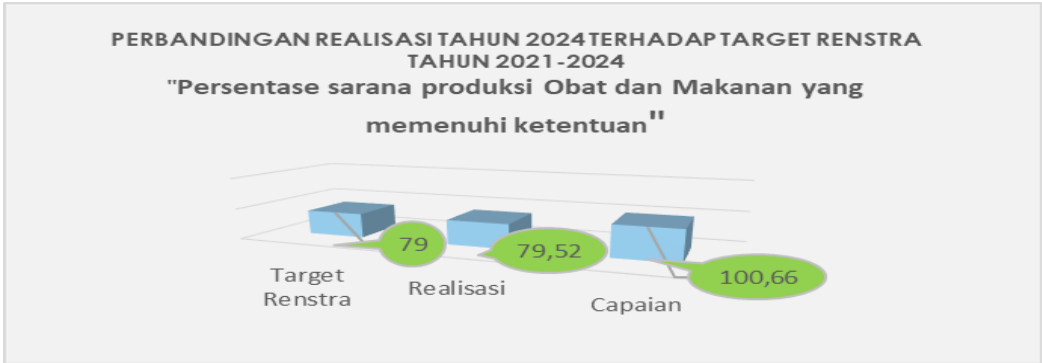
Tabel 48 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	79	79,52	100,66	Sangat Baik	
2023	75	76,12	101,49	Sangat Baik	
2022	71	86.21	121,42	Cukup	
2021	67	69,64	103,94	Sangat Baik	

Dari tahun 2021-2024 terdapat peningkatan target terhadap indikator kegiatan “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan”. Terkait realisasi pada 2024 terdapat peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2023 yakni dari 76,12% (2023) menjadi 79,52% (2024). Hal tersebut menandakan Balai POM di Bogor telah berhasil meningkatkan capaian dan realisasi sejak 2021 sampai dengan 2024 untuk indikator kegiatan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 79%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 79,52 % sudah melampaui target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 100,66 % dan masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 18 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan "

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM Tangerang, Balai POM Sofifi dan Balai POM Manokwari. Berdasarkan tabel di bawah, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang dilaksanakan Tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor yang kemudian disusul oleh Balai POM di Manokwari, Balai POM di Sofifi dan Balai POM di Tangerang.

Tabel 49 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	79	79,52	100,66	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	65	55,88	85,97	Cukup	
Balai POM di Sofifi	65	61,76	95,02	Cukup	
Balai POM di Manokwari	73,9	75,76	100,66	Sangat Baik	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 79,52% dimana telah tercapai. Hasil pemeriksaan sarana produksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel . Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2024 Balai POM di Bogor

No.	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang	Hasil Pemeriksaan
-----	-----------------	--------------------	-------------------

		Diperiksa	MK	TMK
1.	Sarana Produksi Obat	15	15	0
2.	Industri Obat Tradisional dan Industri Ekstrak Bahan Alam	6	5	1
3.	Usaha Kecil Obat Tradisional	10	9	1
4.	Industri Suplemen Kesehatan	10	6	4
5.	Industri Kosmetik	28	21	7
6.	Industri Pangan	14	10	4

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini didukung oleh dilaksanakannya pendampingan dan pembinaan ditempat terhadap pelaku usaha dalam pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan sehingga kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik (CPOB, CPOTB, CPKB, CPOTB Bertahap, CPPOB) meningkat.

Dari data tersebut dapat dilihat capaian produksi tidak memenuhi ketentuan diperoleh dari Industri Kosmetik, Industri Suplemen Kesehatan dan Industri Pangan. Sepanjang tahun 2024, terdapat pemeriksaan di luar pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari

pemeriksaan Badan POM maupun dari Balai Besar/Balai POM/Loka POM lainnya, antara lain temuan produk yang Tidak Memenuhi Syarat dan pengaduan konsumen terhadap sarana Industri Kosmetik, Industri Suplemen Kesehatan dan Industri Pangan yang ikut berkontribusi dalam sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sarana produksi obat, kosmetik, pangan, obat tradisional dan suplemen kesehatan sebagian dilaksanakan dengan *lead* inspektur petugas dari Badan POM RI dan Balai Besar POM di Bandung.
2. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan petugas Badan POM RI dan Balai Besar POM di Bandung terkait pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.

Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan pada tahun 2024 didominasi oleh industri kosmetik, industri suplemen Kesehatan dan industri pangan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap CPOTB, CPKB, dan CPPOB masih rendah. Pada tahun 2024 telah dilakukan peningkatan kompetensi kepada Inspektur GMP melalui pelatihan topik khusus dan pelatihan Inspektur GMP. Disamping itu juga dilakukan desk CAPA terhadap pelaku usaha sarana produksi Obat dan Makanan secara luring (konsultasi tatap muka) maupun daring (zoom).

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan informasi laporan kinerja 2024, target renstra di tahun 2024 telah tercapai. Laporan kinerja pada bagian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat digunakan untuk melihat tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi Obat dan Makanan sesuai dengan pedoman GMP yang berlaku serta sebagai reuiu indikator kinerja sarana produksi Obat dan Makanan yang di tahun 2025 atau sebagai dasar perencanaan. Disamping itu, laporan kinerja 2024 juga dapat digunakan sebagai dasar review terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 50 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Diperlukan strategi untuk mempertahankan kinerja dengan meningkatkan pembinaan di lapangan, peningkatan monitoring CAPA serta pendampingan CAPA terhadap sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.		N/A	Akhir triwulan IV 2025	Masih terdapat sarana produksi yang belum melakukan perbaikan terhadap hasil temuan audit	Sarana produksi telah menyelesaikan tindakan perbaikan dan pencegahannya

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 51 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100.617.000	99.902.610	99,29	102.69	0,07	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 adalah sebesar 0,07 (100%) dengan kriteria efisien.

3.1.2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n dengan Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan IV. Sarana distribusi Obat dan Makanan meliputi sarana distribusi obat (PBF, GFK), distribusi obat tradisional, distribusi kosmetik, distribusi suplemen kesehatan dan distribusi makanan, dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS,

klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi Target Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa} \times 100\%}$$

Sepanjang tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 383 sarana distribusi di wilayah kerja oleh petugas Balai POM di Bogor dengan hasil 312 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 71 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan IV adalah sebesar 81,46 %. Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Bogor sampai dengan triwulan IV adalah 101,83 % dan telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

Tabel 52 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	809	81,46	101, 83	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 80%. Persentase realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 81,46%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar 101,83 % dengan kriteria Sangat Baik. Dengan rincian jumlah sarana distribusi

Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan selama tahun 2024 sebanyak 312 sarana dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 383 sarana.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

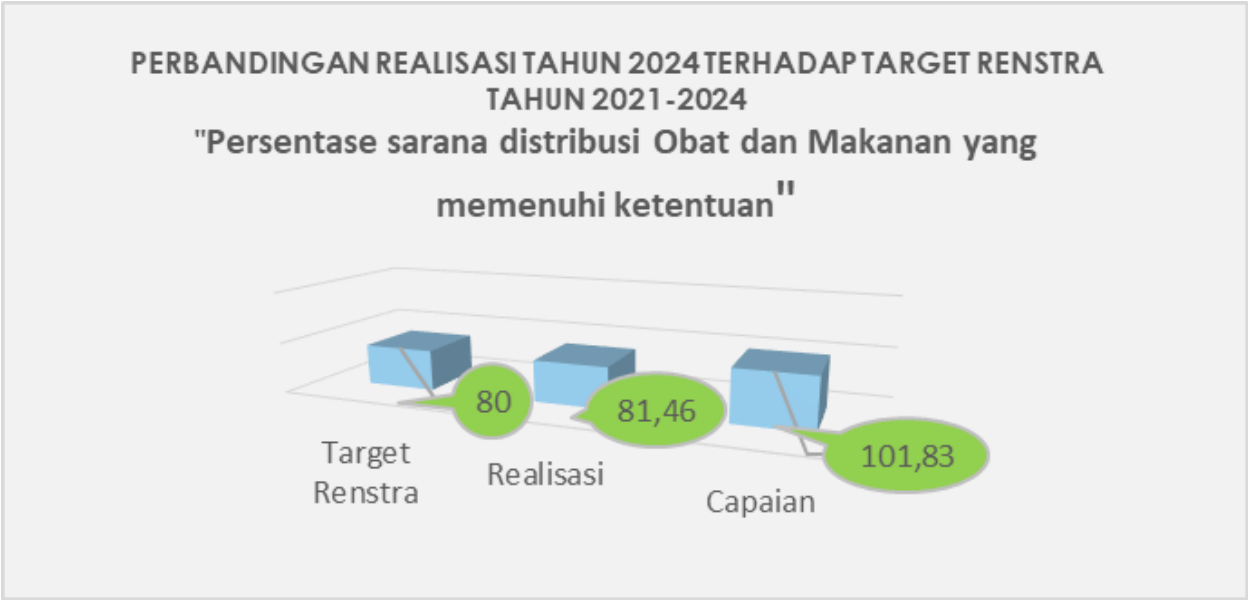
Tabel 53 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	80	81,46	101,83	Sangat Baik	
2023	79	80,05	101,33	Sangat Baik	
2022	77	83,78	108,81	Sangat Baik	
2021	75	79,66	106,21	Sangat Baik	

Dari tahun 2021-2024 terdapat peningkatan target terhadap indikator kegiatan “Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan”. Terkait realisasi pada 2024 terdapat peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2023 yakni dari 80,05 % (2023) menjadi 81,46 % (2024). Hal tersebut menandakan Balai POM di Bogor telah berhasil meningkatkan capaian dan realisasi sejak 2021 sampai dengan 2024 untuk indikator kegiatan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 80%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 81,46 % sudah melampaui target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 101,83 % dan masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 19 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024
" Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan "

**D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN
UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS**

Realisasi indikator kegiatan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM Tangerang, Balai POM Sofifi dan Balai POM Manokwari. Berdasarkan tabel di bawah, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang dilaksanakan Tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Bogor yang kemudian disusul oleh Balai POM di Manokwari, Balai POM di Sofifi dan Balai POM di Tangerang.

**Tabel 54 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI
OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA
SEJENIS**

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	80	81,46	101,83	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	71	63,12	88,91	Cukup	
Balai POM di Sofifi	68	67,51	108, 89	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwari	73,1	79,6	99,28	Cukup	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 81,46 % dimana telah tercapai. Hasil pemeriksaan sarana distribusi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel . Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan
Tahun 2024 Balai POM di Bogor

No.	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	13	7	6
2.	Apotek	53	34	19
3.	Toko Obat	14	7	7
4.	Instalasi Sediaan Farmasi / Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	3	3	0
5.	Rumah Sakit	15	13	2
6.	Puskesmas	27	27	0
7.	Klinik	31	24	7
8.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	68	61	7
9.	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	10	10	0
10.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	59	50	9
11.	Sarana Peredaran Pangan Olahan	90	76	14

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini didukung dengan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam mengedarkan Obat dan Makanan di sarana peredaran, melakukan pembinaan ditempat kepada pelaku usaha, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan. Kedepannya dapat melakukan peningkatan pembinaan terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan serta menerapkan sanksi yang lebih tegas untuk meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.

Dari data tersebut dapat dilihat capaian distribusi tidak memenuhi ketentuan diperoleh dari sarana pelayanan kefarmasian, fasilitas distribusi Obat Tradisional, fasilitas distribusi

Kosmetik, dan sarana peredaran pangan olahan. Sepanjang tahun 2024, terdapat pemeriksaan di luar pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan Badan POM maupun dari Balai Besar/Balai POM/Loka POM lainnya, antara lain pengaduan konsumen dan tindak lanjut kasus serta kegiatan intensifikasi pengawasan distribusi yang berfokus dalam pengawasan produk tanpa izin edar. Hal tersebut berkontribusi dalam sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan dilaksanakan bersama dengan Inspektur dari Badan POM RI.
2. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan petugas Badan POM RI terkait pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.

Pada tahun 2024 telah dilakukan peningkatan kompetensi kepada Inspektur GMP melalui pelatihan topik khusus dan pelatihan Inspektur. Disamping itu juga dilakukan desk CAPA terhadap pelaku usaha sarana distribusi Obat dan Makanan secara luring (konsultasi tatap muka) maupun daring (zoom).

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan informasi laporan kinerja 2024, target renstra di tahun 2024 telah tercapai. Laporan kinerja pada bagian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat digunakan untuk melihat tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan peredaran Obat dan Makanan sesuai dengan pedoman yang berlaku serta sebagai reuiu indikator kinerja sarana distribusi Obat dan Makanan di tahun 2025 atau sebagai dasar perencanaan. Disamping itu, laporan kinerja 2024 juga dapat digunakan sebagai dasar review terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 55 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Diperlukan strategi untuk mempertahankan kinerja dengan meningkatkan pembinaan di lapangan, peningkatan monitoring CAPA serta pendampingan CAPA terhadap sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan.		N/A	Akhir triwulan IV 2025	Masih terdapat sarana distribusi yang belum melakukan perbaikan terhadap hasil temuan audit	Sarana distribusi telah menyelesaikan tindakan perbaikan dan pencegahannya

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 56 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100.617.000	99.902.610	99,29	102.69	0,06	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 adalah sebesar 0,06 (100%) dengan kriteria efisien.

3.1.2.6 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian atau lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi.

Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Bogor baru diukur pada tahun 2024 dengan nilai 3.89, dengan kriteria BAIK, skala 1-5. Pengukuran indeks pelayanan publik ini mengacu pada pedoman Menpan RB Nomor 1 tahun 2022 tentang instrumen dan mekanisme pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bobot masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

- 1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%)
- 2. Profesionalisme SDM (bobot 25%)
- 3. Sarana Prasarana (bobot 18%)
- 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik / SIPP (bobot 11%)
- 5. Konsultasi dan Pengaduan (bobot 10%) 6. Inovasi (bobot 12%)

Tabel 52 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Pelayanan Publik” TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Indeks Pelayanan Publik	3.55	3.89	109.58	Sangat Baik	

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan target yang ditetapkan, **BPOM Bogor menargetkan Indeks Pelayanan Publik sebesar 3.55 pada tahun 2024.** Namun, realisasi menunjukkan hasil yang lebih baik dari ekspektasi, dengan indeks yang berhasil mencapai **3.89**, atau **109.58% dari target yang ditetapkan.** Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang signifikan dan efektivitas strategi yang telah diterapkan sepanjang tahun.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Tahun 2024 menjadi tahun pertama penerapan pengukuran indeks ini di BPOM Bogor, yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengawasan sediaan farmasi, makanan, dan minuman serta program

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, sehingga tidak ada data pembanding dari tahun-tahun sebelumnya.

F. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi BPOM Bogor dalam mengukur **Indeks Pelayanan Publik** sebagai salah satu indikator kinerja. Oleh karena itu, tidak terdapat data pembanding dari tahun-tahun sebelumnya dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran indeks ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pengawasan sediaan farmasi, makanan, dan minuman, serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

G. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Capaian kinerja indeks pelayanan publik tahun 2024 menunjukkan bahwa BPOM di Bogor berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 3.55 dengan realisasi 3.89, mencapai persentase capaian 109.58%. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan BPOM di Tangerang yang memiliki target yang sama yaitu 3.55 dengan realisasi 3.68 dan persentase capaian 103.66%. Sementara itu, BPOM di Manokwari dan Sofifi memiliki target lebih tinggi, masing-masing 4.8 dan 4.7, dengan realisasi 4.95 dan 4.72, serta persentase capaian 103.13% dan 100.43%.

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa BPOM di Bogor memiliki tingkat pencapaian yang lebih signifikan dibandingkan unit kerja lain yang sejenis, meskipun target awalnya lebih rendah. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi peningkatan pelayanan yang diterapkan di BPOM Bogor, sehingga mampu memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 54 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Pelayanan Publik” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	3.55	3.89	109.58	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	3.55	3.68	103.66	Cukup	
Balai POM di Sofifi	4.7	4.72	100.43	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwari	4.8	4.95	103.13	Cukup	

H. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Keberhasilan BPOM di Bogor dalam mencapai indeks pelayanan publik sebesar 3.89 dari target 3.55 dengan persentase capaian 109.58% menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan yang signifikan. Salah satu faktor utamanya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan juga berperan penting dalam meningkatkan responsivitas dan profesionalisme petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Meskipun capaian ini sangat positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di masa depan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan infrastruktur dalam mendukung pelayanan yang lebih optimal serta tantangan dalam memastikan seluruh layanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di berbagai wilayah, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap teknologi. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana pendukung menjadi salah satu aspek yang harus diperbaiki untuk mempertahankan tren positif ini terutama sarana prasarana untuk berkebutuhan khusus agar terwujud prinsip kesetaraan dalam pelayanan sehingga setiap individu mendapatkan akses yang sama terhadap informasi, pengaduan, dan layanan yang disediakan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dapat difokuskan pada penguatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat. Mekanisme evaluasi layanan harus lebih responsif dalam menindaklanjuti keluhan atau saran yang diberikan oleh pengguna layanan. Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan BPOM di Bogor akan semakin meningkat. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung kebijakan yang lebih adaptif dalam memenuhi kebutuhan layanan publik yang semakin kompleks.

Rekomendasi perbaikan lainnya adalah meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik dengan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang lebih user-friendly dan inklusif. serta sistem pemantauan layanan secara real-time dapat membantu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat lebih memahami prosedur layanan yang tersedia sehingga dapat mengurangi hambatan administratif yang sering terjadi.

Secara keseluruhan, capaian indeks pelayanan publik BPOM di Bogor pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, serta memperkuat

mekanisme umpan balik masyarakat, BPOM di Bogor dapat terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas layanan publiknya di tahun-tahun mendatang. Hal ini akan semakin memperkuat peran BPOM dalam memastikan keamanan dan kualitas produk farmasi, makanan, dan minuman yang beredar di masyarakat.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Capaian Indeks pelayanan publik BPOM di Bogor tahun 2024 melebihi target 3.55 dengan realisasi 3.89. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan, serta inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Program-program ini mencakup pendekatan langsung maupun tidak langsung untuk memastikan kemudahan dan kepuasan dalam mendapatkan layanan BPOM di Bogor.

Salah satu faktor utama yang mendukung pencapaian ini adalah perbaikan terus menerus terhadap pelayanan publik Balai POM di Bogor, baik dalam hal sarana prasarana maupun SDM, dan program pelayanan di luar kantor melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran BPOM di Bogor di MPP mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor BPOM, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan kenyamanan dalam pelayanan. Selain itu, sistem informasi pelayanan publik (SIPP) yang mencakup berbagai kanal komunikasi seperti telepon, media sosial, website, WhatsApp, email, dan media elektronik juga berperan besar dalam memberikan kemudahan akses informasi serta mempercepat respons terhadap pertanyaan dan pengaduan masyarakat.

Inovasi yang terus dikembangkan oleh BPOM di Bogor juga menjadi faktor kunci dalam peningkatan indeks pelayanan publik. Salah satu inovasi Balai POM di Bogor adalah program GROW BPOM (*Green Research and Opportunities With BPOM*), misalnya, memberikan dampak positif bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing produk inovatif mereka di pasar global. PINTAR UMKM dan Sister BPOM di Bogor juga membantu dalam memberikan asistensi regulasi dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM di wilayah kerja BPOM di Bogor. Selain itu, POLITE at BPOM Bogor dan PUNTEN MANGGA BPOM Bogor memperkuat akses masyarakat terhadap informasi serta layanan uji cepat secara gratis.

Selain pelayanan dan inovasi, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga berkontribusi dalam peningkatan indeks pelayanan publik. Program seperti Sabilulungan yang mendukung penelitian mahasiswa, TOT CEPOT untuk pencegahan penyalahgunaan obat dan makanan terlarang, serta SEDAP yang menjalin komunikasi erat dengan aparaturnya pemerintah, menjadi wadah sinergi yang memperkuat efektivitas program BPOM di Bogor. Di sisi lain, Sersan

Pers Bogor dan Menemani BPOM di Bogor turut serta dalam membangun keterbukaan informasi dan transparansi dalam pelayanan publik.

Meskipun capaian indeks pelayanan publik tahun 2024 melampaui target, evaluasi tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan lebih lanjut, khususnya untuk kelompok rentan. Optimalisasi sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak perlu terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan standar pelayanan. Dengan berbagai program yang telah berjalan serta upaya perbaikan yang berkelanjutan, BPOM di Bogor berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang semakin berkualitas, inklusif, dan inovatif bagi seluruh masyarakat.

I. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja yang mencakup Indeks Pelayanan Publik memiliki berbagai manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan instansi pemerintah. diantaranya adalah sebagai berikut::

1. Evaluasi Kinerja Instansi

Indeks ini menjadi alat untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik telah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari aspek transparansi, akuntabilitas, maupun efektivitas layanan.

2. Identifikasi Kelemahan dan Perbaikan Layanan

Dari hasil indeks, instansi dapat mengidentifikasi area yang masih lemah dan membutuhkan perbaikan, misalnya dalam kecepatan layanan, keterbukaan informasi, atau kompetensi petugas.

4. Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Dengan mengetahui aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, instansi dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Laporan kinerja yang memuat indeks pelayanan publik meningkatkan transparansi pemerintah dalam menyampaikan pencapaian dan tantangan dalam pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

7. Landasan untuk Penyusunan Anggaran dan Sumber Daya

Hasil indeks dapat menjadi dasar dalam alokasi anggaran, pengembangan SDM, serta investasi

dalam infrastruktur layanan yang lebih baik.

J. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 55 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Indeks Pelayanan Publik"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

J. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 56 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100.617.000	99.902.610	99,29	102.69	0,06	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 adalah sebesar 0,06 (100%) dengan kriteria efisien.

3.1.2.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Tabel 57 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100	Baik	Hijau

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 100 %. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan

dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2024 sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

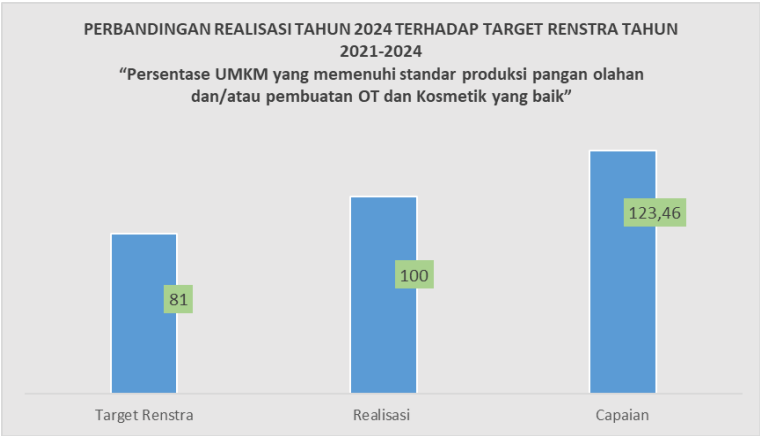
Tabel 58 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	100	100	100	Baik	
2023	79	100	126,58	Tidak Dapat Disimpulkan	
2022	77	100	129,87	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “**Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**” adalah sebesar 100%. Indikator kegiatan “**Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**” dari tahun 2022 – 2024 selalu mengalami kenaikan target tiap tahunnya. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 100% sama dengan realisasi indikator di tahun 2023 dan 2022. Pada Tahun 2021, Balai POM di Bogor tidak memiliki indikator terkait “**Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**”

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 81%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 100% sudah mencapai target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 123,46% dan masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui**. Masih diperlukan upaya guna mempertahankan pencapaian target Renstra di tahun 2024. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 20 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik "

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu kluster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Sofifi, Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Tangerang. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Balai POM di Bogor sebesar 100%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria **Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Balai POM di Sofifi sebesar 92,4%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 108,23% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Balai POM di Manokwari sebesar 100%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria **Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Balai POM di Tangerang sebesar 83,50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 119,76% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Bila dibandingkan dengan Balai dalam satu kluster maka Balai POM di Tangerang mendapat nilai capaian tertinggi sebesar 119,76% diikuti oleh Balai POM di Sofifi sebesar 101,22% dan Balai POM di Sofifi dan Manokwari sebesar 100%.

Tabel 59 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	100	100	100	Baik	Hijau
Balai POM di Sofifi	92,4	100	108,23	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwari	100	100	100	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	83,5	100	119,76	Sangat Baik	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Balai POM di Bogor telah melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan pendampingan umkm terhadap 25 UMK binaan. Pendampingan UMK diawali dengan penetapan UMK yang berkerjasama dengan stakeholder terkait seperti Dinas kesehatan dan Dinas KKP. Dilakukan Bimtek terhadap UMK tersebut terkait dengan cara produksi yang baik untuk komoditi obat bahan alam, kosmetik dan pangan. Khusus untuk komoditi pangan dilakukan bimtek lanjutan terkait Izin penerapan CPPOB untuk menggali kendala dan permasalahan dalam pengajuan sertifikat CPPOB. Selain itu, dilakukan desk konsultasi dan jemput bola untuk pengecekan persyaratan baik administrasi maupun teknis serta pendampingan langsung on site ke fasilitas sarana produksi UMKM. Seluruh UMK binaan telah memperoleh rekomendasi dan sertifikat. Penggunaan teknologi *video conference* dan whatsapp turut berperan dalam suksesnya pelaksanaan pendampingan dikarenakan menjadi sarana komunikasi dalam pemantauan progress pembinaan.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja, terdiri dari:

1. Bersinergi dengan program stakeholder seperti UMK binaan Pemerintah Daerah
2. Melakukan seleksi UMK yang mengikuti pendampingan agar terpilih UMK yang berkomitmen untuk menyelesaikan pendampingan.
3. Bersinergi dengan program kerjasama Badan POM dengan Kemendikbudristek untuk kampus merdeka Pangan Aman Goes to Campus.
4. Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan dan Desk konsultasi IP CPPOB yang berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilakukan secara berkala setiap bulan. Berdasarkan hasil monev disusun rencana aksi dan tindak lanjut untuk bulan berikutnya. Hal ini membantu pencapaian dalam target kinerja. Selain capaian kinerja, dilakukan juga monitoring serapan anggaran sehingga kegiatan pendampingan dan jemput bola registrasi pangan olahan dan percepatan pengajuan IP CPPOB dapat terlaksana melalui revisi anggaran. Informasi laporan kinerja 2024 bisa menjadi pertimbangan untuk penentuan target di tahun 2025.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 60 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik "

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Evaluasi permohonan sertifikasi .CPOTB, CPKB, dan atau CPPOB	Selesai	-	-	capaian TW 3 belum memenuhi target sebesar 63,33 %,	Terdapat kenaikan capaian TW 4 menjadi 100%,

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (TOLONG DIISI TU)

Tabel 61 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	36.319.000	35.220.000	96,97	126,58	0,31	95% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2023 adalah sebesar 0,31 (95%) dengan kriteria efisien.

3.1.2.7. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota.

Program Sediaan Farmasi, Makanan, dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam berbagai aspek, termasuk koordinasi dengan pemangku kepentingan serta pengelolaan dana yang mendukung keberlanjutan program. Salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas keterlibatan UPT adalah persentase keikutsertaan dalam menjalankan program yang telah dirancang oleh

pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terkait berbagai aspek yang mempengaruhi keterlibatan UPT dalam implementasi program ini.

Salah satu aspek utama yang menjadi fokus dalam evaluasi ini adalah Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKP POM). Keterlibatan TKP POM dalam program ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan sinergi antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, serta Dinas Perdagangan. Selain itu, peningkatan koordinasi tata hubungan kerja dalam TKP POM menjadi faktor penting dalam memperkuat pengawasan serta memastikan efektivitas pelaksanaan program di daerah. Dengan koordinasi yang baik, pengawasan terhadap sediaan farmasi, makanan, dan minuman dapat lebih optimal dan berkontribusi pada peningkatan mutu serta keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Selain aspek TKP POM, evaluasi juga mencakup peran **Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)** yang juga menjadi bagian penting dalam evaluasi keterlibatan UPT. Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja dalam TPPS diperlukan untuk memastikan bahwa program penurunan stunting dapat berjalan secara efektif, terutama dalam aspek penyediaan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Dengan keterlibatan aktif UPT dalam TPPS, pemantauan terhadap kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ibu hamil, bayi, dan balita dapat lebih optimal juga dalam segi keamanan pangannya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang.

Selanjutnya, aspek lain yang turut dinilai adalah pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) POM. Dalam program ini, pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Nonfisik BOK POM menjadi faktor penting dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Penentuan lokus penerima dana harus mempertimbangkan faktor-faktor strategis, seperti tingkat risiko peredaran produk ilegal, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta kapasitas pengawasan di daerah tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan UPT dalam proses ini sangat berperan dalam menjamin bahwa dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan berkontribusi pada pencapaian tujuan program.

Terakhir, peningkatan koordinasi tata hubungan kerja dalam pengelolaan DAK Nonfisik BOK POM juga menjadi aspek yang harus diperhatikan. Dengan koordinasi yang baik antara UPT, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, program yang didanai oleh DAK Nonfisik BOK POM dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, sinergi antar instansi juga akan memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki keberlanjutan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Evaluasi terhadap aspek-aspek ini akan

memberikan gambaran mengenai efektivitas keterlibatan UPT serta rekomendasi untuk meningkatkan implementasi program di masa mendatang.

Tabel 47 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota” TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota	95%	99.67%	104.92	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2021 - 2024)

Persentase keterlibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam **Program Sediaan Farmasi, Makanan, dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan** yang dilaksanakan oleh Balai POM di Bogor tahun 2024 merupakan indikator baru yang pertama kali ditetapkan pada tahun ini. Target yang telah ditentukan untuk keterlibatan UPT dalam program ini adalah **95%**, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi keterlibatan UPT telah mencapai **99,67%**, melampaui target yang telah ditetapkan dan mencerminkan keberhasilan Balai POM di Bogor dalam membangun koordinasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Karena indikator ini baru diterapkan di tahun 2024, tidak terdapat data pembanding dari tahun-tahun sebelumnya, namun pencapaian yang signifikan ini menjadi landasan untuk penguatan dan pengembangan program serupa di masa mendatang.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR DOKUMEN RENSTRA (2021 - 2024)

Persentase keterlibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam **Program Sediaan Farmasi, Makanan, dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota** merupakan **indikator target baru** bagi BPOM di Bogor pada tahun 2024. Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan keterlibatan UPT dalam pelaksanaan program pengawasan serta pemberdayaan masyarakat guna memastikan keamanan dan mutu produk farmasi, makanan, dan minuman di tingkat daerah. Dengan ditetapkannya target ini, BPOM di Bogor berupaya memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan sinergi dalam implementasi kebijakan di sektor kesehatan. Sebagai indikator yang

baru diterapkan, hasil pencapaian tahun 2024 akan menjadi tolok ukur dalam pengembangan strategi yang lebih efektif di masa mendatang untuk meningkatkan kualitas pengawasan serta pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Perbandingan realisasi Persentase keterlibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam **Program Sediaan Farmasi, Makanan, dan Minuman** serta **Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota** tahun 2024 dengan balai sejenis dan target nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 64 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keterlibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Program Sediaan Farmasi, Makanan, dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota” Tahun 2024 dengan Unit Kerja Sejenis

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN PROGRES SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	95%	99,67%	104.92	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	95%	100%	105.26	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwari	95%	99,63%	104.87	Sangat Baik	
Balai POM di Sofifi	95%	99,33%	104.56	Sangat Baik	

Realisasi **Persentase Keterlibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Program Sediaan Farmasi, Makanan, dan Minuman** serta **Program Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024** menunjukkan pencapaian yang melebihi target UPT yang telah ditetapkan. Target keterlibatan UPT BPOM secara nasional adalah **95%**, sementara realisasi Balai POM di beberapa wilayah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Balai POM di **Bogor** mencatat realisasi keterlibatan UPT sebesar **99,67%**, dengan realisasi capaian mencapai **104,92%** dari target nasional. Sementara itu, Balai POM di **Tangerang** berhasil mencapai **100% keterlibatan**, menjadikannya UPT dengan capaian tertinggi, yaitu **105,26%**. Di sisi lain, Balai POM di **Manokwari** mencapai **99,63%** dengan realisasi capaian sebesar **104,87%**, sedangkan Balai POM di **Sofifi** mencatat keterlibatan **99,33%** dengan realisasi capaian sebesar **104,56%**.

Jika dibandingkan dengan UPT sejenis, BPOM di **Tangerang** menunjukkan pencapaian tertinggi, dengan realisasi **100% atau 105,26% dari target nasional**, diikuti oleh BPOM di **Bogor (99,67%**

/ **104,92%**), BPOM di **Manokwari (99,63% / 104,87%)**, dan BPOM di **Sofifi (99,33% / 104,56%)**.

Hasil ini mencerminkan keberhasilan masing-masing UPT dalam memperkuat koordinasi dan keterlibatan dalam program pengawasan serta pemberdayaan masyarakat di sektor farmasi, makanan, dan minuman. Pencapaian yang tinggi ini juga menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan dalam mendukung kebijakan nasional untuk meningkatkan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Dengan capaian yang melampaui target nasional, diharapkan sinergi antar-UPT semakin diperkuat untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program di tahun-tahun mendatang.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Pencapaian realisasi keterlibatan UPT di Balai POM Bogor sebesar 99,67% dengan capaian 104,92% dari target 95% menunjukkan bahwa strategi implementasi program telah berjalan dengan efektif. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen tinggi seluruh pihak terkait dalam meningkatkan sinergi antara unit pelaksana teknis, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lain di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pada aspek Tim Koordinasi POM, keterlibatan TKPPOM dan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja menjadi faktor kunci. Keteraturan pertemuan, evaluasi berkala, serta mekanisme komunikasi yang transparan antar lembaga telah memfasilitasi aliran informasi dan pengambilan keputusan yang cepat, sehingga memperkuat pelaksanaan pengawasan terhadap sediaan farmasi, makanan, dan minuman.

Keterlibatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di wilayah cakupan kerja Balai POM di Bogor saat ini telah terealisasi di dua kota, yaitu Kota Bogor dan Kota Depok. Keberhasilan ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi pengawasan obat dan makanan guna melindungi masyarakat. Dengan adanya SK TKPPOM di kedua kota tersebut, sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya semakin solid dalam mengawal kebijakan dan program di sektor farmasi, makanan, dan minuman.

Namun, hingga saat ini, SK TKPPOM untuk Kabupaten Bogor masih belum terbentuk, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut berupa audiensi dan koordinasi intensif dengan pemerintah Kabupaten Bogor. Langkah ini penting untuk memastikan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam pengawasan obat dan makanan serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Dengan adanya koordinasi yang lebih erat, diharapkan pembentukan SK TKPPOM Kabupaten Bogor dapat segera terealisasi, sehingga seluruh wilayah cakupan kerja Balai POM di

Bogor memiliki mekanisme koordinasi yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan masyarakat

Untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), peningkatan koordinasi tata hubungan kerja antar sektor menjadi pendorong utama keberhasilan. Integrasi program TPPS dengan kegiatan pengawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat telah menciptakan sinergi antar dinas terkait, sehingga program penurunan stunting dapat diimplementasikan dengan lebih komprehensif dan terukur.

Pada aspek DAK Nonfisik BOK POM, pertimbangan teknis dalam penentuan lokus penerima dana serta peningkatan koordinasi tata hubungan kerja telah mendukung distribusi anggaran yang lebih tepat sasaran. Meskipun mekanisme teknis ini terbukti efektif, beberapa tantangan terkait transparansi pemilihan lokus masih perlu diatasi melalui penajaman kriteria dan peningkatan partisipasi stakeholder.

Meskipun Balai POM di Bogor berhasil mencatat realisasi keterlibatan UPT sebesar 99,67% dengan capaian 104,92% dari target nasional 95%, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal monitoring dan pelaporan. Keterlambatan dalam proses pelaporan dan pemantauan capaian program menjadi salah satu kendala yang perlu segera diatasi agar efektivitas pencapaian target dapat lebih optimal dan tidak menghambat pengambilan keputusan strategis.

Salah satu penyebab utama keterlambatan ini adalah belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan, baik dari segi keakuratan maupun ketepatan waktu dalam penyampaian data. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan laporan juga turut berkontribusi terhadap keterlambatan penyampaian hasil evaluasi capaian keterlibatan UPT.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus terkait manajemen pelaporan dan penggunaan sistem monitoring berbasis teknologi. Penguatan koordinasi antara unit pelaksana teknis dengan pusat juga menjadi langkah strategis agar informasi dapat disampaikan lebih cepat dan akurat. Selain itu, penerapan sistem digital yang terintegrasi dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses monitoring serta memastikan laporan yang dihasilkan lebih akurat dan real-time.

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan monitoring juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi dan mencari solusi yang lebih efektif. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat terkait tenggat waktu penyampaian laporan serta mekanisme verifikasi internal dapat membantu memperbaiki sistem pelaporan yang ada.

Selain aspek teknis, peningkatan kesadaran dan komitmen seluruh pihak terkait, termasuk UPT dan mitra kerja, dalam memenuhi kewajiban pelaporan tepat waktu juga harus menjadi prioritas. Sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan yang tepat waktu dan akurat perlu diperkuat agar seluruh pihak memahami dampaknya terhadap efektivitas program yang dijalankan.

Dengan adanya perbaikan dalam sistem monitoring dan pelaporan, Balai POM di Bogor dapat lebih meningkatkan akuntabilitas serta memastikan bahwa capaian keterlibatan UPT dapat terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Langkah-langkah ini akan mendukung pencapaian target nasional secara lebih efisien serta memperkuat peran BPOM dalam mengawasi dan membina sektor farmasi, makanan, dan minuman di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program-program yang dijalankan oleh Balai POM Bogor dalam meningkatkan keterlibatan UPT mencakup tiga aspek utama, yakni Tim Koordinasi POM, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), dan DAK Nonfisik BOK POM. Keseluruhan kegiatan ini dirancang untuk mengoptimalkan sinergi antar instansi dan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai target nasional pengawasan dan pemberdayaan di sektor kesehatan.

Pada aspek Tim Koordinasi POM, program yang melibatkan keterlibatan aktif TKPPOM telah berhasil membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif. Kegiatan seperti rapat koordinasi, penyusunan jadwal inspeksi, dan sharing best practices antar unit telah menciptakan fondasi yang kuat untuk meningkatkan akurasi pengawasan serta mendorong perbaikan terus-menerus dalam tata hubungan kerja.

Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja dalam Tim Koordinasi POM juga terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja. Pelaksanaan program yang mengintegrasikan Kolaborasi pengawasan dan pertemuan rutin, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut atas temuan lapangan telah memastikan bahwa setiap isu atau hambatan dapat segera ditangani secara kolaboratif, sehingga target keterlibatan UPT dapat terlampaui.

Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berfokus pada peningkatan koordinasi antar sektor, yang meliputi dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas sosial dan OPD terkait lainnya.. Kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan telah meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap standar gizi dan kesehatan, yang pada akhirnya mendukung pengawasan produk pangan yang aman dan bergizi.

Dalam hal DAK Nonfisik BOK POM, program yang dijalankan mengedepankan pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima dana dan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja. Mekanisme pemilihan lokus prioritas melalui analisis risiko dan kebutuhan daerah, ditambah dengan koordinasi lintas sektor, telah memberikan dasar yang kuat bagi penggunaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran.

Keseluruhan analisis program menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja Balai POM Bogor tidak terlepas dari desain dan implementasi kegiatan yang terpadu serta kolaboratif. Meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan. Untuk meningkatkan kinerja Balai POM di Bogor dalam pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan, diperlukan perbaikan dalam aspek peningkatan hubungan tata kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan optimalisasi sumber daya. Penguatan koordinasi dengan OPD, terutama di Kabupaten Bogor yang belum memiliki SK TKPPOM, menjadi langkah strategis agar seluruh wilayah cakupan kerja dapat memiliki mekanisme koordinasi yang efektif. Melalui audiensi dan komunikasi yang lebih intensif, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan program pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, optimalisasi sumber daya, baik dari segi tenaga kerja, infrastruktur, maupun dukungan anggaran, juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja. Dengan memaksimalkan pemanfaatan DAK Nonfisik BOK POM dan memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan serta peningkatan kompetensi, Balai POM di Bogor dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Dukungan sumber daya yang memadai akan memastikan keberlanjutan program serta pencapaian target yang lebih optimal dalam pengawasan obat dan makanan, serta perlindungan kesehatan masyarakat.

E. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

laporan kinerja ini dapat berperan sebagai acuan dalam penguatan peran UPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. **Evaluasi dan Perbaikan Program** – Dengan melihat tren keterlibatan UPT dari tahun ke tahun, dapat dilakukan perbaikan strategi agar program berjalan lebih efektif.
2. **Optimalisasi Sumber Daya** – Data laporan digunakan untuk menilai kebutuhan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam implementasi program.
3. **Penguatan Koordinasi** – Memastikan sinergi antara UPT dengan OPD terkait, lembaga riset, dan komunitas dalam menjalankan program kesehatan yang berbasis data dan kebutuhan daerah.
4. **Peningkatan Akuntabilitas** – Transparansi dalam laporan kinerja dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan kesehatan.

Dengan adanya laporan kinerja yang terukur dan berbasis data, diharapkan keterlibatan UPT dalam berbagai program kesehatan di daerah dapat semakin meningkat, memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 50 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota."

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 51 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota."

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota.	36.319.000	35.220.000	96,97	126,58	0,07	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 adalah sebesar 0,07 (100%) dengan kriteria efisien.

SASARAN KEGIATAN KE-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

3.1.3 SASARAN KEGIATAN KE-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ke – 3 didukung dengan 4 (empat) indikator dengan capaian pada tabel berikut:

Tabel 62 CAPAIAN KINERJA SARAN KEGIATAN KE-3 TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
1	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.2	93.29	100.10	Sangat Baik	
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	6	6	100	Baik	
		Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	100	Baik	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	Baik	

Berdasarkan perhitungan indikator tersebut, diperoleh hasil capaian sebesar 100,10% dengan kriteria pencapaian **Sangat Baik**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-3 tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

(c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester. Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 93.2. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 adalah 93.29. Dengan demikian persentase pencapaian tingkat efektivitas KIE Balai POM di Bogor adalah sebesar 100,10% dan mendapatkan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

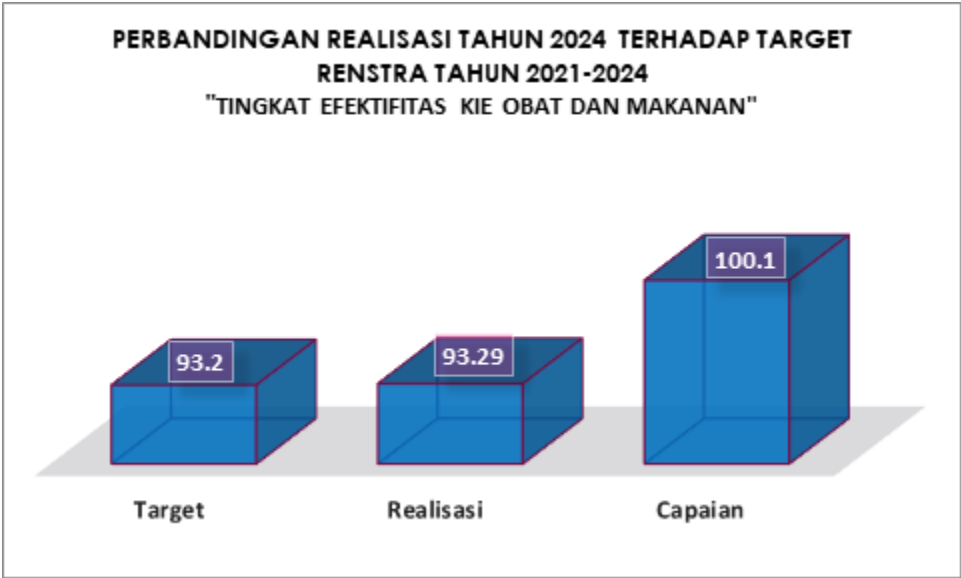
Tabel 63 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	93.2	93.29	100.10	Sangat Baik	
2023	91,8	92,35	100.60	Sangat Baik	
2022	90,9	93,11	102,43	Sangat Baik	
2021	90	90,8	100,88	Sangat Baik	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “**Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan**” adalah sebesar 93.2. Indikator kegiatan “**Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan**” pada tahun 2021 memiliki target sebesar 90 sedangkan tahun 2022 memiliki target sebesar 90,90 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 91.8. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 100.10%. Pada tahun 2021 realisasi indikator kegiatan tersebut sebesar 90.8 dan pada tahun 2022 realisasi mengalami kenaikan sebesar 2.31 menjadi 93.11. Pada tahun 2023 realisasi indikator kegiatan menjadi 92.35 namun masih berada diatas target yang ditentukan.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 92,7. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 93.29 telah mencapai target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 100.64% dan masuk kedalam kategori **Telah Tercapai**. Dengan capaian tersebut, Balai POM di Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan ini melalui inovasi, edukasi yang lebih luas, serta strategi komunikasi yang lebih efektif demi perlindungan masyarakat yang lebih optimal. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 21 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 "Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan"

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Tangerang, Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Sofifi. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di Balai POM di Bogor sebesar 93.2. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 93.29 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100,10% dan memperoleh kriteria Sangat Baik. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di Balai POM di Tangerang sebesar 95.20. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 96.51 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 101,38% dan memperoleh kriteria Sangat Baik. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di Balai POM di Manokwari sebesar 95.50. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 98.29 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 102,92% dan memperoleh kriteria

Sangat Baik. Sedangkan Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di Balai POM di Sofifi sebesar 96.6. Realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 98.45 dengan memperoleh persentase capaian sebesar 101.92% dan memperoleh kriteria Sangat Baik

Tabel 64 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	93.2	93.29	100,10	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	95.20	96.51	101,38	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwari	95.50	98.29	102,92	Sangat Baik	
Balai POM di Sofifi	96.6	98.45	101.92	Sangat Baik	

Berdasarkan realisasi indikator kegiatan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Balai POM di Bogor, Tangerang, Manokwari, dan Sofifi telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria **Sangat Baik**. Namun, terdapat perbedaan dalam capaian persentase masing-masing unit kerja. Balai POM di Bogor berhasil mencapai target dengan selisih realisasi yang sangat sedikit dari target awal, yaitu hanya **0.09 poin di atas target**. Meskipun pencapaiannya telah memenuhi standar **Sangat Baik**, persentase capaian 100,10% menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut agar bisa mencapai angka yang lebih tinggi dibandingkan unit kerja sejenis lainnya sedangkan Balai POM di Tangerang memiliki target lebih tinggi dibandingkan Balai POM di Bogor, dan realisasinya juga lebih tinggi dengan **selisih capaian sebesar 1.31 poin di atas target**. Persentase capaian yang mencapai **101,38%** menunjukkan efektivitas strategi komunikasi informasi dan edukasi yang sangat baik, lebih optimal dibandingkan Balai POM di Bogor.

Balai POM di Manokwari mencatat **persentase capaian tertinggi** di antara unit kerja lain dalam klaster ini. Dengan realisasi sebesar **2.79 poin di atas target**, pencapaiannya mencapai **102,92%**, menunjukkan efektivitas KIE yang luar biasa. Hal ini bisa menjadi referensi bagi unit kerja lain, termasuk Balai POM di Bogor, untuk meningkatkan strategi dan metode penyampaian informasi agar lebih efektif dan Balai POM di Sofifi juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian **1.85 poin di atas target** dan persentase capaian sebesar **101,92%**. Meskipun tidak setinggi Balai POM di Manokwari, angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan Balai POM di Bogor.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Pada tahun 2024, nilai persentase pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,10 % (**Sangat Baik**), Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2024 disebabkan antara lain oleh:

1. KIE dilaksanakan secara tatap muka (luring) dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan dengan topik Keamanan Pangan Bagi Pelaku usaha dan Anak Sekolah
2. KIE dilaksanakan secara daring melalui room zoom meeting dengan topik Kosmetik aman dan Bahaya Tramadol bagi Gen Z serta Resistensi Antimikroba dan Farmakovigilans
3. KIE dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai lintas sektor diantaranya, Organisasi Profesional seperti IDI Dinas Kesehatan, Organisasi Kemasyarakatan (Pramuka), Akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
4. KIE memanfaatkan media luar ruang (Videotron) bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor serta melalui sms blast
5. KIE menggunakan mobil laboratorium keliling dimana selain melakukan KIE petugas juga melakukan pengujian mutu pangan yang beredar di pasar, pedagang kreatif lapangan (PKL) maupun ke sekolah-sekolah.
6. KIE memanfaatkan platform media sosial yang dimiliki oleh Balai POM di Bogor yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube

Hasil penilaian efektifitas KIE pada kegiatan di atas sebagai berikut:

- Tingkat persepsi terhadap ragam kegiatan sebesar = 92.57 (sangat efektif)
- Tingkat pemahaman terhadap informasi yang diterima sebesar = 94.11 (sangat efektif)
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE sebesar = 95.30 (sangat efektif sekali)
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan sebesar = 87.08 (sangat efektif)

Berdasarkan hasil penilaian efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), capaian yang diperoleh menunjukkan efektivitas tinggi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Tingkat persepsi terhadap ragam kegiatan yang mencapai 92,57% mengindikasikan bahwa variasi metode yang digunakan dalam KIE, baik secara luring maupun daring, telah berhasil menarik perhatian audiens. Pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diterima juga sangat baik

dengan skor 94,11%, yang mencerminkan efektivitas materi edukasi dan cara penyampaiannya. Selain itu, tingkat persepsi terhadap manfaat program yang mencapai 95,30% menunjukkan bahwa KIE bukan hanya memberikan informasi tetapi juga mampu mendorong perubahan sikap masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan. Namun, tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan yang berada di angka 87,08%, meskipun tergolong sangat efektif, masih lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Ini mengindikasikan adanya peluang untuk meningkatkan daya tarik materi edukasi agar lebih relevan dan menarik bagi masyarakat luas. Untuk meningkatkan efektivitas KIE ke depannya, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan, seperti :

1. Inovasi dalam metode penyampaian informasi perlu terus dikembangkan, seperti penggunaan media interaktif, infografis, dan video pendek yang lebih menarik bagi generasi muda. Pemanfaatan platform digital harus semakin dioptimalkan, mengingat tren penggunaan media sosial yang terus meningkat.
2. Perluasan kolaborasi dengan komunitas, sekolah, dan dunia usaha dapat memperluas cakupan KIE serta memastikan pesan yang disampaikan lebih tepat sasaran. KIE berbasis komunitas dan keterlibatan tokoh lokal serta penggunaan budaya dan Bahasa daerah dapat menjadi strategi untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menerapkan informasi yang diberikan.

Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas KIE perlu dilakukan dengan mengukur dampak jangka panjang dari program ini, seperti perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan obat dan makanan yang lebih aman. Penyusunan materi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap segmen masyarakat juga dapat meningkatkan minat mereka terhadap informasi yang diberikan. Dengan demikian, BPOM di Bogor dapat mempertahankan bahkan meningkatkan efektivitas KIE, tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat menuju konsumsi obat dan makanan yang lebih aman dan bertanggung jawab.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Pada tahun 2024 BPOM di Bogor memiliki program / kegiatan KIE yang menunjang pencapaian sasaran kegiatan. Program / kegiatan KIE tersebut mencakup sebagai berikut:

1. KIE ke pasar, sekolah-sekolah dan pedagang kreatif lapangan (PKL) dengan menggunakan mobil laboratorium keliling, Dimana petugas selain melakukan KIE tatap muka ke para pedagang dan komunitas sekolah juga melakukan pengujian mutu pangan secara sederhana, yaitu menggunakan test kit 4 bahan berbahaya seperti boraks, rhodamine B, Methanil yellow dan Formalin.
2. KIE tatap muka permintaan pihak ketiga sebagai narasumber, baik dari Akademisi maupun OPD yang berwenang.

3. KIE Daring dengan tema “Ancaman Madol” terhadap Gen Z bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah II dan IDI Kabupaten Bogor.
4. KIE Daring dengan tema ““Janji Kosmetik yang Melejit, Bisa Bahaya di Kulit!” bekerjasama dengan IDI Kabupaten Bogor
5. KIE secara daring dengan tema terkait farmakovigilans dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
6. KIE tatap muka dengan tema “Sosialisasi Keamanan Pangan (4 Bahan Berbahaya dan cekKLIK) bekerjasama dengan Pramuka Kwarcab Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.
7. KIE Obat Aman dan Publikasi penerimaan CPNS 2025 bekerjasama dengan Universitas UI Kota Depok
8. KIE melalui Dialog Interaktif bekerjasama dengan RRI Kota Bogor dengan mengangkat tema Depot jamu aman atau tidak serta Inovasi GROW. Selain itu dialog interaktif juga dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi, DPMPTSP Kabupaten Bogor dan Kementerian Agama.
9. KIE melalui media sosial dengan tema konten seputar Keamanan Obat dan Makanan“ yang diunggah pada media sosial BPOM di Bogor seperti instagram, facebook, twitter dan youtube.
10. KIE Luring mengenai Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha UMKM bekerjasama dengan LKST IPB University
11. KIE Luring terkait Cegah Penyalahgunaan Obat dan Resistensi antiMikroba ke sekolah-sekolah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok/Puskesmas Kecamatan Sawangan.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, pencapaian indikator kinerja Balai POM di Bogor sebesar 100,10% mencerminkan efektivitas program edukasi yang dijalankan sangat efektif. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai pendekatan KIE yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pedagang pasar, pelajar, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. KIE tatap muka menggunakan mobil laboratorium keliling menjadi salah satu kegiatan yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan ini karena selain memberikan edukasi langsung, juga melakukan pengujian mutu pangan secara sederhana. Hal ini meningkatkan kesadaran masyarakat secara langsung terhadap bahaya bahan berbahaya dalam makanan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti akademisi, OPD, IDI, serta institusi pendidikan, memperluas cakupan dan meningkatkan kredibilitas pesan yang disampaikan.

KIE daring juga menjadi faktor pendukung utama dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Tema seperti “Ancaman Madol” terhadap Gen Z, “Janji Kosmetik yang Melejit, Bisa Bahaya di Kulit!”, serta Monitoring Efek Samping Obat (MESO) memberikan wawasan penting mengenai keamanan produk yang sering digunakan oleh masyarakat. Selain itu, strategi komunikasi

melalui media sosial semakin memperkuat pesan edukasi, terutama bagi generasi muda yang aktif menggunakan platform digital. Dialog interaktif di RRI dan kerja sama dengan Dinas Kominfo, DPMPTSP, dan Kementerian Agama menambah jangkauan informasi yang lebih luas dan terintegrasi dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah. KIE yang menasar UMKM dan sekolah-sekolah juga menunjukkan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan dan mencegah penyalahgunaan obat.

Meskipun program KIE telah menunjukkan efektivitas tinggi, beberapa kendala masih menjadi tantangan dalam implementasi program tersebut, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran

- Penggunaan mobil laboratorium keliling memerlukan biaya operasional yang cukup besar, termasuk pemeliharaan alat uji dan ketersediaan test kit.
- Keterbatasan jumlah personel BPOM di Bogor dalam menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

2. Tantangan dalam KIE Daring

- Partisipasi dalam KIE daring masih bervariasi, terutama pada kelompok masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi atau memiliki keterbatasan akses internet.
- Interaksi dalam sesi daring kurang maksimal dibandingkan dengan tatap muka, sehingga efektivitas penyampaian pesan edukasi perlu ditingkatkan dengan metode yang lebih interaktif.

3. Pemahaman Masyarakat yang Beragam

- Tidak semua masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang sama terkait keamanan pangan dan obat, terutama pedagang kecil dan komunitas dengan tingkat literasi rendah.
- Masih ada resistensi dari sebagian pelaku usaha yang enggan mengubah praktik usahanya meskipun telah mendapatkan edukasi.

4. Keterbatasan Jangkauan Media Sosial

- Meskipun media sosial efektif, masih ada sebagian masyarakat yang tidak aktif di platform digital, terutama kalangan lansia dan pedagang tradisional.
- Media sosial tidak selalu menampilkan semua konten yang diunggah kepada seluruh pengikutnya secara otomatis, sehingga diperlukan strategi promosi tambahan agar konten KIE dapat menjangkau lebih banyak orang/peminat.

Untuk meningkatkan efektivitas program KIE di masa mendatang, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Mobil Laboratorium Keliling

- Menambah frekuensi kegiatan di daerah dengan tingkat risiko tinggi terhadap penggunaan bahan berbahaya.

- Mengembangkan program pelatihan bagi komunitas lokal agar dapat melakukan pengujian sederhana secara mandiri.
2. **Peningkatan Interaksi dalam KIE Daring**
- Menggunakan metode gamifikasi atau kuis interaktif agar peserta lebih terlibat.
 - Mengadakan sesi diskusi langsung dengan narasumber untuk meningkatkan engagement.
3. **Segmentasi Program Berdasarkan Target Audiens**
- Menyusun modul edukasi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing kelompok masyarakat (misalnya, materi khusus untuk pedagang, pelajar, atau ibu rumah tangga).
 - Menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk memperkuat dampak edukasi di tingkat lokal.
4. **Strategi Digital Marketing untuk Media Sosial**
- Berkolaborasi dengan influencer atau komunitas yang memiliki audiens relevan agar pesan KIE lebih luas diterima.
5. **Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan**
- Melakukan survei kepuasan dan efektivitas program KIE secara berkala untuk mengukur dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat.

G. **INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA**

Informasi laporan kinerja dapat menjadi bahan evaluasi untuk di tahun selanjutnya serta merupakan landasan perencanaan dan pengambilan keputusan.

H. **TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)**

Tabel 65 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan "

No	Rekomendas i	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 66 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	130.720,000	130.472.909	99,81	126,58	0,01	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,01 pada akhir tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dan perwujudan upaya peningkatan kemandirian masyarakat akan produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

3.3.2. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan Anak Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh anak sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau ecommerce. Ruang lingkup sekolah yang diintervensi mulai SD/MI/SLB, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Anak Usia Sekolah merupakan target primer dari program PJAS. Agar lebih komprehensif, sasaran kegiatan yang disusun juga melibatkan komunitas sekolah lainnya seperti Kepala Sekolah, Guru, Orang tua siswa dan Pedagog PJAS sebagai target sekunder.

BPOM di Bogor merupakan Loka POM di Kabupaten Bogor yang naik klasifikasi menjadi Balai POM, sehingga tahapan PJAS Aman untuk Balai Baru sesuai dengan Pedoman PJAS Aman adalah terdiri atas 6 tahapan (tidak termasuk tahap pengawalan), yaitu sebagai berikut:

- 1. Advokasi lintas sektor PJAS
- 2. Sosialisasi Keamanan Pangan
- 3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
- 4. Pemberian paket edukasi keamanan pangan
- 5. Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah
- 6. Sertifikasi sekolah dengan PJAS aman

Tujuan dari program PJAS Aman ini adalah meningkatnya keamanan, mutu dan gizi pangan jajanan yang dikonsumsi anak sekolah, meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku anak sekolah dalam memilih pangan aman, bermutu dan bergizi serta mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan keamanan pangan.

Program PJAS aman ini merupakan pertama kalinya dilakukan oleh BPOM di Bogor. Target PJAS Aman tahun 2024 adalah 6 sekolah di 1 kota/kab yaitu di Kota Bogor. Ke emam sekolah ini antara lain : SD Kawungluwuk, SDN Purbasari, SMPN 4, SMPN 6, SMAN 9 dan SMKN 3. Seluruh tahapan intervensi program PJAS telah dilaksanakan mulai dari advokasi lintas sektor sampai dengan sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman.

Dari ke 6 sekolah yang telah diintervensi keamanan pangan PJAS nya memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat sekolah dengan PJAS Aman. Diharapkan sekolah yang telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman dapat secara berkesinambungan melaksanakan program ini dan menginisiasi inovasi inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah senior maupun junior (siswa sekolah) dalam menyebarkanluaskannya ke sekolah-sekolah yang belum diintervensi keamanan pangan PJAS nya. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang. Persentase progres capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah tercapai yaitu 100% atau 6 sekolah yang menjadi target intervensi telah mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman dan tersertifikasi adalah 6 sekolah. Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS Aman dan tersertifikasi adalah 6 sekolah dan Persentase progres capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah tercapai yaitu 100% dengan kriteria baik.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2021 - 2024)

Program PJAS Aman BPOM di Bogor tahun 2024 dilaksanakan di Kota Bogor terhadap 6 target sekolah yang diintervensi. Persentase progres capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah tercapai yaitu 100% atau 6 sekolah yang menjadi target intervensi telah mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman. Program PJAS Aman yang dilaksanakan oleh BPOM di Bogor **baru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2024**, sehingga tidak ada data pembandingan dari tahun-tahun sebelumnya

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR DOKUMEN RENSTRA (2021 - 2024)

Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman yang dilaksanakan oleh Balai POM di Bogor pada tahun 2024 merupakan program baru yang dilaksanakan di tahun 2024 ini. Karena merupakan program baru, maka tidak tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra)

BPOM 2021–2024 dan tidak memiliki target yang dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra 2021 - 2024 tersebut.

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Perbandingan realisasi jumlah sekolah dengan PJAS Aman tahun 2024 dengan balai sejenis dan target nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 64 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “JUMLAH SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN PROGRES SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	6	6	100	Baik	
Balai POM di Tangerang	4	4	100	Baik	
Balai POM di Manokwari	64	64	100	Baik	
Balai POM di Sofifi	82	82	100	Baik	

Pada tahun 2024, Balai POM di Bogor berhasil melaksanakan program PJAS Aman di **6 dari 6 sekolah target** (100%). Jika dibandingkan dengan unit kerja sejenis seperti BPOM di Tangerang, BPOM di Manokwari, dan BPOM di Sofifi, terdapat variasi dalam jumlah sekolah yang diintervensi, meskipun semua unit kerja mencapai target 100%.

Balai POM di **Tangerang** melaksanakan program PJAS Aman di **4 dari 4 sekolah target**, jumlah yang lebih kecil dibandingkan Bogor, namun tetap menunjukkan capaian yang optimal. Sementara itu, BPOM di **Manokwari** berhasil mengimplementasikan program di **64 dari 64 sekolah target**, yang jauh lebih besar dibandingkan Bogor dan Tangerang. Hal yang sama terjadi pada BPOM di **Sofifi**, yang mencatat realisasi tertinggi dengan **82 dari 82 sekolah target**, menjadikannya unit kerja dengan cakupan sekolah terbanyak dalam program PJAS Aman tahun 2024 dalam klaster sejenisnya.

Dari analisis ini, terlihat bahwa meskipun Balai POM di Bogor, Tangerang, Manokwari, dan Sofifi sama-sama mencapai target 100%, terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah sekolah yang dijangkau. Realisasi ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing UPT. Target nasional merupakan target kumulatif dari seluruh UPT BPOM di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Program PJAS Aman yang dilaksanakan oleh Balai POM di Bogor pada tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil karena seluruh tahapan intervensi telah terlaksana dengan baik di enam sekolah target, yaitu SD Kawungluwuk, SD Purbasari Gunung Batu, SMPN 4, SMPN 6, SMAN 9, dan SMKN 3. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama, seperti sinergi lintas sektor yang kuat, kesiapan sekolah dalam menerima program, serta keterlibatan aktif para kader keamanan pangan sekolah. Advokasi lintas sektor yang dilakukan di awal program berperan penting dalam memastikan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah, sehingga implementasi program berjalan lancar.

Selain itu, keberhasilan juga didukung oleh metode sosialisasi yang efektif, di mana seluruh siswa, guru, dan pengelola kantin diberikan edukasi terkait keamanan pangan secara komprehensif. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran mereka terhadap bahaya pangan tidak aman serta pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan dalam pengolahan makanan. Pemberian paket edukasi keamanan pangan juga menjadi faktor pendukung keberlanjutan program, karena menyediakan alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan dalam jangka panjang oleh sekolah.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program PJAS Aman, salah satunya adalah keterbatasan cakupan intervensi. Dengan hanya enam sekolah yang menjadi target pada tahun 2024, masih banyak sekolah di Kota Bogor yang belum tersentuh program ini. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah keberlanjutan kader keamanan pangan sekolah. Meskipun kader telah dibentuk dan dilatih, tantangan terbesar adalah memastikan mereka tetap aktif dalam menjalankan tugasnya setelah program selesai. Kurangnya sistem monitoring yang berkelanjutan dapat menyebabkan kader kurang termotivasi dalam menjaga keamanan pangan di sekolah.

Untuk meningkatkan cakupan program, salah satu rekomendasi perbaikan adalah mendorong perluasan target sekolah pada tahun-tahun mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng lebih banyak mitra, seperti organisasi masyarakat dan sektor swasta, guna mereplikasi program PJAS Aman. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan media digital juga dapat menjadi solusi untuk menjangkau lebih banyak sekolah melalui sosialisasi daring atau modul edukasi berbasis digital.

Dalam aspek keberlanjutan kader keamanan pangan sekolah, diperlukan sistem monitoring yang lebih terstruktur. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun jejaring kader

keamanan pangan antar-sekolah yang difasilitasi oleh Balai POM di Bogor. Dengan adanya forum komunikasi yang aktif, kader dapat saling berbagi pengalaman, tantangan, serta solusi dalam menjaga keamanan pangan di sekolah masing-masing. Selain itu, perlu ada insentif atau penghargaan bagi sekolah dan kader yang menunjukkan kinerja terbaik dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan dampak program PJAS Aman dan menjadikan keamanan pangan sebagai budaya yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Keberhasilan program PJAS Aman di Balai POM Bogor tidak terlepas dari beberapa program dan kegiatan yang telah dirancang secara sistematis. Salah satu kegiatan yang memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan program adalah **advokasi lintas sektor**. Advokasi ini memastikan adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah. Dengan adanya komitmen bersama, implementasi program menjadi lebih mudah karena semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya keamanan pangan di sekolah.

Selain advokasi, kegiatan **sosialisasi keamanan pangan** yang dilakukan kepada seluruh elemen sekolah juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan pengelola kantin serta pedagang mengenai bahaya bahan berbahaya dalam pangan serta langkah-langkah pencegahannya. Dengan adanya edukasi ini, kesadaran dan kepedulian sekolah terhadap keamanan pangan meningkat, sehingga mereka lebih proaktif dalam mengawasi dan menjaga kualitas pangan di lingkungan sekolah.

Kegiatan **bimbingan teknis untuk kader keamanan pangan sekolah** juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan program. Kader yang telah dibentuk diberikan pelatihan tentang cara mengidentifikasi pangan berbahaya, cara menyampaikan edukasi kepada teman sebaya, serta bagaimana melakukan monitoring sederhana terhadap makanan yang dijual di kantin sekolah. Dengan adanya kader ini, pengawasan pangan di lingkungan sekolah menjadi lebih efektif karena dilakukan secara langsung oleh komunitas sekolah itu sendiri.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program. Salah satunya adalah **monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah** yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun kader telah dibentuk dan dilatih, tanpa sistem monitoring yang baik, efektivitas peran mereka dalam jangka panjang bisa berkurang. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang dapat memastikan kader tetap aktif dalam menjalankan tugasnya, misalnya dengan melakukan evaluasi berkala atau memberikan penghargaan bagi kader yang berprestasi.

Kegiatan terakhir yang menjadi indikator keberhasilan program adalah **sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman**. Sertifikasi ini menjadi bentuk pengakuan bagi sekolah yang telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa sekolah yang sudah mendapatkan sertifikasi tetap menjaga komitmennya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme re-evaluasi atau pembinaan lanjutan bagi sekolah yang telah mendapatkan sertifikasi untuk memastikan keberlanjutan program yaitu melalui tahapan pengawasan di tahun 2025.

Berdasarkan analisis ini, upaya perbaikan ke depan yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, memperluas cakupan sekolah sasaran, serta meningkatkan keterlibatan komunitas dan orang tua dalam program PJAS Aman. Dengan adanya strategi yang lebih terarah, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi keamanan pangan anak usia sekolah di Kota Bogor.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja program PJAS Aman ini menjadi acuan penting dalam perencanaan program PJAS di tahun-tahun berikutnya. Melalui analisis pencapaian target, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas setiap tahapan program, laporan ini dapat digunakan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam memperluas cakupan sekolah sasaran. Data yang dikumpulkan dari evaluasi program juga menjadi dasar dalam mengembangkan kebijakan serta menyesuaikan metode intervensi agar lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kondisi di lapangan. Dengan adanya laporan ini, perencanaan program PJAS tahun mendatang dapat lebih terarah, berbasis bukti, dan memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan keamanan pangan di sekolah.

Selain sebagai acuan perencanaan, laporan ini juga memiliki manfaat lain, seperti menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan dalam mengukur efektivitas program dan memberikan rekomendasi perbaikan. Laporan ini dapat digunakan oleh Balai POM di Bogor untuk memperkuat advokasi kepada pemerintah daerah dan mitra terkait dalam mendapatkan dukungan lebih lanjut, baik dalam bentuk kebijakan maupun alokasi sumber daya. Selain itu, laporan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi terkait keamanan pangan sekolah, serta menjadi referensi bagi Organisasi Perangkat daerah yang ingin mengadopsi pendekatan serupa dalam program PJAS Aman. Dengan demikian, laporan kinerja ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi hasil kerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong keberlanjutan dan pengembangan program PJAS secara lebih luas.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 65 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman "

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 66 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Jumlah sekolah dengan PJAS Aman	130.720,000	130.472.909	99,81	26,58	,01	100% Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 0,01 pada tahun 2024. Kriteria efisien dalam hal ini terdapat kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan pencapaian nilai Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.

J. Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman pada tahun 2024a

3.3.3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang dilaksanakan untuk memberikan intervensi keamanan pangan ke desa/kelurahan dengan tahapan program sebagai berikut :

- 1. Advokasi Kelembagaan Desa
- 2. Pengadaan Produk Informasi Keamanan Pangan
- 3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa
- 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas
- 5. Fasilitasi Keamanan Pangan
- 6. Pengawasan Keamanan Pangan pre dan post intervensi
- 7. Monitoring dan evaluasi
- 8. Lomba Desa

Program Desa Pangan aman ini merupakan pertama kalinya dilakukan oleh BPOM di Bogor. Target Desa Pangan Aman tahun 2024 adalah 1 Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Batu di Kota Bogor. Seluruh tahapan intervensi program Desa Pangan Aman telah dilaksanakan mulai dari advokasi lintas sektor sampai dengan pengajuan mengikuti lomba Pangan Aman.

Program Desa Pangan aman yang dilakukan oleh Balai POM di Bogor tergolong berhasil. Keberhasilan program ini diukur dengan terpenuhinya beberapa indikator yaitu:

- 1. Kader Keamanan Pangan Desa yang aktif
- 2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri Persentase progres capaian jumlah Desa Pangan Aman telah tercapai 100%.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Jumlah Desa Pangan Aman adalah 1 (satu) Desa/Kelurahan. Realisasi jumlah Desa Pangan Aman adalah 1(satu) Desa/Kelurahan dan Persentase progres capaian jumlah Desa Pangan aman telah tercapai yaitu 100% dengan kriteria baik.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2021 - 2024)

Program Desa Pangan Aman BPOM di Bogor tahun 2024 dilaksanakan di Kelurahan Gunung Batu di Kota Bogor. Persentase progres capaian jumlah Desa Pangan aman telah tercapai yaitu 100%. Program Desa Pangan Aman yang dilaksanakan oleh BPOM di Bogor baru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2024, sehingga tidak ada data pembandingan dari tahun-tahun sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR DOKUMEN RENSTRA (2021 - 2024)

Program Desa Pangan Aman yang dilaksanakan oleh Balai POM di Bogor pada tahun 2024 merupakan Target baru yang dilaksanakan di tahun 2024 ini. Karena merupakan Target baru, maka tidak tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2021–2024 dan tidak memiliki target yang dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra 2021 - 2024 tersebut.

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Perbandingan realisasi jumlah Desa Pangan Aman tahun 2024 dengan balai sejenis dan target nasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 64 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “JUMLAH DESA PANGAN AMAN”
TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS**

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN PROGRES SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	1	1	100	Baik	
Balai POM di Tangerang	1	1	100	Baik	
Balai POM di Manokwari	21	21	100	Baik	
Balai POM di Sofifi	31	31	100	Baik	

Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu upaya BPOM dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan keamanan pangan di tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan data tahun 2024, BPOM di Bogor berhasil merealisasikan target 1 desa dari 1 desa yang direncanakan (100%). Capaian ini sama dengan BPOM di Tangerang, yang juga menargetkan dan merealisasikan 1 desa (100%). Sementara itu, BPOM di Manokwari dan BPOM di Sofifi memiliki cakupan yang lebih luas, dengan realisasi masing-masing 21 desa dari 21 desa (100%) dan 31 desa dari 31 desa (100%).

Dari perbandingan ini, terlihat bahwa secara persentase, semua unit kerja berhasil mencapai target 100%. Namun, dari segi jumlah desa yang didampingi, BPOM di Manokwari dan BPOM di Sofifi memiliki cakupan program yang jauh lebih luas dibandingkan BPOM di Bogor dan BPOM di Tangerang. Realisasi ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing UPT. Target nasional merupakan target kumulatif dari seluruh UPT BPOM di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

**E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN
PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)**

Program Desa Pangan Aman yang dijalankan oleh BPOM di Bogor pada tahun 2024 merupakan target capaian baru yang tidak termasuk dalam perencanaan strategis sebelumnya. Meskipun demikian, BPOM di Bogor berhasil mencapai target yang ditetapkan, yaitu 1 desa dari 1 desa yang direncanakan. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang baik antara BPOM dengan pemerintah daerah serta adanya keterlibatan masyarakat dalam proses edukasi dan pemantauan pangan. Faktor lain yang turut mendukung keberhasilan adalah adanya komitmen dari pihak desa untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara berkelanjutan.

Namun, cakupan program di BPOM di Bogor masih tergolong kecil. Untuk meningkatkan cakupan

dan efektivitas program ke depan, BPOM di Bogor perlu menyusun strategi jangka panjang dengan menargetkan lebih banyak desa yang dapat dibina dalam satu tahun atau mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh BPOM. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, dan kelompok masyarakat peduli pangan. Dengan adanya kerja sama lintas sektor, sumber daya yang terbatas dapat dioptimalkan sehingga program dapat berjalan lebih luas dan efektif.

Selain itu, penting bagi BPOM di Bogor untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program tahun 2024. Evaluasi ini mencakup efektivitas edukasi kepada masyarakat, peran serta kader pangan aman desa, serta dampak jangka panjang dari intervensi yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, strategi perbaikan dapat disusun agar kendala yang ditemukan di tahun ini tidak terulang di tahun-tahun mendatang.

Sebagai rekomendasi perbaikan, BPOM di Bogor juga dapat mengembangkan modul pelatihan yang lebih sistematis bagi kader keamanan pangan desa. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, kader dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai keamanan pangan dan mampu mengedukasi masyarakat secara mandiri. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi berbasis digital untuk monitoring dan evaluasi, juga dapat membantu dalam mengawasi implementasi program secara lebih efisien.

Secara keseluruhan, program Desa Pangan Aman di BPOM di Bogor telah berjalan dengan baik meskipun masih memiliki ruang untuk pengembangan. Dengan memperluas cakupan desa, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas edukasi dan monitoring, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap keamanan pangan masyarakat di wilayah Bogor.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Keberhasilan program Desa Pangan Aman di BPOM di Bogor tidak terlepas dari implementasi berbagai kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Salah satu kegiatan utama yang berkontribusi terhadap pencapaian target adalah advokasi lintas sektor yang dilakukan sejak tahap awal program. Dengan adanya advokasi ini, BPOM di Bogor berhasil mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, perangkat desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Selain advokasi, kegiatan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat desa juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pertemuan langsung dengan masyarakat, penggunaan media cetak dan digital, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan Kader dalam menyebarkan informasi mengenai pangan aman. Dengan

meningkatnya kesadaran masyarakat, penerapan standar keamanan pangan di tingkat desa menjadi lebih mudah dan efektif.

Pembentukan dan pembinaan kader keamanan pangan desa juga menjadi salah satu strategi utama dalam program ini. Kader pangan aman bertugas untuk melakukan pemantauan dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya jumlah kader yang dibentuk, sehingga cakupan edukasi dan pemantauan di desa belum maksimal.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi program adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki BPOM di Bogor dalam menjalankan program ini. BPOM di Bogor masih perlu mengoptimalkan strategi agar dapat meningkatkan cakupan intervensi di tahun-tahun mendatang. Tantangan lain yang dihadapi adalah memastikan keberlanjutan program agar desa yang telah mendapatkan intervensi tetap konsisten dalam menerapkan prinsip keamanan pangan dan rencana aksi yang telah dibuat tim keamanan pangan desa.

Secara keseluruhan, program Desa Pangan Aman di BPOM di Bogor telah menunjukkan hasil yang positif, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal cakupan dan efektivitas intervensi. Dengan memperkuat sinergi lintas sektor, memperbanyak kader keamanan pangan, serta mengoptimalkan sistem pemantauan, program ini dapat lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah Bogor.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja Desa Pangan Aman berperan sebagai acuan utama dalam perencanaan program di tahun-tahun mendatang. Melalui evaluasi capaian dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program, BPOM di Bogor dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pembinaan desa. Data dalam laporan ini juga menjadi dasar dalam menetapkan target desa baru, menyesuaikan metode intervensi yang lebih tepat, serta memperkuat kerja sama lintas sektor guna memastikan keberlanjutan program. Dengan adanya laporan kinerja, perbaikan dalam aspek advokasi, sosialisasi, serta pembinaan kader pangan aman dapat lebih terarah dan berdampak lebih luas bagi masyarakat.

Selain sebagai acuan perencanaan, laporan kinerja ini juga memiliki manfaat lain, seperti menjadi bahan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya dan anggaran yang lebih optimal. Selain itu, laporan ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program, sehingga dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, dapat terus diperkuat. Dengan adanya pemanfaatan laporan kinerja secara maksimal, program Desa Pangan Aman di Bogor dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat desa dalam jangka panjang.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 65 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Jumlah Desa Pangan Aman "

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 66 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Jumlah Desa Pangan Aman "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Jumlah sekolah dengan PJAS Aman	130.720,000	130.472.909	99,81	126,58	0,01	100% (Efisien)

3.3.3. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar baik dari sisi suply maupun demand. Tahapan dalam program pasar aman berbasis komunitas ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Survei pasar
- 2. Advokasi lintas sektor
- 3. Bimtek petugas/pengelola pasar
- 4. Penyuluhan Pedagang pasar
- 5. Kampanye Keamanan pangan di pasar
- 6. Sampling dan pengujian tahap 1 dan 2

Target jumlah pasar yang diintervensi oleh Balai POM di Bogor pada tahun 2024 sebanyak 1 pasar. Indikator keberhasilan pasar pangan aman berbasis komunitas diukur dengan antara lain:

- 1. Pembentukan kader pasar yang mampu melakukan pengawasan mandiri terhadap bahan berbahaya maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya melalui

sampling dan pengujian sampel dengan menggunakan test kit serta memberikan KIE kepada komunitas pasar

2. Tersedia data hasil sampling dan pengujian di pasar yang menjadi target intervensi sebagai pasar pangan aman berbasis komunitas dan tersedia di aplikasi sipaman

Program pasar pangan aman berbasis komunitas ini merupakan pertama kalinya dilakukan oleh BPOM di Bogor. Target jumlah pangan aman berbasis komunitas tahun 2024 adalah 1 pasar yaitu pasar Gunung Batu di Kota Bogor. Seluruh 100%.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Jumlah pangan aman berbasis komunitas adalah 1 (satu) pasar yaitu pasar gunung batu. Realisasi jumlah pangan aman berbasis komunitas adalah 1(satu) pasar dan Persentase progres capaian jumlah pangan aman berbasis komunitas telah tercapai yaitu 100% dengan kriteria baik.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2021 - 2024)

Program pangan aman berbasis komunitas BPOM di Bogor tahun 2024 dilaksanakan di Pasar Gunung Batu di Kota Bogor. Persentase progres capaian jumlah pangan aman berbasis komunitas telah tercapai yaitu 100%. Program pangan aman berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh BPOM di Bogor **baru dilaksanakan pertama kali pada tahun 2024**, sehingga tidak ada data pembandingan dari tahun-tahun sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET AKHIR DOKUMEN RENSTRA (2021 - 2024)

Program pangan aman berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh Balai POM di Bogor pada tahun 2024 merupakan Target baru yang dilaksanakan di tahun 2024 ini. Karena merupakan target baru, maka tidak tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2021–2024 dan tidak memiliki target yang dapat dibandingkan dengan dokumen Renstra 2021 - 2024 tersebut.

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Perbandingan realisasi jumlah pangan aman berbasis komunitas tahun 2024 dengan balai sejenis dan target nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 64 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “JUMLAH pangan aman berbasis komunitas” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN PROGRES SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	1	1	100	Baik	
Balai POM di Tangerang	1	1	100	Baik	
Balai POM di Manokwari	10	10	100	Baik	
Balai POM di Sofifi	10	10	100	Baik	

Dalam program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2024, BPOM di Bogor berhasil merealisasikan target satu pasar dari satu yang direncanakan, setara dengan capaian BPOM di Tangerang yang juga mencapai target satu pasar. Sementara itu, BPOM di Manokwari dan BPOM di Sofifi menunjukkan capaian yang lebih tinggi, masing-masing berhasil merealisasikan 10 pasar dari target 10. Perbandingan ini menunjukkan bahwa unit kerja di wilayah Manokwari dan Sofifi memiliki cakupan yang lebih luas dalam program ini dibandingkan dengan Bogor dan Tangerang. Realisasi ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing UPT.

BPOM di Bogor, meskipun baru pertama kali melaksanakan program ini pada tahun 2024, telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Ke depan, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan program, termasuk kemungkinan menambah jumlah pasar yang menjadi sasaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan partisipasi aktif komunitas dalam mewujudkan pasar yang lebih aman dan sehat.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Berdasarkan data hasil pengujian bahan berbahaya di Pasar Gunung Batu, terjadi penurunan jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS), 4 sampel TMS dari 43 sampel pada pengujian tahap 1 menjadi 2 sampel TMS dari 45 sampel pada pengujian tahap 2. Penurunan ini

menunjukkan adanya peningkatan efektivitas program *Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas*, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- **Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha**
Sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada pedagang dan pemasok bahan pangan di pasar terbukti meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan dan regulasi yang berlaku.
- **Penguatan Sistem Pengawasan dan Pembinaan**
Adanya pengujian berkala terhadap bahan pangan serta tindak lanjut dari hasil pengujian mendorong para pedagang untuk lebih selektif dalam memilih produk yang mereka jual.
- **Kolaborasi dengan Stakeholder Terkait**
Dukungan dari komunitas, dinas terkait, serta BPOM dalam memberikan bimbingan teknis dan pengawasan turut berkontribusi pada peningkatan kualitas bahan pangan yang beredar di pasar.

Namun, meskipun terjadi perbaikan, masih terdapat 2 sampel yang tidak memenuhi syarat pada tahap 2. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan atau masih ditemukannya bahan berbahaya dalam pangan meliputi:

- **Kurangnya Kepatuhan dari Sebagian Pedagang atau Pemasok**
Masih ada kemungkinan beberapa pedagang atau pemasok yang belum sepenuhnya mematuhi standar keamanan pangan.
- **Keterbatasan dalam Pengawasan dan Penegakan Regulasi**
Belum optimalnya sistem pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar dapat menjadi kendala dalam memastikan seluruh bahan pangan yang beredar aman dan bebas dari bahan berbahaya.
- **Faktor Eksternal Seperti Rantai Pasok**
Beberapa produk yang masuk ke pasar berasal dari pemasok yang belum sepenuhnya terawasi, sehingga masih ada potensi masuknya produk yang mengandung bahan berbahaya.

Untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja program, diperlukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan, antara lain:

1. **Peningkatan Edukasi dan Pendampingan Berkelanjutan oleh pengelola pasar yang telah dilatih oleh BPOM**
 - Mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang dan pemasok mengenai bahaya bahan berbahaya dalam pangan serta konsekuensi hukum bagi pelanggar.
 - Memberikan refreshment kembali kepada pedagang mengenai cara memilih dan menyimpan bahan pangan yang aman.

2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengujian
 - Menambah frekuensi pengujian bahan pangan secara acak di pasar.
 - Memperluas cakupan pengawasan hingga ke rantai pasok untuk memastikan bahan pangan yang masuk ke pasar sudah memenuhi standar keamanan pangan.
3. Peningkatan Kerja Sama dengan Stakeholder
 - Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memperkuat regulasi dan sanksi bagi pelanggar.
 - Melibatkan komunitas pedagang dan konsumen dalam pengawasan keamanan pangan melalui program pelaporan mandiri.
4. Penerapan Insentif bagi Pedagang yang Patuh
 - Memberikan penghargaan atau sertifikasi kepada pedagang yang konsisten menjual produk yang aman.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Keberhasilan program *Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas* di Pasar Gunung Batu, yang ditandai dengan penurunan jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) dari 4 sampel pada tahap 1 menjadi 2 sampel pada tahap 2, tidak lepas dari beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dan Peran Aktif Pengelola Pasar

- Pengelola pasar berperan sebagai fasilitator dalam mengoordinasikan pedagang dan memastikan kebijakan keamanan pangan diterapkan di lingkungan pasar.
- Pengelola pasar secara aktif membantu dalam sosialisasi dan memantau kepatuhan pedagang terhadap regulasi keamanan pangan.

2. Kolaborasi dengan Lintas Sektor (BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Komunitas Konsumen)

- BPOM dan Dinas Kesehatan berperan dalam melakukan pengujian bahan pangan serta memberikan edukasi kepada pedagang mengenai bahaya bahan berbahaya.
- PD Pasar mendukung program ini dengan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas pasar, termasuk dalam aspek keamanan pangan.
- Komunitas konsumen yang sadar akan keamanan pangan turut mendorong pedagang untuk menjual produk yang lebih aman.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi kepada Pedagang dan Konsumen

- Program ini melibatkan penyuluhan kepada pedagang terkait bahaya penggunaan bahan berbahaya dalam pangan serta alternatif bahan yang lebih aman.

- Konsumen juga diberikan edukasi agar lebih selektif dalam memilih produk pangan,

4. Monitoring dan Pengujian Rutin terhadap Bahan Pangan

- Dilakukan pengujian berkala terhadap bahan pangan yang dijual di pasar untuk memastikan kepatuhan pedagang terhadap standar keamanan pangan.
- Hasil pengujian yang menunjukkan penurunan jumlah sampel TMS menjadi bukti bahwa sistem pengawasan yang diterapkan efektif dalam mengurangi peredaran bahan pangan berbahaya.

5. Tindak Lanjut dan Evaluasi Berkelanjutan

- Setelah pengujian, dilakukan evaluasi dan tindakan lanjutan, seperti peringatan atau pembinaan terhadap pedagang yang masih menjual bahan pangan tidak aman.
- Adanya sistem feedback dari pedagang dan konsumen membantu dalam meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Program *Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas* telah menunjukkan hasil yang positif berkat adanya komitmen kuat dari pengelola pasar serta kerja sama lintas sektor. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program ini, antara lain:

- ◆ Meningkatkan edukasi dan pendampingan bagi pedagang yang belum patuh agar kesadaran dan kepatuhan mereka semakin meningkat.
- ◆ Meningkatkan insentif bagi pedagang yang patuh, misalnya dengan memberikan sertifikat pasar sehat atau penghargaan kepada pedagang yang telah konsisten menjual produk yang aman.

Dengan langkah-langkah tersebut, program ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat serta menciptakan pasar yang lebih aman dan sehat.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja *Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas* merupakan dokumen evaluasi yang berisi data dan analisis mengenai penerapan standar keamanan pangan di pasar tradisional. Laporan ini mencakup aspek kepatuhan pedagang, efektivitas pendampingan oleh komunitas, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi program. Informasi yang disajikan dalam laporan ini menjadi dasar penting bagi pemangku kepentingan dalam menilai keberhasilan program serta merancang strategi perbaikan yang lebih efektif.

Pemanfaatan laporan kinerja ini sangat berguna untuk perencanaan program di tahun berikutnya, terutama dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan diperkuat. Dengan adanya evaluasi berbasis data, pemerintah daerah, BPOM, serta dinas terkait dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti peningkatan edukasi bagi pedagang, penyediaan sarana uji pangan, atau

penguatan sistem pengawasan berbasis komunitas. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung keberlanjutan program.

Selain untuk kepentingan internal, laporan kinerja juga bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan. Dengan adanya transparansi informasi, pedagang dan konsumen dapat lebih memahami standar pangan aman dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan pasar yang sehat. Pemanfaatan laporan ini secara optimal diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pasar tradisional yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga menjadi tempat yang aman bagi masyarakat dalam memperoleh bahan pangan yang sehat dan berkualitas.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 65 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas "

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 66 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	130.720,000	130.472.909	99,81	126,58	0,01	100% (Efisien)

SASARAN KEGIATAN KE-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 indikator. Berdasarkan perhitungan ke-dua indikator tersebut, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 120% dengan kriteria pencapaian **Sangat Baik**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-4 tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 67 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4 TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120	Sangat Baik	
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120	Sangat Baik	

3.1.4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 68 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2024

Indikator Kinerja	TAHUN 2023		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	KATEGORI	
	Target	Realisasi			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sebesar 50%. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 60%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 120 % dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 69 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

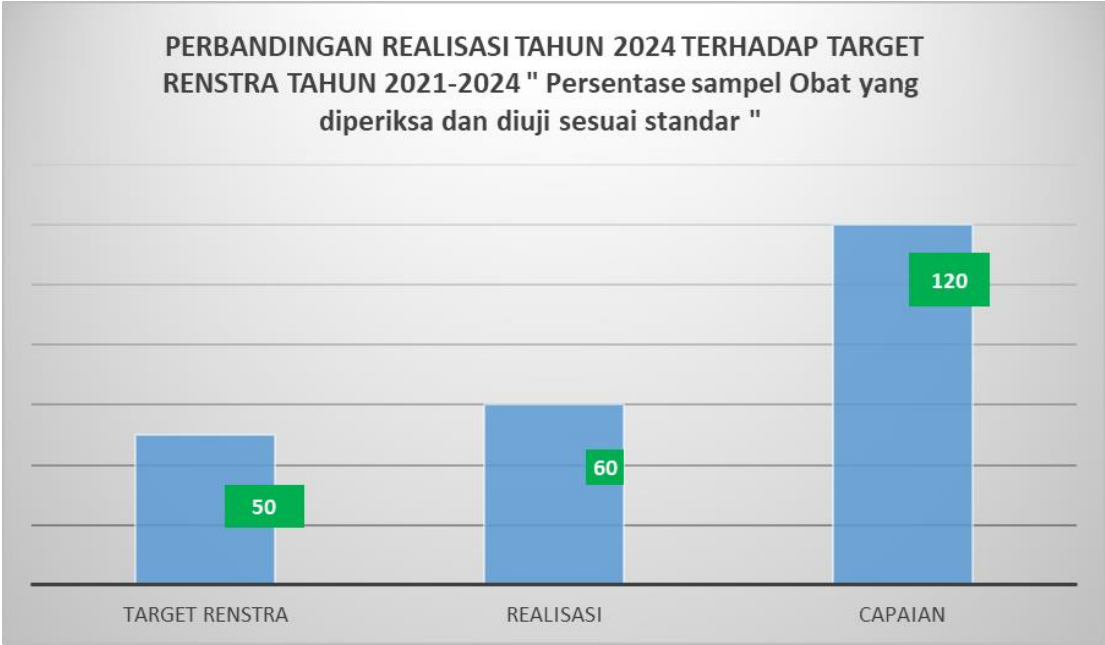
TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	50	60	120	Sangat Baik	

2023	50	60	120	Sangat Baik	
2022	50	50	100	Baik	
2021	50	77,02	120	Sangat Baik	

Pada tahun 2021-2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “**Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**” adalah sebesar 50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 60%. Realisasi dari 2023 hingga 2024 konsisten pada 120.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 60% sudah melampaui target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 120% dan masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui**. Masih diperlukan upaya guna mempertahankan pencapaian target Renstra di tahun 2024. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 22 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar "

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Manokwari, Balai POM di Tangerang dan Balai POM di Sofifi. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai POM di Bogor sebesar 50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 60% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 120% dan

memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai POM di tangerang sebesar 50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 50% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria **Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai POM di Manokwari sebesar 50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 50% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria **Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai POM di Sofifi sebesar 50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 50% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria **Baik**.

Tabel 70 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	50	60	120	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	50	50	100	Baik	
Balai POM di Manokwari	50	50	100	Baik	
Balai POM di Sofifi	50	50	100	Baik	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Pada tahun 2024 Balai POM di Bogor masih dalam pengembangan laboratorium. Sehingga Sampel yang telah dilakukan sampling telah dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman, dilaporkan tepat waktu serta diserahkan ke Balai penguji sesuai regionalisasi laboratorium Semarang sesuai perencanaan. Sepanjang tahun 2024 Balai POM Bogor telah melakukan sampling dan pengawasan penandaan terhadap 462 sampel sediaan farmasi yang terdiri dari 131 sampel dari target 127 sampel obat (103%) , 100 sampel Obat Tradisional dari target 95 sampel (105%), 30 dari 25 sampel Suplemen Kesehatan (120%), dan 8 dari 7 sampel Obat Kuasi (114%). Sehingga penyebabnya tercapainya kategori Baik adalah terdapat komoditi dengan jumlah sampel melampaui target yang ditetapkan, ketepatan waktu pengiriman sampel sesuai timeline serta ketepatan pengambilan keputusan evaluasi penandaan yang baik.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang dapat mendukung capaian kinerja obat yang diuji sesuai standar adalah:

- Pengadaan sampling yang dilakukan oleh dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun pada bulan Januari sesuai kesepakatan regionalisasi Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik
- Melakukan peningkatan kompetensi petugas sampling dan penandaan, melalui pengembangan kompetensi dengan cara mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pusat pada tahun berjalan maupun desiminasi oleh pegawai yang telah kompeten serta melakukan pelatihan secara mandiri melalui media online yang telah disediakan oleh PPSDM dan kedeputian terkait.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Informasi laporan kinerja dapat menjadi bahan evaluasi untuk periode selanjutnya

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 71 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 72 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	159.101.000	156.624.329	98,44	120	0,22	95% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 0,22 (95%) dengan kriteria efisien.

3.1.4.1 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 73 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2024

Indikator Kinerja	TAHUN 2024		Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	KATEGORI	
	Target	Realisasi			
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar ditetapkan sebesar 50% dengan persentase realisasi sebesar 60% dengan nilai capaian sasaran sebesar 120% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

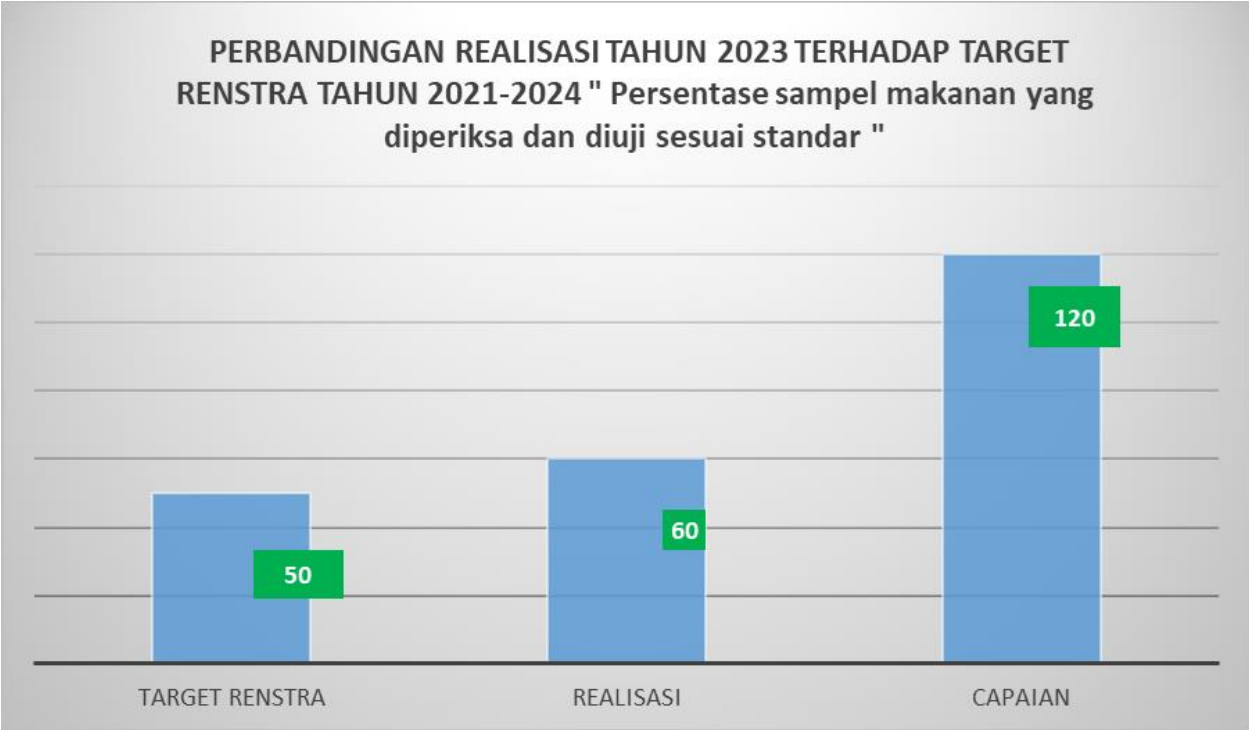
Tabel 74 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	50	60	120	Sangat Baik	
2023	50	60	120	Sangat Baik	
2022	50	50	100	Baik	
2021	50	68,75	120	Sangat Baik	

Pada tahun 2021-2023 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “**Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**” adalah sebesar 50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 60%. Pada tahun 2021 realisasi indikator kegiatan tersebut sebesar 68,75% dan pada tahun 2022 realisasi-nya sebesar 50%.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 60% sudah melampaui target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 120% dan masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui**. Masih diperlukan upaya guna mempertahankan pencapaian target Renstra di tahun 2024. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 23 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar "

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Tangerang, Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Sofifi. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai POM di Bogor sebesar 50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 60% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 120% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai POM di Tangerang sebesar 50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 50% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria **Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai POM di Manokwari sebesar 50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 50% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria **Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai POM di Sofifi sebesar 50%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 50% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dan memperoleh kriteria **Baik**.

Tabel 75 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	50	60	120	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	50	50	100	Baik	
Balai POM di Manokwari	50	50	100	Baik	
Balai POM di Sofifi	50	50	100	Baik	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Hingga akhir tahun 2024 seluruh target sampel makanan telah terpenuhi dimana sejumlah 124 sampel dari target 120 sampel (103%) tersebut telah dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman, dilaporkan tepat waktu serta diserahkan ke laboratorium sesuai perencanaan. Oleh karena sasaran strategis tersebut diukur dari kuantitas dan kualitas maka ketepatan waktu maka pelaksanaan sampling dilakukan mulai dari bulan Januari dan sampling dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah dibuat menjadi faktor utama dalam keberhasilan kinerja serta kualitas meliputi ketepatan pengambilan keputusan dalam melakukan evaluasi penandaan.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sampling yang dilakukan sesuai dengan pedoman dilanjut dengan evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik tidak lain ditunjang oleh kompetensi petugas yang terlatih dengan mengikuti forum komunikasi sampling dari kedeputan baik secara luring maupun daring.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Informasi laporan kinerja dapat menjadi bahan evaluasi untuk periode selanjutnya.

H. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 76 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	selesai	-	-	-	-

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 77 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	44.278.000	43.485.415	98,21	120	0,22	95% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 0,22 (95%) dengan kriteria efisien.

SASARAN KEGIATAN KE-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

Tabel 78 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5 TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	100	120	Sangat Baik	

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =
$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 79 *CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” Tahun 2024*

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bogor	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	100	120	Sangat Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 82%. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT pada tahun 2024 sebesar 100% dengan rincian jumlah perkara *carry over* sebanyak 1 perkara di tahun 2019 (sampai pada tahap P21) dan 1 perkara di tahun 2021 sampai tahap

perkara P21 serta 1 perkara di tahun 2022 sampai tahap SPDP (proses terakhir DPO). Perkara tahun 2024 menargetkan sebanyak 2 perkara, dengan realisasi kedua target pada akhir bulan Desember kedua target dapat diselesaikan 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 120% dengan kriteria Sangat baik.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

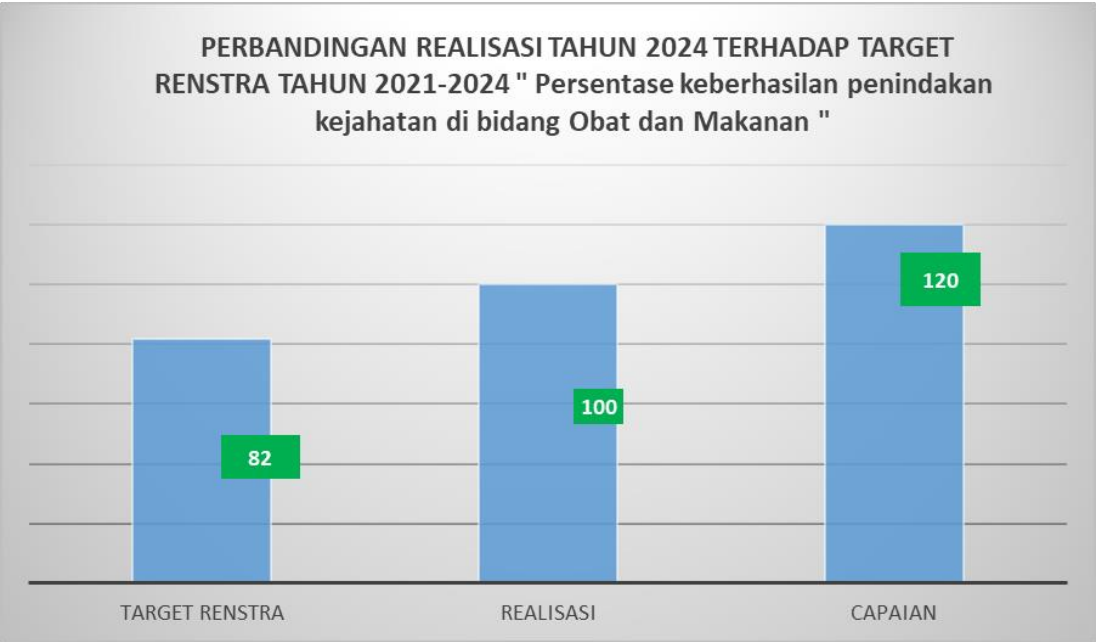
Tabel 80 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	82	100	120	Sangat Baik	
2023	78	83,13	106,58	Sangat Baik	
2022	74	55,63	75,18	Cukup	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “**Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**” adalah sebesar 82%. Indikator kegiatan “**Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**” pada tahun 2022 memiliki target sebesar 74% sedangkan tahun 2023 memiliki target sebesar 78%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 83,13%. Pada tahun 2022 realisasi indikator kegiatan tersebut sebesar 55,63% dan pada tahun 2023 realisasi mengalami penurunan sebesar 27,5% menjadi 83,13%.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 82%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 100% sudah melampaui target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 120% dan masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui**. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 24 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan "

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Tangerang, Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Sofifi. Target Nasional yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Badan POM sebesar 97%.

Tabel 81 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024 untuk Balai POM di Bogor dan Balai POM di Sofifi telah mencapai target Nasional, sedangkan balai sejenis lainnya belum mencapai target nasional.

Indikator Kinerja		Realisasi			Indikator Kinerja
Persentase Obat yang memenuhi syarat	BPOM di Tangerang	BPOM di Manokwari	Balai POM di Sofifi	BPOM di Bogor	Persentase Obat yang memenuhi syarat
	85,02	92,78	98,24	100	
Target Nasional	97%				Target Nasional

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai POM di Bogor sebesar **82%**. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar **100%** dengan memperoleh persentase capaian sebesar **120%** dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Adapun penyebab keberhasilan dari kenaikan realisasi target indikator kegiatan tersebut :

1. Pengaruh percepatan proses penyidikan disebabkan oleh PPNS Balai POM di Bogor sudah dilantik sebanyak 2 (dua) orang dan Bimbingan Teknis Pendukung Tugas PPNS diikuti oleh 1 (satu) orang.
2. Kolaborasi antara PPNS Balai POM di Bogor dan Balai Besar POM di Bandung yang solid.
3. Proses penindakan target pertama dan target kedua mencapai tahap 2.
4. Komunikasi yang intensif dilakukan petugas tim penindakan dengan pihak yang terlibat diantaranya keberhasilan pada tahap 2 dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Metro Kota Depok. Serta keberhasilan pada tahap 2 dengan Kejaksaan Negeri Kota Depok dan Polres Metro Kota Depok.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok oleh Kepala Balai POM di Bogor bersama dengan Tim Penindakan dalam rangka perkuatan sinergitas pengawasan obat dan makanan dari aspek penindakan.
2. Koordinasi dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Depok oleh Kepala Balai POM di Bogor bersama dengan Tim Penindakan dalam rangka percepatan proses pemberkasan menjadi tahap 2.
3. Koordinasi dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor oleh Tim Penindakan dalam rangka percepatan proses pemberkasan menjadi tahap 2.

Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja: Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke-5, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Bogor” dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Balai POM di Bogor sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1. **Penyidikan obat dan makanan**

Pada tahun 2024, jumlah realisasi capaian perkara di bidang Obat dan Makanan sebanyak 2 perkara, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 2 perkara. Selain itu terdapat 1 perkara carry over pada tahun 2019, 1 perkara carry over pada tahun 2021, dan 1 perkara carry over pada tahun 2022 dan 2023. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Kegiatan tersebut diatas didukung dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan, informasi dan investigasi terhadap adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi yang datang dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Balai POM di Bogor, berdasarkan surat dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online.

2. **Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan**

Pada tahun 2024, terdapat 3 kegiatan yang menunjang Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, yaitu (1)Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan, (2) Penjejukan Digital Kejahatan Obat dan Makanan, dan (3) Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan.

2.1 **Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan**

Tujuan kegiatan ini bertujuan sebagai deteksi dini terhadap kerawanan kejahatan obat dan makanan yang ada di wilayah Balai POM di Bogor sehingga dapat dilakukan pencegahan terjadinya kejahatan obat dan makanan.

2.2 Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan

Implementasi kegiatan ini berupa pemantauan terhadap obat dan makanan yang beredar melalui media daring, seperti situs, website, sosial media, e-commerce yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Kemudian membuat daftar rekomendasi tautan (*link*) komoditi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut untuk diajukan *takedown* ke pusat, dan beberapa link yang belum di-*takedown* ditindaklanjuti dengan kegiatan penelusuran informasi melalui kegiatan profiling kejahatan obat dan makanan.

2.3 Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan

Forum koordinasi ini bertujuan untuk tukar informasi dan pengalaman antar petugas intelijen dan PPNS Badan POM. Pengalaman dan informasi setiap petugas akan berbeda-beda tergantung tantangan yang dihadapi di lapangan dan di masing-masing daerahnya. Dengan adanya forum koordinasi ini, diharapkan dapat menjadi wadah untuk bertukar pengalaman dan informasi dalam melaksanakan kegiatan intelijen dan penindakan di Badan POM. Adapun kegiatan yang sudah terlaksana sebagai berikut : Kegiatan Advokasi dari Kejaksaan Agung, Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, dan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja sangat penting untuk mengetahui kemajuan kinerja Penindakan Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut sebagai koreksi kekurangan untukantisipasi kegiatan penindakan tahun anggaran berikutnya. sehingga hambatan dalam mencapai kinerja yang memuaskan dapat dicegah dan tidak berulang kembali di tahun anggaran berikutnya.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 82 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan "

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Akan dilakukan kegiatan operasi penindakan target kedua pada TW 3 2024 sesuai dengan hasil rapat internal dengan Kepala Balai POM di Bogor.	Selesai	-	-	-	Balai POM di Bogor telah dilakukan kegiatan operasi penindakan target kedua pada tanggal 6 Agustus 2024. Diterbitkannya SPDP dengan nomor SPDP/02/VIII/2024/BPOM-PPNS tanggal 6 Agustus 2024, dilanjutkan hingga proses tahap 2 dengan nomor surat tanggal 29 Oktober 2024.

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 83 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	238.348.000	237.292.995	99,56	106,58	0,07	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2024 adalah sebesar 0,07 (100%) dengan kriteria efisien.

SASARAN KEGIATAN KE-6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 indikator. Berdasarkan perhitungan ke-dua indikator tersebut, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 97,19% dengan kriteria pencapaian **Baik**. Rincian capaian kinerja sasaran kegiatan ke-6 tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah:

Tabel 84 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6 TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	75	76	101,33	Sangat Baik
	Nilai AKIP UPT	82,20	77,57	94,37	Cukup

3.1.6.1 RB Indeks RB UPT

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI (PMPZI) menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM, yang kemudian nilai PMPZI ini dihitung sebagai nilai indeks RB BB/BPOM.

Tabel 85 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase implementasi rencana aksi RB” Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	75	76	101,33	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 75, Realisasi Indeks RB BPOM di Bogor adalah 76. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 101,33% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

indikator sasaran ini baru ada di tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Jika dibandingkan Realisasi Indeks RB BPOM di Bogor pada tahun 2024 dengan target nasional (89,5), maka pencapaian kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai POM di Manokwari (98,20%), Balai POM di Sofifi (94,63%), Balai POM di Bogor (84,92%), Balai POM di Tangerang (82.98%).

Tabel 87 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase implementasi rencana aksi RB” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET NASIONAL	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	89,5	76	84,92	Cukup	
Balai POM di Tangerang	89,5	74,27	82,98	Cukup	
Balai POM di Manokwari	89,5	87,89	98,20	Cukup	
Balai POM di Sofifi	89,5	84,69	94,63	Cukup	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Balai POM di Bogor telah melakukan pembangunan ZI secara konsisten dan berproses mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PANRB. Balai POM di Bogor juga telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi ZI.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

- Rencana Aksi Agen Perubahan BPOM di Bogor dalam upaya menginternalisasi setiap inovasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Balai POM di Bogor merupakan upaya komitmen dalam pembangunan Zona Integritas

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Informasi laporan kinerja dapat menjadi bahan evaluasi untuk periode selanjutnya.

H. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 88 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase implementasi rencana aksi RB "

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan monitoring pelaksanaan target rencana RB agar berjalan sesuai dengan timeline-nya.	Selesai	-	-	-	-

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 89 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase implementasi rencana aksi RB "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Indeks RB UPT	502.596.000	499.216.087	99,33	100	0,01	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Indeks RB UPT pada tahun 2024 adalah sebesar 0,01 (100%) dengan kriteria efisien.

3.1.6.2 NILAI AKIP UPT

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Loka POM di Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI.

Tabel 90 Kategori Penilaian SAKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90	AA	Sangat memuaskan
2	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4	> 60 s.d. 70	B	Baik
5	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7	< 30	D	Kurang

Tabel 91 *CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “NILAI AKIP UPT” Tahun 2024*

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	NILAI AKIP UPT	82,20	77,57	94,37	Cukup	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target NILAI AKIP UPT ditetapkan sebesar 82,20%. Realisasi NILAI AKIP UPT yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah 77,57%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 94,37% dengan kriteria **Cukup**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

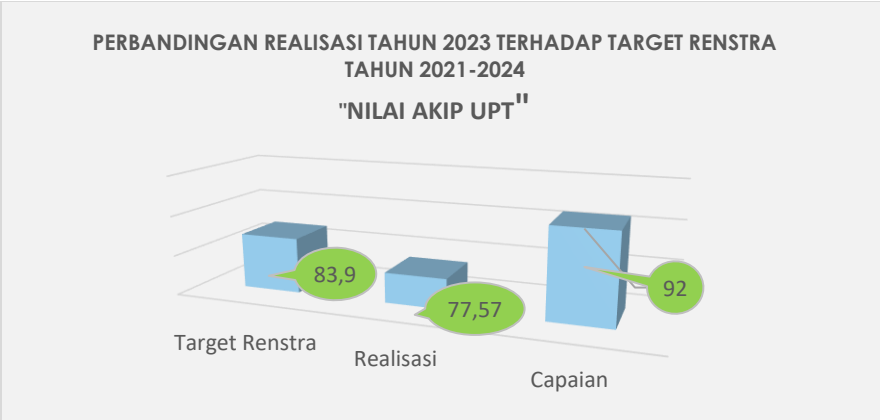
Tabel 92 *CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “NILAI AKIP UPT” TAHUN 2023 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA*

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	82,20	77,57	94,37	Cukup	
2023	80,06	75,42	93,57	Cukup	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “NILAI AKIP UPT” adalah sebesar 82,20%. Indikator kegiatan “NILAI AKIP UPT” pada tahun 2022 memiliki target sebesar 80,06%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2023 adalah sebesar 77,57%, meningkat sebesar 2,15% dari tahun 2022 dengan realisasi indikator kegiatan tersebut sebesar 75,42%.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 83,9%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 77,57% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 92% dan masuk kedalam kategori **Akan Tercapai**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 28 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024
" NILAI AKIP UPT "

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan NILAI AKIP UPT dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Jember dan Balai POM di Surakarta. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan NILAI AKIP UPT di Balai POM di Bogor sebesar 82,20%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 77,57% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 94,37% dan memperoleh kriteria **Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan NILAI AKIP UPT di Balai POM di Jember sebesar 82,20%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 76,19% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 92,69% dan memperoleh kriteria **Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan NILAI AKIP UPT di Balai POM di Surakarta sebesar 82,20%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 71,15% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 85,56% dan memperoleh kriteria **Baik**.

Tabel 93 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “NILAI AKIP UPT” TAHUN 2023
DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	82,20	77,57	94,37	Cukup	
Balai POM di Jember	82,20	76,19	92,69	Cukup	
Balai POM di Surakarta	82,20	71,15	85,56	Cukup	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Nilai AKIP tidak tercapai dengan Nilai pencapaian sasaran sebesar 94.37% (**Cukup**) dikarenakan adanya peraturan baru terkait penerapan penilaian AKIP yaitu Keputusan Kepala BPOM No 311 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Disamping itu pada pedoman

penilaian baru komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen sehingga penurunan nilai capain kinerja akan berpengaruh spesifik pada nilai total hasil evaluasi SAKIP.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Terkait tidak tercapainya capaian kinerja indikator Nilai “AKIP UPT” kedepannya diharapkan adanya studi tiru kepada UPT Badan POM dan atau Instansi Pemerintah lainnya yang mempunyai nilai SAKIP kategori A serta adanya komunikasi intensif dengan Inspektorat Utama Badan POM selaku pembina SAKIP Badan POM.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Informasi laporan kinerja dapat menjadi bahan evaluasi untuk periode selanjutnya.

H. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 94 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " NILAI AKIP UPT "

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 95 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " NILAI AKIP UPT "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Nilai AKIP UPT	502.596.000	499.216.087	99,33	100	-0,05	75% (Tidak Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Nilai AKIP UPT pada tahun 2023 adalah sebesar -0,05 (75%) dengan kriteria tidak efisien.

SASARAN KEGIATAN KE-7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Tabel 96 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7 Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
------------------	-------------------	--------	-----------	-----------	----------

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,16	87,42	96,96	Cukup	
---	--------------------------------	-------	-------	-------	-------	---

Pada tahun 2024 Balai POM di Bogor belum berhasil mewujudkan SDM BPOM Di Bogor yang berkinerja optimal dengan NPS sebesar 96,96% dengan kriteria Cukup. Di tahun 2024 ini Capaian IP ASN melalui Nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: KP.17.21.11.24.349 tanggal 26 November 2024 tentang tanggapan atas usulan perubahan target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2024 di keluarkan (di exclude) dari perhitungan NPSS.

Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Bogor

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesional ASN dilakukan secara berkala setiap tahun. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu :

- a. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot 25 %.
- b. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%.
- c. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Pengukuran IP ASN pada Balai Besar POM di Semarang dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari :

- a. Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir pegawai;
- b. Dimensi Kompetensi mengambil data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi

- pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM);
- c. Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN;
 - d. Dimensi Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Hasil yang diperoleh Balai POM di Bogor adalah

- nilai kualifikasi: 22.78
- nilai kompetensi: 34,72
- nilai kinerja: 25
- nilai disiplin: 4,92

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target Indeks Profesionalitas ASN UPT ditetapkan sebesar 90,16%. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN UPT yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 87,42%, dengan demikian persentase capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 96,96% dengan kriteria Cukup. Tidak tercapainya target dalam Indeks Profesionalitas ASN UPT ini disebabkan oleh adanya perubahan cara pengukuran IP ASN berdasarkan surat Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 97 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Profesionalitas ASN UPT” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	90,16	87,42	96,96	Cukup	
2023	85,6	90,03	105,18	Sangat Baik	
2022	85,4	85,5	100,12	Sangat Baik	
2021	85,2	84,71	99,42	Cukup	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “Indeks Profesionalitas ASN UPT” adalah sebesar 90,16%. Indikator kegiatan “Indeks Profesionalitas ASN UPT” pada tahun 2023 memiliki target sebesar 85,60%, pada tahun 2022 memiliki target sebesar 85,40%

dan target tahun 2021 sebesar 85,20%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 87,42% menurun sebesar 2,61% dari realisasi tahun 2023 sebesar 90,03%. Tahun 2022 realisasi indikator kegiatan adalah sebesar 85,50% dan pada tahun 2021 realisasi indikator kegiatan tersebut adalah 84,71%.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS/ SATU KLASSTER DAN TARGET NASIONAL

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT pada tahun 2024 sebesar 87,42 dibandingkan dengan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Badan POM RI tahun 2024 sebesar 86,98.

Berdasarkan realisasi, maka realisasi indicator secara berturut-turut dari yang tertinggi yaitu: Balai POM di Manokwari (88,18), Balai POM di Bogor (87,42), Balai POM di Sofifi (86,86), dan Balai POM di Tangerang (85,74).

Berdasarkan nilai capaian indikator kinerja secara berturut-turut dari yang tertinggi yaitu: Balai POM di Manokwari (97,76%), Balai POM di Bogor (96,92%), Balai POM di Sofifi (96,30%), dan Balai POM di Tangerang (95,06%).

Tabel 98 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Profesionalitas ASN UPT” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET NASIONAL	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	90,20	87,42	96,92	cukup	
Balai POM di Tangerang	90,20	85,74	95,06	cukup	
Balai POM di Manokwari	90,20	88,18	97,76	cukup	
Balai POM di Sofifi	90,20	86,86	96,30	cukup	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Tahun 2024, nilai pencapaian Indeks Profesionalitas ASN tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 96,96 persen (Cukup). Hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Perubahan pengukuran IP ASN berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 bahwa terdapat perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK. Serta terdapat perubahan instrument bobot dasar dimensi Kompetensi yang tidak hanya meliputi Diklat Struktural, Diklat Fungsional dan

Pengembangan Kompetensi tetapi di tahun 2024 ini menambah predikat kinerja pegawai sebagai salah satu dasar perhitungan di dimensi kompetensi;

- b. Terdapat pegawai ASN (PPPK Non-PFM jabatan arsiparis terampil) yang belum mengikuti Diklat Fungsional karena belum adanya jadwal diklat fungsional dari instansi Pembina di tahun 2024.
- c. Terdapat pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin di tahun 2024 sehingga mempengaruhi penilaian di bobot nilai disiplin.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 100 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Indeks Profesionalitas ASN UPT "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Indeks Profesionalitas ASN UPT	502.596.000	499.216.087	99,33	105,18	0,06	100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT pada tahun 2024 adalah sebesar 0,06 (100%) dengan kriteria efisien.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Terdapat penurunan capaian indikator dari tahun 2023 ke tahun 2024 disebabkan oleh:

- a. Adanya peningkatan dalam dimensi kualifikasi dari tahun 2023 sebesar 21,21 menjadi 22,78 di Tahun 2024, dikarenakan adanya peningkatan kualifikasi pegawai melalui program pendidikan baik itu tugas belajar pembiayaan BPOM dan terdapat pegawai dengan Jabatan S1 dengan jenjang jabatan keterampilan.
- b. Adanya penurunan dalam dimensi kompetensi dari tahun 2023 sebesar 38,50 menjadi 34,72 di Tahun 2024. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan instrument dalam perhitungan dimensi kompetensi dan juga karena terdapat pegawai pemangku jabatan fungsional non-PFM (arsiparis terampil) yang belum mengikuti Diklat Fungsional karena belum adanya jadwal diklat fungsional dari instansi Pembina di tahun 2024.
- c. Adanya penurunan dalam dimensi disiplin dari tahun 2023 sebesar 5 menjadi 4,92 di tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin berat yang masih berlaku di tahun 2024.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Informasi laporan kinerja dapat menjadi bahan evaluasi untuk periode selanjutnya.

H. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 99 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Indeks Profesionalitas ASN UPT "

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1		-			-	-

SASARAN KEGIATAN KE-8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Tabel 101 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA	
KEGIATAN	KINERJA	CAPAIAN				
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.	21. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	40	54,04	135,10	120	
	22. Indeks pengelolaan data dan informasi	3	3	100	100	
	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis	110	110	Sangat Baik		

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP merupakan target indikator kinerja utama pertama kalinya di Balai POM di Bogor dan ditetapkan sebesar 40%. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 54,04%, dengan demikian persentase penyesuaian capaian sasaran tersebut di atas adalah sebesar 120% dengan kriteria Sangat Baik.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 97 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP” TAHUN 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	40	54,04	120	Sangat Baik	
2023	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP” adalah sebesar 40%. Indikator kegiatan “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP” pada tahun 2023 tidak memiliki target.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP” merupakan indikator sasaran strategis yang baru bagi Balai POM di Bogor adalah sebesar 40%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 54,04% sudah mencapai target Renstra di tahun 2024, dengan penyesuaian persentase capaian 120% dan masuk kedalam kategori Tercapai/Melampaui.



Gambar 29 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP”

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Jika dibandingkan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP pada tahun 2024 dengan target nasional (91.00%), maka capaian kinerja secara berturut-turut, yaitu Balai POM di Manokwari (92,95%), Balai POM di Sofifi (63,61%), Balai POM di Bogor (59,38%), Balai POM di Tangerang (53,02%).

Tabel 98 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET NASIONAL	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)
Balai POM di Bogor	91	54,04	59,38
Balai POM di Tangerang	91	48,25	53,02
Balai POM di Sofifi	91	63,31	69,57
Balai POM di Manokwari	91	84,58	92,95

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Tahun 2024, nilai pencapaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 110 persen (Sangat Baik). Hal ini dikarenakan pengadaan alat laboratorium dan kompetensi sumber daya manusia dari pengujian. Adapun pengadaan alat laboratorium yang sudah terealisasi diantaranya :

No.	Uraian Barang	Volume
1	Thermocouple	5.0 UNIT
2	Paket Alat gelas	1.0 UNIT
3	IPAL Portable	1.0 UNIT
4	UV Lamp (366 nm)	1.0 UNIT
5	Vortex mixer	1.0 UNIT
6	Water Purifier	1.0 UNIT
7	Emergency Shower dan eye washer	1.0 UNIT
8	Dehumidifier	2.0 UNIT
9	Thermohygrometer	5.0 UNIT
10	pH meter	1.0 UNIT
11	Refrigerator dan freezer	2.0 UNIT
12	Stomacher	1.0 UNIT

13	Timbangan Top Loading Meja	1.0 UNIT
14	Inkubator 35-37 C	1.0 UNIT
15	Inkubator portable untuk bioindikator	1.0 UNIT
16	Loop Sterilizer dan kawat ose atau ose disposable	1.0 UNIT
17	Magnetic stirrer Hot plate	1.0 UNIT
18	Mikropipet 100-1000 L	2.0 UNIT
19	Oven 180-200 C	1.0 UNIT
20	Inkubator 20-25 C dan 251 C	1.0 UNIT
21	Inkubator 30 C	1.0 UNIT
22	Inkubator 32,52,5 C	1.0 UNIT
23	Colony counter	1.0 UNIT
24	Electrical Pipet Filler	2.0 UNIT
25	Alat gelas	1.0 UNIT
26	Syringe untuk KLT	2.0 UNIT
27	Blender Laboratorium	1.0 UNIT
28	TC Color File (sebagai acuan pembanding warna)	1.0 UNIT
29	Autoclave	2.0 UNIT

30	Biosafety Cabinet (BSC)	1.0 UNIT
31	Freezer	1.0 UNIT
32	Vortex Mixer	1.0 UNIT
33	Hotplate	1.0 UNIT
34	Lemari pendingin	1.0 UNIT
35	Chamber untuk KLT (20x20)	3.0 UNIT
36	Mikropipet 2-20 L	1.0 UNIT
37	Mikropipet 20-200 L	1.0 UNIT
38	Mikropipet 100-1000 L	1.0 UNIT
39	Mikropipet 1-5 mL	1.0 UNIT
40	Mikropipet 1- 10 mL	1.0 UNIT
41	Hotplate /Setrika Portable	1.0 UNIT
42	Termometer digital	1.0 UNIT
43	Automatic Desicator	1.0 UNIT
44	Timbangan analitik Meja	1.0 UNIT
45	Timbangan Top Loadingmeja	1.0 UNIT
46	Anak timbangan	1.0 UNIT
47	Chemical Storage	1.0 UNIT

48	Dehumidifier	1.0 UNIT
49	Fume Hood	1.0 UNIT
50	Hotplate stirrer	1.0 UNIT
51	Paket Microsyringe	1.0 UNIT
52	Termohigrometer	1.0 UNIT
53	Lampu UV 254 nm dan 366 nm (Kabinet)	1.0 UNIT
54	Mikropipet 1-10 mL	1.0 UNIT

Terdapat juga beberapa alat laboratorium yang diperoleh dari hibah Pusat Pengujian dan Pengembangan Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) diantaranya spektrofotometer sebanyak 1 unit, timbangan analitik sebanyak 1 unit dan chamber sebanyak 1 unit.

Adapun kompetensi sumber daya manusia fungsi pengujian memiliki latar belakang dari penempatan sebelumnya yang merupakan personil fungsi pengujian diantaranya Pusat Pengujian dan Pengembangan Obat dan Makanan Nasional (P3OMN), Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Padang, dan Balai Besar POM di Jayapura.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP yang optimal dikarenakan penilaian tertinggi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium pada unsur Persentase Pemenuhan Kompetensi (%) sebesar 92.84%. Hal ini dikarenakan latar belakang kompetensi dari personil penguji yang mumpuni dari penempatan kerja sebelumnya baik dari laboratorium penguji kimia dan mikrobiologi.

I. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Informasi laporan kinerja dapat menjadi bahan evaluasi untuk periode selanjutnya.

J. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 99 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP "

	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana a Aksi	Timeline		
	-	-	-	-	-	

J. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 100 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	2,673,724,000	2,673,482,239	99.99 %		100% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase pemenuhan laboratorium

pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP pada tahun 2024 adalah sebesar 0,06 (100%) dengan kriteria efisien.

Tabel 101 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8 Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	120	Sangat Baik	

Indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Tabel Realisasi Persentase Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	88,67	87,39	98,56%	Cukup

Indeks Kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk kesadaran yaitu Pengetahuan, Sikap dan Perilaku. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap

masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu membeli produk dengan kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep service quality yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta tindakan BPOM.

Pada akhir tahun 2024 telah diperoleh hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yaitu 87,39 terhadap target 88,67 atau dengan capaian 98,56% dan kategori Cukup. Indeks kesadaran Masyarakat terdiri dari tiga komponen pendukung yaitu nilai pengetahuan, sikap dan perilaku. Capaian nasional untuk tiga nilai tersebut adalah: nilai pengetahuan 92,85; nilai sikap 90,46 dan nilai perilaku 80,37. Dari data tersebut nampak bahwa nilai perilaku adalah yang paling rendah, artinya meskipun masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang keamanan dan mutu obat dan makanan namun belum tentu merubah perilakunya. Survey pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM bekerjasama dengan BPS.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu merupakan IKU baru bagi Balai POM di Bogor tahun 2024 ini sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2021-2023). Realisasi indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu wilayah Balai POM di Bogor tahun 2024, yaitu sebesar 87,39 dengan capaian persentase tertinggi dibanding dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) BPOM lainnya, yaitu 89,40.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Indikator Kinerja	Balai POM di Tangerang	Balai POM di Manokwari	Balai POM di Sofifi	Balai POM di Bogor
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	89,40	85,54	77,94	87,39

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Tangerang dengan realisasi 89,40. Balai POM di Bogor memiliki capaian kedua tertinggi diantara keempat unit kerja lain yang sejenis.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Balai POM di Bogor telah berhasil mencapai target indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2024. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu, antara lain :

1. Melakukan layanan informasi dan pengaduan secara tatap muka dan online. Layanan tatap muka Balai POM di Bogor meliputi layanan di kantor dan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk layanan online Balai POM di Bogor meliputi layanan whatsapp, telepon dan media sosial yaitu instagram. Pada tahun 2024, Balai POM di Bogor memberikan 941 layanan informasi dan 11 layanan pengaduan.
2. Balai POM di Bogor melakukan penyebaran informasi melalui media sosial antara lain instagram, facebook dan twitter (X). Pada tahun 2024 terdapat 460 konten yang disebar. Perolehan followers pada masing-masing media sosial pun juga menjadi faktor pendukung. Pada instagram Balai POM di Bogor memiliki 2228 pengikut, facebook memiliki 655 pengikut, twitter (X) memiliki 109 pengikut, tiktok memiliki 45 pengikut, dan youtube memiliki 46 pengikut.
3. Balai POM di Bogor melakukan penyebaran informasi melalui media cetak yaitu banner dan leaflet yang disebar pada setiap kegiatan Balai POM di Bogor. Materi yang disebar antara lain tolak gratifikasi, kenali penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada pangan, BPOM Mobile, dan alur izin edar pangan olahan BPOM.
4. Balai POM di Bogor melakukan penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media elektronik yaitu RRI Kota Bogor karena memiliki catchment area yang luas yaitu Kota dan Kabupaten Bogor. Penyebaran informasi dilaksanakan pada bulan November 2024 dengan menyebarkan materi Pengawasan Obat Bahan Alam dan Publikasi Kinerja/Publikasi Strategis.
5. Melakukan penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media luar ruang yaitu Videotron. Videotron yang digunakan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor. Titik berada di depan kantor Diskominfo di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Materi yang disampaikan adalah Profil Balai POM di Bogor, serta Cerdas

Memilih Kosmeti dan Aplikasi BPOM Mobile.

6. Melakukan penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media digital yaitu SMS blast. SMS blast berjumlah 9.040 SMS dilaksanakan dengan 2 kali penayangan yaitu awal puasa ramadhan 1445 H (25 Maret 2024) dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H (10 April 2024). Area penyebaran SMS blast meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Depok. Materi yang disebarkan adalah lakukan Cek KLIK sebelum membeli produk.

E. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 51 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja “Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu”

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
“Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu”	502.596.000	499.216.087	99,33	100	0,05	100% (Tidak Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu pada tahun 2024 adalah sebesar 0,05 (100%) dengan kriteria efisien.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu antara lain:

1. Melakukan layanan informasi dan pengaduan secara tatap muka dan online berupa telepon, whatsapp dan media sosial;
2. Melakukan penyebaran informasi melalui media sosial antara lain instagram, facebook dan twitter (X);
3. Penyebaran informasi melalui media cetak yaitu banner dan leaflet yang disebarkan pada setiap kegiatan Balai POM di Bogor;
4. Penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media elektronik yaitu RRI Kota Bogor
5. Melakukan penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media luar ruang yaitu videotron;
6. Melakukan penyebaran informasi obat dan makanan aman melalui media digital yaitu SMS blast.

G. Upaya peningkatan kinerja

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Bogor tersebut membuahkan hasil yaitu dengan

tercapainya target indeks kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan, dari target 86,67 dapat dicapai 87,39 atau dengan nilai capaian 98,56%. Upaya perbaikan/rekomendasi Balai POM di Bogor untuk meningkatkan kinerja yaitu terus menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Media dan berbagai komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi mereka. Setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selama ini Kerjasama Balai POM di Bogor dengan berbagai lintas sektor telah berjalan dengan harmonis dan dinamis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan

3.1.2.4 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel XX CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan” TAHUN 2024

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	94,60	99,32	104,99	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan sebesar 94,60 %. Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan sebesar 99,32%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 104,99% dengan kriteria Sangat Baik.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel xx CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	94,60	99,32	104,99	Sangat Baik	
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan” adalah sebesar 94,60%. Pada tahun 2021-2023, Balai POM di Bogor tidak memiliki indikator kegiatan “Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan” . Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 99,32 % dengan persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 104,99% dengan kriteria **Sangat Baik**.

c. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Indikator “Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan” tidak terdapat pada Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 .

d. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Sofifi, Balai POM di Manokwari dan Balai POM di Tangerang. Target yang ditetapkan pada indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Bogor sebesar 94,60%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 99,32% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 104,99% dan

memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Sofifi sebesar 99,1%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 99,74% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 100,65% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Manokwari sebesar 92,3%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 97,06% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 105,16% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Target yang ditetapkan pada indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Tangerang sebesar 88%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 98,46% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 111,89% dan memperoleh kriteria **Sangat Baik**. Bila dibandingkan dengan Balai dalam satu kluster maka Balai POM di Tangerang mendapat nilai capaian tertinggi sebesar 111,89% diikuti oleh Balai POM di Manokwari sebesar 105,16%, Balai POM di Bogor sebesar 104,99% dan Balai POM di 100,65%.

Tabel XX PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “INDIKATOR INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	94,60	99,32	104,99	Sangat Baik	
Balai POM di Sofifi	99,1	99,74	100,65	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwari	92,3	97,06	105,16	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	88,0	98,46	111,89	Sangat Baik	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Balai POM di Bogor telah melaksanakan penyebaran survei IKEPU secara berkala kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi baik berupa konsultasi CAPA, Denah, Pengajuan IP CPPOB, CPOTB, CDOB, CPKB, pelaksanaan bimbingan teknis, dan pendampingan onsite/online kepada pelaku usaha. Bimbingan teknis yang pernah dilakukan oleh Balai POM di Bogor selama 2024 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Mei 2024 dan November 2024. Pendampingan on site/online ke pelaku usaha dilakukan secara rutin. Setiap selesai dilakukan konsultasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha, petugas Balai POM di Bogor meminta pelaku usaha melakukan pengisian survei di link ikepu yang telah tersedia. Terdapat juga PIC di Balai POM di Bogor yang bertugas untuk memonitoring hasil survei IKEPU yang masuk setiap bulannya dari hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh PUSAKOM.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja, terdiri dari:

- 1. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang dilakukan 2 (dua) kali pada Tahun 2024
- 2. Membuka layanan konsultasi secara rutin untuk pengajuan denah, CAPA, dan pengajuan IP CPPOB, CPKB, CPOTB, CDOB secara online dan offline
- 3. Penunjukkan PIC untuk memonitoring hasil survei IKEPU yang masuk ke sistem ikepu.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilakukan secara berkala setiap bulan. Berdasarkan hasil monev disusun rencana aksi dan tindak lanjut untuk bulan berikutnya. Hal ini membantu pencapaian dalam target kinerja. Informasi laporan kinerja 2024 bisa menjadi pertimbangan untuk penentuan target di tahun 2025.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel XX Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan. "

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
----	-------------	---------------	--	--

		Selesai	Belum		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	-

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 61 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	36.319.000	35.220.000	96,97	126,58	0,31	95% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2023 adalah sebesar 0,31 (95%) dengan kriteria efisien.

3.1.2.4 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik Balai Besar POM di Bogor merupakan salah satu indikator kinerja yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Indeks ini dihitung oleh Inspektorat BPOM berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap responden yang telah menerima layanan BPOM di Bogor.

IKM menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana layanan publik yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat, baik dari aspek kecepatan, kemudahan, keterbukaan informasi, profesionalisme petugas, hingga kenyamanan dalam memperoleh layanan. Hasil survei ini tidak hanya berfungsi sebagai ukuran kinerja, tetapi juga menjadi dasar bagi BPOM dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap layanan yang diberikan.

Indikator Kinerja ini dihitung oleh berdasarkan hasil survei terhadap responden yang telah menerima 9 (sembilan) layanan dengan jumlah responden sebagai berikut :

No	View	Layanan	Target	Responden
1		Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan	0	1
2		Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan	0	
3		Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	3	3
4		Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	4	4
5		Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)	4	4
6		Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika	7	7
7		Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	45	45
8		Pengujian Obat dan Makanan	0	1
9		Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	131	131

Tabel CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “ Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT ” **TAHUN 2024**

INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2024		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
	TARGET	REALISASI			
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	89.75	91.60	102.06	Sangat Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM pada tahun 2024 merupakan **indikator baru**, sehingga belum memiliki data pembanding dari tahun sebelumnya. Namun, hasil pengukuran tahun ini memberikan gambaran awal mengenai

kualitas pelayanan yang diberikan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan BPOM. Dari hasil survei yang dilakukan, target IKM tahun 2024 sebesar **89.75**, sementara realisasi yang dicapai mencapai **91.60**, dengan persentase capaian **102.06%**. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan publik yang diberikan oleh UPT BPOM mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat, dengan tingkat kepuasan yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Sebagai indikator baru, hasil ini menjadi dasar penting bagi BPOM untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di tahun-tahun berikutnya. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan guna memastikan keberlanjutan peningkatan mutu layanan, termasuk aspek kemudahan akses, kecepatan, transparansi, dan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

.B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel xx CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “IIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	89.75	91.60	102.06	Sangat Baik	
2023	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator *IIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT*” adalah sebesar 94,60%. Pada tahun 2021-2023, Balai POM di Bogor tidak memiliki indikator kegiatan “*IIndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT*” . Indeks realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 91.60 dengan persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 102.06% dengan kriteria **Sangat Baik**. Dengan demikian Nilai indeks *Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT*” tidak memiliki nilai pembanding

c. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Indikator “*Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT*” tidak terdapat pada Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 .

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tahun 2024 menjadi tahun pertama bagi beberapa UPT dalam mengukur indikator ini, sehingga hasilnya dapat dijadikan tolok ukur awal untuk perbaikan layanan ke depan.

Berikut perbandingan **target, realisasi, dan persentase capaian** IKM pada beberapa UPT BPOM di tahun 2024:

Tabel 59 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT” TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	89.75	91.60	102.06	Baik	Hijau
Balai POM di Sofifi	93.74	94.94	101.28	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwari	99.50	99.68	101.28	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	92.50	95.96	103.74	Sangat Baik	

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa **seluruh UPT BPOM berhasil mencapai dan melampaui target IKM yang telah ditetapkan**. BPOM di **Tangerang** mencatat capaian tertinggi dengan **103.74%**, diikuti oleh **Bogor (102.06%)**, **Sofifi (101.28%)**, dan **Manokwari (100.18%)**.

Meskipun Balai POM di Manokwari memiliki **target tertinggi (99.50)**, realisasi yang dicapai juga cukup tinggi (99.68), dengan **persentase capaian 100.18%**. Sementara itu, Balai POM di **Bogor memiliki target terendah (89.75)**, namun **realisasi yang dicapai cukup baik (91.60) dengan persentase capaian 102.06%**, menunjukkan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi dan melampaui ekspektasi masyarakat.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen BPOM dalam meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh unit kerja. Evaluasi lebih lanjut akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini, terutama dengan memperkuat aspek responsivitas, kemudahan akses, profesionalisme petugas, serta transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Capaian **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik UPT BPOM pada tahun 2024** menunjukkan hasil yang positif dengan seluruh unit kerja dalam 1 klaster, berhasil mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti peningkatan kualitas layanan, penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi terkait layanan BPOM yang semakin luas juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

Namun, meskipun terjadi peningkatan, terdapat beberapa tantangan yang dapat memengaruhi capaian IKM di masa mendatang. Beberapa faktor yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan layanan publik antara lain masih adanya keluhan terkait kecepatan pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa unit kerja, serta perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan BPOM. Selain itu, tantangan dalam merespons jumlah permohonan layanan yang terus meningkat juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas pelayanan.

Untuk **meningkatkan dan mempertahankan kinerja layanan publik**, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi berkala terhadap petugas pelayanan juga menjadi faktor penting. Penyediaan sarana prasarana yang lebih memadai, terutama di unit kerja yang masih mengalami keterbatasan fasilitas, juga menjadi prioritas dalam mendukung optimalisasi layanan.

Selain perbaikan internal, **penguatan komunikasi dengan masyarakat juga menjadi aspek krusial**. BPOM perlu terus melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai prosedur dan mekanisme layanan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan. Penyediaan kanal pengaduan yang lebih responsif serta pemanfaatan media sosial dan platform digital dalam menyebarluaskan informasi layanan juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan untuk perbaikan layanan ke depan.

Dengan berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan **kinerja layanan publik UPT BPOM dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang**. Evaluasi berkala terhadap IKM serta penerapan inovasi berbasis teknologi akan menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelayanan agar tetap sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dalam memberikan layanan yang profesional, transparan, dan responsif, BPOM dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan bermanfaat.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kebhasilan pencapaian **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik UPT BPOM** tidak terlepas dari berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas layanan. Beberapa inisiatif yang berkontribusi dalam pencapaian ini antara lain **layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), GROW BPOM, PINTAR UMKM, dan POLITE @ BPOM Bogor**. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, serta pemahaman masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh BPOM, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepuasan pengguna layanan.

Salah satu program yang mendukung peningkatan kepuasan masyarakat adalah **layanan BPOM di Mal Pelayanan Publik (MPP)**. Dengan adanya layanan di MPP, masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses layanan perizinan dan konsultasi terkait produk obat dan makanan dalam satu lokasi yang terintegrasi dengan instansi lain. Keberadaan MPP mempercepat proses pelayanan serta memberikan kenyamanan bagi pengguna, sehingga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan BPOM.

Program **GROW BPOM (Green Research and Opportunities With BPOM)** juga berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha di sektor pangan dan farmasi. Melalui program ini, BPOM berperan aktif dalam mendukung inovasi dan pengembangan produk yang lebih aman, ramah lingkungan, serta berdaya saing tinggi. Pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik antara BPOM dan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan.

Selain itu, program **PINTAR UMKM (Pendampingan Seputar UMKM di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok)** turut berperan dalam peningkatan indeks kepuasan layanan publik. Program ini memberikan pendampingan bagi UMKM dalam memahami regulasi keamanan produk, proses perizinan, serta peningkatan kualitas produk mereka. Pendekatan yang lebih personal melalui pendampingan langsung ini memudahkan UMKM dalam mengakses layanan BPOM, sehingga mengurangi hambatan birokrasi yang sering menjadi keluhan.

Program **POLITE @ BPOM Bogor (Pojok Literasi Elektronik @ BPOM di Bogor)** juga menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian IKM. Dengan adanya fasilitas literasi elektronik ini, masyarakat dapat mengakses informasi yang lebih luas mengenai regulasi, keamanan pangan dan obat, serta prosedur layanan BPOM secara mandiri. Penyediaan informasi yang mudah diakses ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan BPOM, yang pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepuasan mereka.

Meskipun program-program ini memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan untuk mengoptimalkan manfaatnya. Beberapa aspek yang dapat diperbaiki antara lain peningkatan sosialisasi program agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkannya, serta peningkatan kapasitas layanan untuk memastikan responsivitas yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam program-program layanan, BPOM dapat mempertahankan dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat di tahun-tahun mendatang.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik UPT BPOM** merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hasil survei yang dilakukan oleh Inspektorat BPOM menjadi dasar dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan dan memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas berbagai program serta kebijakan yang telah diterapkan.

Pemanfaatan laporan kinerja IKM memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, laporan ini digunakan sebagai **bahan evaluasi kinerja pelayanan**, sehingga dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti kecepatan layanan, aksesibilitas, transparansi, serta responsivitas petugas dalam menangani keluhan masyarakat. Dengan data yang diperoleh, unit layanan dapat mengambil langkah korektif yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Kedua, laporan ini menjadi **dasar perumusan kebijakan dan strategi peningkatan layanan di masa mendatang**. Melalui analisis hasil IKM, BPOM dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, termasuk pengembangan program berbasis digitalisasi, optimalisasi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penguatan pendampingan bagi pelaku usaha melalui program seperti **GROW BPOM** dan **PINTAR UMKM**. Dengan demikian, perbaikan layanan tidak hanya bersifat reaktif terhadap keluhan masyarakat tetapi juga bersifat proaktif dalam menciptakan pengalaman layanan yang lebih baik.

Ketiga, laporan kinerja IKM berfungsi sebagai **alat pengukuran akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik**. Dengan menyampaikan hasil capaian IKM kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan terkait, BPOM menunjukkan komitmen dalam memberikan layanan yang berkualitas serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hal ini juga mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan obat dan makanan yang dijalankan oleh BPOM.

berkontribusi dalam membangun sistem pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan berbasis data akan menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat di masa mendatang.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 60 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT."

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
-	-	-	-	-	-	

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (TOLONG DIISI TU)

Tabel 61 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	36.319.000	35.220.000	96,97	126,58	0,31	95% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2023 adalah sebesar 0,31 (95%) dengan kriteria efisien.

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Bogor yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup pada komponen yaitu:

1. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email dan dashboard BCC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun indlidu.

Penilaian capaian pemanfaatan sistem dihitung secara komposit, yaitu: Untuk Balai POM 50% Dashboard BOC, dan 50% untuk e-mail.

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Target Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada tahun 2024 yaitu 3. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT pada tahun 2024 adalah 3 dari target sebesar 3 sehingga capaian yang diperoleh adalah 120% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 102 Capaian Kinerja Indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” TAHUN 2024 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	3	3	120	Sangat Baik	
2023	2,5	3	120	Sangat Baik	
2022	2,25	2,5	111,11	Sangat Baik	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” adalah sebesar 3. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 3. Indikator kegiatan “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” pada tahun 2023 memiliki target sebesar 2,5. Dengan realisasi sebesar 3. Indikator kegiatan “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” pada tahun 2022 memiliki target sebesar 2,25 dengan realisasi sebesar 2,5. Realisasi indikator

kegiatan “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0.5 dari realisasi tahun 2022 dan sama dengan realisasi tahun 2023.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS / SATU KLASTER DAN TARGET NASIONAL

Realisasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada tahun 2024 sebesar 3 dibandingkan dengan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Badan POM RI tahun 2024 sebesar 3.

Jika dibandingkan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Bogor yang optimal pada tahun 2024, semua UPT pada satu klaster memiliki Target, Realisasi, dan Capaian yang sama. Sehingga IKU ini sudah tercapai pada semua UPT pada satu klaster.

Tabel 103 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal” Tahun 2024 Dengan Unit Kerja Sejenis / Satu Klaster

UNIT KERJA	TARGET NASIONAL	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	3	3	120	Sangat Baik	
Balai POM di Tangerang	3	3	120	Sangat Baik	
Balai POM di Manokwari	3	3	120	Sangat Baik	
Balai POM di Sofifi	3	3	120	Sangat Baik	

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Tahun 2024, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 120 % (Sangat Baik), Hal ini disebabkan sudah optimalnya dalam pemanfaatan sistem informasi pada Dashboard BOC dan email corporate. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Bogor yaitu mempertahankan pemanfaatan Email Corporate dan mengakses Dashboard BOC secara berkala setiap bulannya.

F. ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM MENCAPAI KINERJA

Tabel 106 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	502.596.000	499.216.087	99,33	105,18	0,21	95% (Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada tahun 2024 adalah sebesar 0,21 (95%) dengan kriteria efisien.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal disebabkan oleh program/kegiatan sebagai berikut:

1. Secara rutin mengakses dashboard BOC oleh pimpinan minimal 4 kali setiap bulannya.
2. Memberikan informasi/mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk mengakses/menggunakan email corporate dalam kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan mengirim informasi mengenai penyelenggaraan Apel Nasional via email corporate.

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Informasi laporan kinerja dapat menjadi bahan evaluasi untuk periode selanjutnya.

H. TINDAK LANJUT DAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 105 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja " Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal "

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

SASARAN KEGIATAN KE-9 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Tabel 107 CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9 TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	91,46	99,63	Cukup	

3.1.9.1 Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:(1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Penyerapan Anggaran; (4) Belanja Kontraktual; (5) Penyelesaian Tagihan; (6) Pengelolaan UP dan TUP; (7) Dispensasi Penyampaian SPM; (8) Konfirmasi Capaian Output.

Tabel 108 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT” TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KRITERIA	
	TARGET	REALISASI			
Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	91,46	99,63	Cukup	

Nilai kinerja anggaran Balai POM di Bogor dihitung menggunakan rumus:

$(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%).$

Sehingga diperoleh perhitungan seperti berikut:

$\text{Nilai IKPA } 50 \% \times 94,65 = 47.33$

$\text{Nilai EKA } 50 \% \times 88,26 = 44,13$

Nilai NKA = 47,33 + 44,13 = 91,46

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 91,80%. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bogor pada tahun 2024 sebesar 91,46%. Dengan demikian pencapaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 99,63% dengan kriteria **Cukup**.

B. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

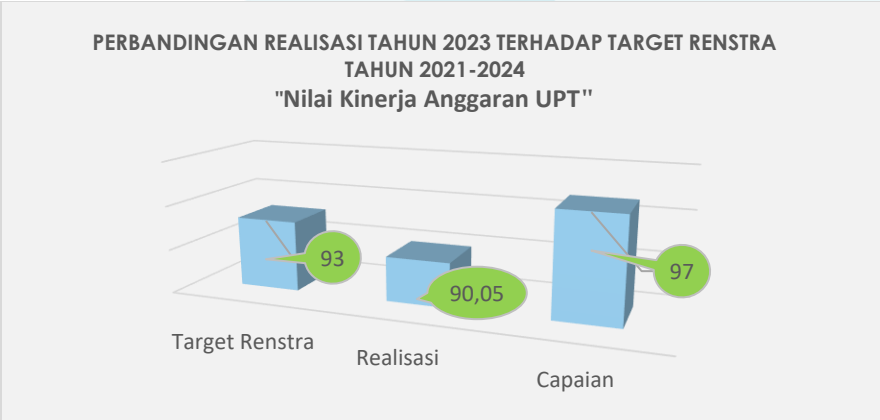
Tabel 109 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT” TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
2024	91,80	91,46	99,63	Cukup	
2023	90,6	91,58	101,1	Sangat Baik	
2022	90	86,68	96,53	Cukup	

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan pada indikator kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran UPT” adalah sebesar 91,80%. Indikator kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran UPT” pada tahun 2023 memiliki target sebesar 90,6% dan tahun 2022 sebesar 90%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 91,46%, sedangkan tahun 2023 dan tahun 2022 secara berurutan adalah sebesar 91,58% dan 86,68%. Realisasi di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,12% dari tahun 2023.

C. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2024

Target Rencana Strategis tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 93%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2024 dihitung terhadap target tersebut, maka realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 90,05% belum mencapai target Renstra di tahun 2024, dengan persentase capaian 97% dan masuk kedalam kategori **Akan Tercapai**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 31 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2024 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2021-2024 " Nilai Kinerja Anggaran UPT "

D. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN UNIT KERJA LAIN YANG SEJENIS

Realisasi indikator kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT yang optimal dibandingkan dengan unit kerja lain yang sejenis/ satu klaster dengan Balai POM di Bogor adalah Balai POM di Jember dan Balai POM di Surakarta. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT yang optimal di Balai POM di Bogor sebesar 91,80%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 90,05% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 98,09% dan memperoleh kriteria **Cukup**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT yang optimal di Balai POM di Jember sebesar 91,80%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 91,39% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 99,56% dan memperoleh kriteria **Cukup**. Target yang ditetapkan pada indikator kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT yang optimal Balai POM di Surakarta sebesar 91,80%. Persentase realisasi target indikator kegiatan tersebut adalah sebesar 90,73% dengan memperoleh persentase capaian sebesar 98,83% dan memperoleh kriteria **Cukup**.

Tabel 110 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR “Nilai Kinerja Anggaran UPT” TAHUN 2023 DENGAN UNIT KERJA SEJENIS

UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	KATEGORI	
Balai POM di Bogor	91,80	90,05	98,09	Cukup	
Balai POM di Jember	91,80	91,39	99,56	Cukup	
Balai POM di Surakarta	91,80	90,73	98,83	Cukup	

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA KE DEPAN (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Pada Tahun 2024 nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini yaitu sebesar 90,05% (**Cukup**), tidak tercapainya sasaran indikator kinerja ini dikarenakan Tidak terkelolanya

Rencana Penarikan Dana, dan UP/TUP dengan baik. untuk tahun selanjutnya Balai POM di Bogor akan memonitoring RPD setiap minggu dan membuat kertas kerja pencapaian IKPA

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Pada Tahun 2024 nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini yaitu sebesar 90,05% (**Cukup**), tidak tercapainya sasaran indikator kinerja ini dikarenakan Tidak terkelolanya Rencana Penarikan Dana, dan UP/TUP dengan baik. untuk tahun selanjutnya Balai POM di Bogor akan memonitoring RPD setiap minggu dan membuat kertas kerja pencapaian IKPA

G. INFORMASI TENTANG PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Informasi laporan kinerja dapat menjadi bahan evaluasi untuk periode selanjutnya.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Tabel 111 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Indikator Kinerja "Nilai Kinerja Anggaran UPT"

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	-	-	-	-	-	

I. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 112 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja " Nilai Kinerja Anggaran UPT "

INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI	
Nilai Kinerja Anggaran UPT	502.596.000	499.216.087	99,33	98,09	-0,01	75% (Tidak Efisien)

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT yang optimal pada tahun 2024 adalah sebesar -0,01 (75%) dengan kriteria tidak efisien.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

Tabel 113 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yg memadai	Selesai	-	-	-	Melakukan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Loka POM di Kab. Bogor tahun 2023 yang disusun berdasarkan data Laporan Evaluasi Internal Tahun 2022, Laporan Tahunan 2022, dan Laporan Kinerja Tahun 2022
2	Melakukan kaji dokumen perencanaan	Selesai	-	-	-	Melakukan kajian dokumen perencanaan untuk memastikan keselarasan indikator, target, pada dokumen-dokumen perencanaan kinerja berupa notulensi rapat penetapan target kinerja tahun 2023 Loka POM Bogor
3	Menyampaikan dokumen Perencanaan Kinerja periode selanjutnya pada esr.menpan.go.id tepat waktu	Selesai	-	-	-	Melaporkan dokumen perencanaan kinerja periode tahun 2023 tepat waktu pada esr.menpan.go.id
4	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria	Selesai	-	-	-	Pembuatan SOP Mikro Loka POM di Kab. Bogor mengenai pengumpulan data kinerja

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
5	Dokumen Laporan Kinerja agar dipublikasikan melalui media yang mudah di akses masyarakat/stakeholder	Selesai	-	-	-	Melakukan publikasi dokumen laporan kinerja Triwulan I dan II tahun 2023 pada Subsite Loka POM di Kab. Bogor
6	Memastikan validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan	Selesai	-	-	-	Mengadaptasi format pelaporan capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Badan POM Pusat
7	Melaksanakan tindak lanjut dan monitoring atas seluruh rencana aksi/ rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti.	Selesai	-	-	-	Melakukan penambahan keterangan terhadap monitoring atas setiap rekomendasi pada laporan evaluasi internal.
8	Memastikan pengisian capaian kinerja, rencana aksi dan tindak lanjut pada aplikasi simetris telah dilakukan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan	Selesai	-	-	-	Melakukan pelaporan kinerja pada aplikasi Simetris tepat waktu
9	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	Selesai	-	-	-	Melakukan rapat koordinasi membahas dan memonitoring capaian kinerja setiap triwulan
10	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)	Selesai	-	-	-	Melakukan rapat koordinasi membahas dan memonitoring capaian kinerja setiap triwulan
11	Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya	Selesai	-	-	-	Melakukan rapat koordinasi membahas dan memonitoring capaian kinerja setiap triwulan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
12	Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya	Selesai	-	-	-	Melakukan rapat koordinasi membahas dan memonitoring capaian kinerja setiap triwulan

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2024 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai POM di Bogor untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (continuous improvement), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Bogor. Adapun pemanfaatan Laporan Kinerja Tahun 2024 digunakan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi masing-masing indikator serta target yang ditetapkan pada tahun 2024. Terdapat salah satu indikator yang berdasarkan hasil analisis memiliki target yang cukup tinggi dibandingkan dengan realisasinya. Atas hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Bogor adalah mengkoordinasikan dengan biro perencanaan dan keuangan untuk melakukan reviu target pada tahun 2024.
2. Menetapkan langkah – langkah perbaikan dalam pencapaian realisasi masing-masing indikator. Diantaranya, perubahan kebijakan, alokasi sumber daya manusia serta alokasi anggaran untuk pencapaian hasil realisasi yang optimal.
3. Informasi pada Laporan Kinerja 2024 bisa menjadi pertimbangan untuk penentuan target di tahun 2024.

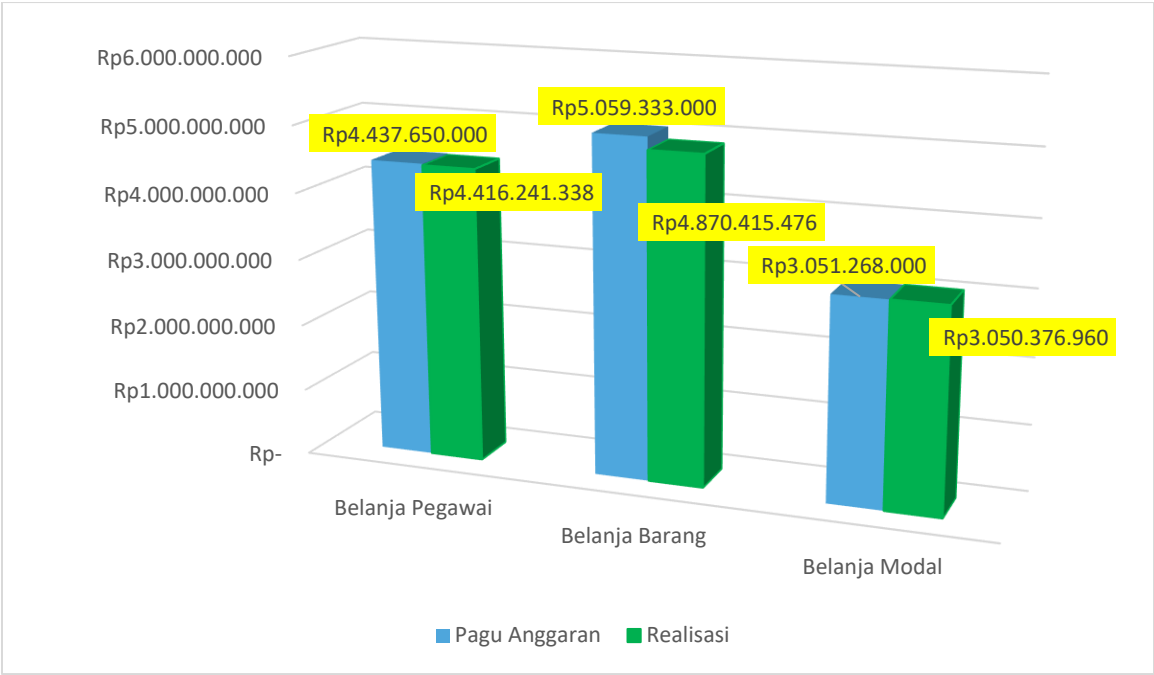
3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 anggaran Balai POM di Bogor sebesar Rp. 12,548,251,000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. **12,337,033,774,-** (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 98,32%. Perincian alokasi anggaran dan realisasinya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 114 RINCIAN REALISASI ANGGARAN BALAI POM DI BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 4,437,650,000	Rp 4,416,241,338	99.52
2.	Belanja Barang	Rp 5,059,333,000	Rp 4,870,415,476	96.27
3.	Belanja Modal	Rp 3,051,268,000	Rp 3,050,376,960	99.97
JUMLAH		Rp 12,548,251,000	Rp 12,337,033,774	98.32

Perbandingan komponen serapan anggaran pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

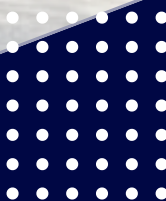


Gambar 32 Rincian Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

LAPORAN KINERJA

TAHUN
2024

BALAI POM DI BOGOR



BAB 4 PENUTUP

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai POM di Bogor Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bogor tahun 2021-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 7 sasaran strategis memperoleh capaian “**Sangat Baik**”, dan 2 sasaran strategis dengan capaian “**Cukup**”.

Pernyataan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 105,23% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
2. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 107,22% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
3. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 100,10 % dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
4. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 120,00% dengan kriteria “**Sangat Baik**”
5. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 106,58% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
6. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor belum berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal dengan NPS sebesar 97,18% dengan kriteria “**Cukup**”.
7. Pada Tahun 2024 untuk indikator kegiatan “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal” dengan NPS sebesar 105,18% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
8. Pada Tahun 2024 Balai POM di Bogor berhasil menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS sebesar 120% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.
9. Pada Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Bogor berhasil mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel dengan NPS sebesar 98,09 % dengan kriteria “**Cukup**”.

Persentase capaian target indikator kinerja Balai POM di Bogor pada tahun 2024 antara 97,19% sampai dengan 120%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal”. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator

“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” sebesar 120%.

Pada tahun 2024, anggaran Balai POM di Bogor sebesar 12.369.317.000 (Dua Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. **12.337.033.774,-** (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 98,32%.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai POM di Bogor untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

4.2 SARAN

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, maka Balai POM di Bogor perlu melakukan beberapa pendekatan/perbaikan, antara lain:

1. Koordinasi dengan lintas sektor, sehingga Inpres No. 3 tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait, agar kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong untuk dapat dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan peningkatan kepuasan masyarakat atau konsumen terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan berbasis teknologi.
5. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
7. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Balai POM di Bogor.
8. Diperlukan penambahan SDM untuk menunjang tugas dan tanggung jawab jabatan sesuai dengan beban kerja yang ada.
9. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Criminal Justice System dalam penanganan perkara di bidang obat dan makanan.

LAMPIRAN

1. RAPK TAHUN 2024

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM
TAHUN 2024**

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	DES	Realisasi s.d bulan				
					DESEMBER				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,50	98,50	316	332	95,18	96,63	96,63
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	91,00	90	98	91,84	100,92	100,92
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	96,00	118	130	90,77	94,55	94,55
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,80	92,80	17	26	65,38	70,46	70,46
		5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	85,00	17	20	85,00	100,00	100,00

	Sasaran Strategis	Indikator		Target 2024 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	(menggunakan DES	Realisasi s.d bulan				
						DESEMBER				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,00	75,00	-	-	87,64	116,85	116,85
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	-	-	100,00	106,38	106,38
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	79,00	79,00	66	83	79,52	100,66	100,66
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,00	80,00	312	383	81,46	101,83	101,83
		11	Indeks Pelayanan Publik	3,55	3,55			3,89	109,58	109,58
		12	Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetika yang baik	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	DES	Realisasi s.d bulan DESEMBER				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
		13 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	95,00	-	-	99,67	104,92	104,92
3	Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,20	93,20			93,29	100,10	100,10
		15 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekoiah (PJAS) Aman	6,00	6,00			6,00	100,00	100,00
		16 Jumlah Desa Pangan Aman	1,00	1,00			1,00	100,00	100,00
		17 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1,00	1,00			1,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18 Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	-	-	50,00	100,00	100,00
		19 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00			50,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00	82,00	-	-	100,00	121,95	121,95
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	21 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	40,00	40,00			54,04	135,10	135,10
		22 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00			3,00	100,00	100,00

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	(menggunakan DES	Realisasi s.d bulan DESEMBER				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan	23 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	88,67	88,67			87,39	98,56	98,56
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	24 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	94,60	94,60			99,32	104,99	104,99
		25 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	82,63	82,63			84,91	102,76	102,76
		26 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	89,75	89,75			91,60	102,06	102,06
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	27 Indeks RB UPT	75,00	75,00			76,00	101,33	101,33
		28 Nilai AKIP UPT	79,43	79,43			79,02	99,48	99,48
		29 Nilai Pengelolaan Kearsipan	83,24	83,24			93,66	112,52	112,52
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	30 Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,16	90,16			87,42	96,96	96,96

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	(menggunakan DES	Realisasi s.d bulan DESEMBER				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31 Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,81	91,81			84,83	92,39	92,39
		32 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	97,74	97,74			100,00	102,31	102,31
		33 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	91,00	91,00			91,76	100,84	100,84
		34 Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	60,00			83,30	138,83	138,83

Bogor, 10 Januari 2025

Mengetahui,

Kepala Balai POM di bogor



Jeffeta Pradeko Putra, S.Farm., M.Si. 